



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA





METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PURBALINGGA BAGIAN 2

Pengarah:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

Penanggung Jawab:

Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T

Penyusun:

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setiyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

Wely Andika, S.Kom

Annas Dian Wibowo, S.Kom

Sugiono, S.T

Penata Layout:

Hanifah Khairunisa Shofiaty, S.T

Copyright : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Diterbitkan Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga
Jln. Letkol Isdiman No 17 A, Purbalingga

Metadata Indikator Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga

Bagian #2 : 759 halaman

Ukuran Buku : 210 mm x 148,5 mm

ISBN : *** - *** - *** - * - *



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi, sehingga buku meta data sektoral Kabupaten Purbalingga bisa terselesaikan dengan baik, tanpa adanya halangan yang berarti. Kami juga ucapan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku meta data sektoral, semoga buku ini mendapatkan kebermanfaatan dimasa depan.

Metadata indikator menurut Pembina Data Statistik (BPS) adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Data statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Meta data statistik sektoral Kabupaten Purbalingga nantinya bisa menjadi rujukan bagi organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam pengisian data sektoral agar data benar-benar valid dan kontinu, walaupun terjadi pergeseran staf, mutasi dan promosi. Dengan menjaga validitas dan kontinuitas data, pemerintah dan masyarakat bisa



menggunakan data tersebut sesuai dengan kepentingannya. Meta data menjadi langkah penting dalam penyusunan data yang berkualitas.

Ibarat kata pepatah tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan buku metadata ini, tentunya jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran, kritik dan masukan senantiasa kami harapkan bagi semua pihak yang membaca buku ini. Agar kedepan bisa kami review guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirul Kalam, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purbalingga, Agustus 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI..... | 5 |
| PENDAHULUAN..... | 6 |
| DINRUMKIM | 10 |
| DINSOSDALDUKKBP3A..... | 112 |
| DINNAKER | 318 |
| DKPP | 393 |
| DLH..... | 456 |
| DINDUKCAPIL..... | 528 |
| DINPERMASDES | 576 |
| DINHUB | 612 |
| DINKOMINFO | 657 |
| DINKOPUKM..... | 727 |



PENDAHULUAN

Latar Belakang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai validata tingkat daerah dalam kerangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Metadata Indikator Statistik menurut PERBAN BPS Nomor 5 Tahun 2020:

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.



| No | Nama Atribut | Penjelasan |
|----|--|--|
| 1 | Nama Indikator | Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel |
| 2 | Konsep | Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu |
| 3 | Definisi | Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain |
| 4 | Interpretasi | Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi |
| 5 | Metode/Rumus Perhitungan | Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik |
| 6 | Ukuran | Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan |
| 7 | Satuan | Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan |
| 8 | Klasifikasi | Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas |
| 9 | Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun | Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikas |



| No | Nama Atribut | Penjelasan |
|----|--|--|
| 10 | Nama Indikator Pembangun | Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit |
| 11 | Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan |
| 12 | Nama Variabel Pembangun | Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator |
| 13 | Level Estimasi | Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait |
| 14 | Apakah Indikator Dapat diakses Umum | Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak |

Ruang Lingkup dan Batasan:

Ruang Lingkup publikasi ringkasan metadata indikator statistik sektoral ini dibatasi pada konten dan tahun. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat banyaknya indikator statistik sektoral dari tahun ke tahun maupun isian dari metadata indikator statistik sektoral. Pembatasan tahun dilakukan pada pengumpulan tahun 2022, sedangkan pembatasan pada konten metadata indikator statistik sektoral ditujukan pada tiga kelompok informasi yaitu identitas Indikator, data, dan metodologi. Walaupun demikian, dari tiga kelompok informasi tersebut ada 14 informasi yang disajikan yaitu:

1. Identitas Indikator
 - a. Konsep dan Definisi
 - b. Unit Penyelenggara
 - c. Kelompok Indikator
 - d. Tujuan dan Kegunaan
 - e. Interpretasi



2. Data

- a. Data yang dikumpulkan
- b. Periodesasi

3. Metodologi

- a. Unit Observasi
- b. Tingkat Penyajian
- c. Rumus



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN



Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh apabila belum tersedia PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) atau sudah tersedia namun PSU tidak layak (tidak sesuai standar kelayakan). Semakin banyak jumlah kawasan permukiman kumuh, menunjukkan tingginya permukiman yang tidak sesuai standar kelayakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pusat (SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kawasan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan Permukiman Kumuh adalah Wilayah yang memiliki kondisi fisik dan sosial yang tidak memadai atau buruk, seperti infrastruktur yang rusak, kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan, serta kondisi kehidupan sosial dan ekonomi yang rendah. Kawasan permukiman kumuh sering kali juga ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan ketidakstabilan lingkungan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah kabupaten dalam mengukur kemajuan peningkatan kualitas hidup penduduk dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan memantau dan mengurangi jumlah kawasan permukiman kumuh, pemerintah kabupaten dapat berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Kawasan Permukiman Kumuh di
Periodikasi
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | SK No. 640/212 Tahun 2021 |
| Ukuran | terdiri atas kawasan permukiman |
| Satuan | kumuh kewenangan Kabupaten, |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Provinsi dan Pusat |
| Umum | Jumlah |
| | kawasan |
| | Ya |



Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan Permukiman Kumuh adalah Wilayah yang memiliki kondisi fisik dan sosial yang tidak memadai atau buruk, seperti infrastruktur yang rusak, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan, serta kondisi kehidupan sosial dan ekonomi yang rendah. Kawasan permukiman kumuh sering kali juga ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan ketidakstabilan lingkungan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah provinsi dalam memantau dan mengukur pengurangan kawasan permukiman kumuh. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah kawasan permukiman kumuh yang ada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pemerintah dapat melihat sejauh mana upaya pengurangan kawasan permukiman kumuh telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Kawasan Permukiman Kumuh di
Periodikasi
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | SK No. 640/212 Tahun 2021 |
| Ukuran | terdiri atas kawasan permukiman |
| Satuan | kumuh kewenangan Kabupaten, |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Provinsi dan Pusat |
| Umum | Jumlah |
| | kawasan |
| | Ya |



Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pusat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan Permukiman Kumuh adalah Wilayah yang memiliki kondisi fisik dan sosial yang tidak memadai atau buruk, seperti infrastruktur yang rusak, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penerangan, serta kondisi kehidupan sosial dan ekonomi yang rendah. Kawasan permukiman kumuh sering kali juga ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan ketidakstabilan lingkungan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jumlah kawasan permukiman kumuh kewenangan pusat dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam memantau dan mengukur pengurangan kawasan permukiman kumuh. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah kawasan permukiman kumuh yang ada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah dapat melihat sejauh mana upaya pengurangan kawasan permukiman kumuh telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Kawasan Permukiman Kumuh di
Periodikasi
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | SK No. 640/212 Tahun 2021 |
| Ukuran | terdiri atas kawasan permukiman |
| Satuan | kumuh kewenangan Kabupaten, |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Provinsi dan Pusat |
| Umum | Jumlah |
| | kawasan |
| | Ya |



Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Berdasarkan SK Bupati)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh apabila belum tersedia PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) atau sudah tersedia namun PSU tidak layak (tidak sesuai standar kelayakan). Jika luas kawasan permukiman kumuh cukup besar, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam mewujudkan kondisi kawasan permukiman yang layak bagi penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlahkan luas permukiman kumuh kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pusat (SK No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga) |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh adalah Area geografis yang mencakup pemukiman yang dianggap kumuh berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat kepadatan penduduk, kualitas perumahan, aksesibilitas fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan sekitar Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten menggambarkan tingkat masalah permukiman kumuh di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jika luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten cukup besar, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam mewujudkan kondisi kawasan permukiman yang layak bagi penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

SK No. 640/212 Tahun 2021



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

terdiri atas luasan permukiman
kumuh kewenangan Kabupaten,
Provinsi dan Pusat

Luas
ha
Ya



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh adalah Area geografis yang mencakup pemukiman yang dianggap kumuh berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat kepadatan penduduk, kualitas perumahan, aksesibilitas fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan sekitar Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi menggambarkan tingkat masalah permukiman kumuh di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jika luas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi cukup besar, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam mewujudkan kondisi kawasan permukiman yang layak bagi penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

SK No. 640/212 Tahun 2021 terdiri atas luasan permukiman



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

kumuh kewenangan Kabupaten,
Provinsi dan Pusat

Luas

ha

Ya



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pusat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh adalah Area geografis yang mencakup pemukiman yang dianggap kumuh berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat kepadatan penduduk, kualitas perumahan, aksesibilitas fasilitas dasar, dan kondisi lingkungan sekitar Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pusat menggambarkan tingkat masalah permukiman kumuh di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jika luas kawasan permukiman kumuh kewenangan pusat cukup besar, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam mewujudkan kondisi kawasan permukiman yang layak bagi penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

SK No. 640/212 Tahun 2021 terdiri atas luasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten,



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Provinsi dan Pusat

Luas
ha

Ya



Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh adalah Jumlah rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman dalam kategori kumuh

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, semakin besar masalah yang harus dihadapi dalam hal infrastruktur dan lingkungan pemukiman.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

rt

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh adalah Jumlah bangunan rumah yang terdapat di kawasan permukiman dalam kategori kumuh Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Semakin tinggi jumlah bangunan rumah di kawasan permukiman kumuh, semakin besar masalah yang harus diatasi dalam hal kondisi perumahan yang buruk.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Penanganan Kawasan Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Penanganan Kawasan Kumuh adalah Ukuran atau area kawasan kumuh yang ditangani atau yang tertangani

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Luas penanganan kawasan kumuh mencerminkan sejauh mana area kumuh telah ditangani dalam upaya perbaikan dan rehabilitasi. Semakin luas luas penanganan, semakin luas area kumuh yang telah mendapatkan perhatian dan tindakan perbaikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Kawasan kumuh yang sudah tertangani sesuai SK Kawasan Kumuh

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sisa Luas Kawasan Kumuh/ Luas Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh adalah Ukuran atau area dari kawasan permukiman yang masih memenuhi kriteria permukiman kumuh atau tidak layak huni dan belum mendapatkan intervensi atau tindakan perbaikan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Sisa luas kawasan kumuh mencerminkan sejauh mana masalah pemukiman kumuh masih ada dan belum mendapatkan perhatian atau penanganan yang memadai. Semakin besar luas kawasan tersebut, semakin luas masalah pemukiman kumuh yang perlu ditangani.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan L1 – L2

Keterangan:

L1 = Luas Kawasan Kumuh



L2 = Luas Penanganan Kawasan
Kumuh

| | |
|-------------------------------------|------|
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani adalah Perbandingan luas penanganan kawasan kumuh dengan luas kawasan permukiman kumuh

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Persentase luas kawasan kumuh perkotaan tertangani menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan penanganan yang dilakukan, diharapkan penduduk dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas dasar, infrastruktur, dan lingkungan yang sehat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{L1}{L2} \times 100\%$$

Keterangan:

L1 = Luas Penanganan Kawasan Kumuh

L2 = Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten



| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Luas Kawasan Permukiman Perkotaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kawasan permukiman perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemerintah, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Luas kawasan permukiman perkotaan dapat mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan kota seiring waktu. Jika luas permukiman perkotaan meningkat, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi dan ekspansi wilayah perkotaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan dalam RTRW
Kabupaten Purbalingga Tahun
2011-2031

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan Kawasan Permukiman Perkotaan Tidak Kumuh adalah Perbandingan antara Luas kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan Luas kawasan perkotaan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh menyatakan kualitas dan keberlanjutan perumahan di kawasan permukiman perkotaan, termasuk kondisi fisik bangunan, keberlanjutan energi, akses ke perumahan yang terjangkau, dan tata ruang yang teratur.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$100\% - \left(\frac{L_1}{L_2} \times 100\% \right)$$

Keterangan:

L1 = Luas kawasan permukiman perkotaan kumuh

L2 = Luas kawasan perkotaan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Peningkatan Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan adalah Persentase kenaikan cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh dengan tahun sebelumnya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan menggambarkan persentase pertumbuhan atau perubahan luas kawasan perkotaan yang sebelumnya dianggap kumuh dan kemudian mengalami peningkatan atau perbaikan kondisi sehingga tidak lagi dianggap kumuh. Ini mencerminkan progres dalam upaya perbaikan dan rehabilitasi kawasan perkotaan yang sebelumnya tidak layak huni atau memenuhi kriteria permukiman kumuh. Semakin tinggi peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan maka semakin baik optimalisasi kualitas kawasan perkotaan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Persentase kawasan permukiman tidak kumuh tahun n - Persentase kawasan permukiman tidak kumuh tahun (n-1) |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten (< 10 Ha) yang Tertangani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten (< 10 Ha) yang Tertangani adalah Ukuran wilayah permukiman perkotaan yang memiliki ukuran kurang dari 10 hektar dan telah ditangani atau diberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kondisi kumuh yang ada di dalamnya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Semakin besar luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani, maka semakin banyak wilayah yang telah mengalami perbaikan infrastruktur dan fasilitas, rehabilitasi, relokasi, serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di kawasan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Scoring parameter kumuh sesuai Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018



| | |
|-------------------------------------|------|
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi (10-15 Ha) yang Tertangani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi (10-15 Ha) yang Tertangani adalah Ukuran wilayah permukiman kumuh di tingkat provinsi yang telah mendapatkan perhatian dan tindakan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Semakin besar luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani, maka semakin banyak wilayah yang telah mengalami perbaikan infrastruktur dan fasilitas, rehabilitasi, relokasi, serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di kawasan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Scoring parameter kumuh sesuai Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2019

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Luas Kawasan Permukiman Kumuh Pusat (> 15 Ha) yang Tertangani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Pusat (> 15 Ha) yang Tertangani adalah Ukuran wilayah permukiman kumuh di tingkat pusat yang telah mendapatkan perhatian dan tindakan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin besar luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani, maka semakin banyak wilayah yang telah mengalami perbaikan infrastruktur dan fasilitas, rehabilitasi, relokasi, serta peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di kawasan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Luas Kawasan Permukiman Kumuh
Yang Tertangani di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Scoring parameter kumuh sesuai
Peraturan Menteri PUPR No 14
Tahun 2020

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Kepemilikan Rumah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Interpretasi

Jumlah Kepemilikan Rumah adalah Jumlah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Semakin banyak jumlah kepemilikan rumah, maka semakin tinggi tingkat kepemilikan rumah dalam pemukiman. Jika terdapat lebih banyak orang memiliki rumah di suatu pemukiman, maka ada peningkatan akses dan kesempatan bagi individu dan keluarga untuk memiliki tempat tinggal sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

unit

Ya



Cakupan Kepemilikan Rumah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan Kepemilikan Rumah adalah Perbandingan antara jumlah kepemilikan rumah dengan jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Semakin tinggi cakupan kepemilikan rumah menunjukkan semakin banyak orang yang memiliki akses dan kesempatan untuk memiliki rumah sendiri.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah kepemilikan rumah

J2 = Jumlah KK

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Jumlah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan sasaran yaitu untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah maka semakin baik pemerintah memfasilitasi terkait permasalahan memiliki lahan untuk perumahan bagi MBR

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Rusun Hunian Milik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rusun Hunian Milik adalah Jumlah rusun sederhana berstatus milik, dengan para pengguna yang menjadi pemilik utama atau pembeli tangan pertama dari pihak pengembang secara langsung.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rusun hunian milik maka semakin banyak alternatif hunian di tengah semakin sempitnya lahan untuk perumahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rusun Hunian Milik

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Daya Tampung Rusun Hunian Milik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Daya Tampung Rusun Hunian Milik adalah Kapasitas Rusunami (Rusun Hunian Milik) dalam menampung jumlah penghuninya. Daya tampung rusunami merujuk pada jumlah unit hunian yang tersedia dalam rusun hunian milik untuk dihuni individu atau keluarga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin tinggi daya tampung rusun hunian milik, semakin banyak individu atau keluarga yang dapat diakomodasi dalam rusun tersebut dan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Daya Tampung Rusun Hunian Milik

Ukuran

Kapasitas

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rusun Hunian Sewa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rusun Hunian Sewa adalah Jumlah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu, misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain-lainnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rusun hunian sewa, maka akan semakin banyak opsi perumahan sewa terjangkau yang tersedia bagi masyarakat di tengah semakin sempitnya lahan perumahan dan tingginya harga perumahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Rusun Hunian Sewa

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Daya Tampung Rusun Hunian Sewa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Daya Tampung Rusun Hunian Sewa adalah Kapasitas rusunawa untuk menampung jumlah penghuninya Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman Semakin besar daya tampung, maka semakin banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Interpretasi

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

standar ukuran 1 unit rusun minim 30 m², dan kebutuhan ruang 1 orang 9 m², estimasi 1 unit rusun untuk 4 jiwa

Ukuran

Kapasitas

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rumah Layak Huni

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rumah Layak Huni adalah Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan kriteria atap yang memadai; tertutup dan tidak bocor, memiliki lantai dan dindingnya kokoh layak

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah rumah layak huni maka semakin terwujud kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

T1 – T2

Keterangan:

T1 = Total Rumah

T2 = Total Rumah Tidak Layak Huni

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan kriteria pondasi tidak kokoh, material tidak berkualitas, sirkulasi cahaya udara yang buruk.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin sedikit jumlah rumah tidak layak huni maka semakin terwujud kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

T1 – T2

Keterangan:

T1 = Total Rumah

T2 = Total Rumah Layak Huni

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Perumahan Developer

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Perumahan Developer adalah Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti yang mencakup kegiatan yang berkisar dari renovasi dan penyewaan kembali pada bangunan yang telah ada, hingga pembelian mentah suatu tanah dan penjualan lahan pembangunan atau parsel kepada orang lain

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jumlah perumahan developer memberikan gambaran tentang sejauh mana sektor pengembangan properti telah berkontribusi dalam menyediakan perumahan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah bangunan rumah yang dibangun oleh Developer

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Perumahan Developer yang sudah Diserahterimakan Set PSU adalah Jumlah perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang properti (developer) dan kemudian menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) ke pemerintah kabupaten Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dengan peningkatan jumlah perumahan developer yang sudah diserahterimakan set PSU, akan ada peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang siap untuk dihuni. Tujuan diserahterimakan ke pemerintah adalah

1. PSU yang diserahterimakan sudah menjadi aset milik daerah,
2. Adanya keberlanjutan dalam pemeliharaan PSU yang sudah diserahterimakan kepada pemerintah
3. Terjaganya kondisi perumahan yang berkualitas

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Perumahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Penanganan RTLH sumber pembayaran APBN

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sumber pembayaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBN

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penanganan RTLH yang dibiayai melalui APBN menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan tempat tinggal layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan Surat Keputusan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Prov

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi adalah Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Prov

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penanganan RTLH menggunakan APBD Provinsi menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan tempat tinggal layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan Surat Keputusan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan RTLH sumber pembayaran APBD Kab/Kota adalah Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran APBD Kab/Kota

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penanganan RTLH menggunakan APBD Kab/Kota menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah kab/kota dalam meningkatkan tempat tinggal layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber
Pembelian di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Berdasarkan Surat Keputusan
Jumlah
unit
Ya



Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan RTLH sumber pembayaran CSR adalah Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penanganan RTLH dengan sumber pembayaran CSR (Corporate Social Responsibility), menunjukkan upaya dan komitmen perusahaan atau entitas bisnis dalam meningkatkan tempat tinggal layak huni

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan RTLH sumber pembayaran Swadaya/Lainnya adalah Penanganan RTLH yang dibiayai melalui anggaran swadaya/lainnya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin banyak jumlah penanganan RTLH yang didukung oleh sumbangan masyarakat atau inisiatif swadaya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam perbaikan perumahan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tanggungjawab Swadaya

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum



Jumlah Total Penanganan RTLH

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Jumlah Total Penanganan RTLH adalah Penjumlahan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, CSR, Swadaya/Lainnya Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Data mengenai jumlah total penanganan RTLH dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana progres telah dicapai dalam mengatasi masalah perumahan tidak layak. Semakin banyak jumlah penanganan RTLH maka semakin berkurang jumlah RTLH

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan $J1 + J2 + J3 + J4 + J5$

Keterangan:

$J1$ = Jumlah Penanganan RTLH pembiayaan APBN

$J2$ = Jumlah Penanganan RTLH



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum

pembiayaan APBD Prov

J3 = Jumlah Penanganan RTLH

pembiayaan APBD Kab/Kota

J4 = Jumlah Penanganan RTLH

pembiayaan CSR

J5 = Jumlah Penanganan RTLH

pembiayaan Swadaya/Lainnya

Jumlah

Unit



Jumlah KK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KK (Kartu Keluarga) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Menunjukkan jumlah KK di
Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Backlog Rumah di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pendataan Berdasarkan
Purbalingga dalam Angka /Dukcapil

Ukuran
Satuan

Jumlah
unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Backlog Rumah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Backlog Rumah adalah Selisih antara jumlah Kartu Keluarga dengan jumlah rumah yang ada.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jumlah backlog rumah mengukur jumlah kebutuhan rumah. Jumlah backlog rumah yang tinggi menandakan adanya kekurangan perumahan yang signifikan dalam suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan perumahan tidak mampu memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Backlog Rumah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah KK - Jumlah Rumah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase Backlog Rumah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Backlog Rumah adalah Perbandingan antara jumlah backlog dengan jumlah rumah yang ada

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Persentase backlog rumah yang tinggi menunjukkan tingkat kekurangan perumahan yang signifikan dalam suatu daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi rumah yang belum terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Backlog Rumah di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Backlog

J2 = Jumlah Rumah/Jumlah KK

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rumah Korban Bencana Rusak Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Korban Bencana Rusak Berat adalah Rumah korban akibat bencana (longsor, banjir, angin ribut dll)

Bangunan Rusak berat dengan kriteria:

1. Bangunan Roboh Total.
 2. Sebagian Besar Struktur Utama Rusak
 3. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah / rusak
 4. Secara fisik kondisi Kerusakan diatas 65%
 5. Komponen penunjang lainnya rusak total
 6. Membahayakan / beresiko jika difungsikan
 7. Perbaikan dengan Rekonstruksi Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Rumah korban bencana rusak berat mengalami kerusakan yang parah atau sangat signifikan sehingga tidak layak huni atau tidak aman untuk ditinggali

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Rumah Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | kejadian |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rumah Korban Bencana Rusak Sedang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Korban Bencana Rusak Sedang adalah Bangunan Rusak Sedang dengan Kriteria:

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil Struktur Utama Bangunan Rusak Ringan
3. Sebagian Besar Komponen Penunjang Lainnya Rusak
4. Relatif Masih Berfungsi jika digunakan
5. Skala fisik 45%
6. Perbaikan dengan Rehabilitasi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Rumah korban bencana rusak sedang mengalami kerusakan yang cukup signifikan, tetapi masih memungkinkan bagi pemiliknya untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi rumah sehingga layak huni.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Rumah Korban Bencana di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rumah Korban Bencana Rusak Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Korban Bencana Rusak Ringan adalah Bangunan Rusak Ringan dengan Kriteria:

1. Bangunan Masih Berdiri
2. Sebagian Kecil bangunan Rusak Ringan
3. Pada dinding plesteran terjadi retak-retak
4. Sebagian kecil komponen pendukung rusak
5. Masih bisa berfungsi jika digunakan
6. Secara fisik kerusakan 30%

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Rumah korban bencana rusak ringan menggambarkan rumah-rumah yang mengalami kerusakan yang tidak begitu parah sehingga masih dapat diperbaiki atau dihuni dengan perbaikan minimal

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Rumah Korban Bencana di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan akses air minum layak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Air Minum Layak adalah Air minum yang terlindung meliputi:

1. air ledeng (kran), kran umum, hydrant umum, terminal air, Penampungan Air Hujan (PAH) atau
2. mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. (Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Cakupan akses air minum layak mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan akses yang memadai terhadap air minum yang aman dan bersih bagi penduduknya. Dengan tingkat cakupan yang tinggi, penduduk memiliki akses yang memadai terhadap air minum yang aman dan bersih

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan akses air minum Perkotaan layak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan akses air minum Perkotaan layak adalah Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Cakupan akses air minum perkotaan layak menggambarkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas air minum yang memadai di area perkotaan yang memenuhi standar kelayakan. Semakin tinggi cakupan, maka semakin banyak penduduk di area perkotaan yang memiliki akses yang memadai terhadap pasokan air minum yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar kelayakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan di Jakstrada

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan akses air minum Perdesaan layak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan akses air minum Perdesaan layak adalah Perbandingan jumlah rumah yang terakses air minum layak baik perpipaan maupun non perpipaan dengan total jumlah rumah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Cakupan akses air minum pedesaan layak menggambarkan tingkat ketersediaan dan aksesibilitas air minum yang memadai di area pedesaan yang memenuhi standar kelayakan. Semakin tinggi cakupan, maka semakin banyak penduduk di area pedesaan yang memiliki akses yang memadai terhadap pasokan air minum yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar kelayakan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan di Jakstrada

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan sanitasi layak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sanitasi Layak adalah Sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Cakupan sanitasi layak mengacu pada tingkat atau persentase populasi yang memiliki akses dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memadai dan aman untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar. Tingkat cakupan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

J2 = Jumlah total rumah tangga

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum adalah Kenaikan persentase akses rumah tangga terhadap air minum

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Persentase peningkatan menggambarkan sejauh mana terjadi peningkatan akses air minum di antara rumah tangga dalam periode waktu tertentu. Jika persentase peningkatan tinggi, ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam memperluas dan meningkatkan akses air minum bagi rumah tangga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Cakupan akses air minum layak tahun n - Cakupan akses air minum layak tahun (n -1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase rumah tangga mengakses sanitasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase rumah tangga mengakses sanitasi adalah Kenaikan persentase rumah tangga mengakses sanitasi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan, mengurangi penyebaran penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Cakupan akses sanitasi layak tahun
n - Cakupan akses sanitasi layak
tahun (n -1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) adalah Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui jaringan perpipaan (Perusda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), DAK (Dana Alokasi Khusus)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Jika jumlah jiwa yang terlayani akses air minum melalui jaringan perpipaan tinggi, ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau mayoritas penduduk di daerah tersebut dapat mengakses air minum yang aman dan terjangkau melalui sistem jaringan perpipaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan di Jakstrada

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah Jumlah orang yang terlayani air bersih melalui bukan jaringan perpipaan (sumur pribadi, air permukaan, mata air belum terlindungi, belik maupun sumber air yang ada di sekitar desa)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Jika jumlah jiwa yang terlayani akses air minum melalui jaringan non perpipaan signifikan, ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut mendapatkan pasokan air minum melalui sumber alternatif yang tidak terhubung ke sistem jaringan perpipaan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Air Minum Perpipaan dan
Non Perpipaan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan di Jakstrada

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) adalah Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Perpipaan (JP) dengan Jumlah Penduduk

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Semakin tinggi persentase ini, semakin baik akses masyarakat terhadap air minum yang layak melalui jaringan perpipaan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan, mengurangi risiko terhadap penyakit yang terkait dengan air minum yang tidak aman, dan meningkatkan kualitas hidup

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah Jiwa yang Terlayani
Akses Air Minum Melalui Jaringan
Perpipaan (JP)

J2 = Jumlah Penduduk

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah Perbandingan antara Jumlah Jiwa yang Terlayani Akses Air Minum Melalui Jaringan Non Perpipaan/ Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dengan Jumlah penduduk

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Persentase ini memberikan informasi tentang sejauh mana penduduk dalam suatu daerah dapat memperoleh pasokan air minum melalui sumber alternatif, terutama di daerah yang tidak memiliki akses ke jaringan perpipaan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah Jiwa yang Terlayani
Akses Air Minum Melalui Jaringan
Non Perpipaan/ Bukan Jaringan
Perpipaan (BJP)

J2 = Jumlah Penduduk

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Idle Capacity

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Idle Capacity adalah Kapasitas air dari mata air yang sudah dimanfaatkan PDAM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Idle capacity menunjukkan kapasitas produksi air minum yang tidak digunakan atau belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini terjadi ketika kapasitas produksi air minum yang tersedia melebihi permintaan atau penggunaan aktual.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Air Baku yang dapat
Dimanfaatkan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data Rispam

Ukuran

Liter

Satuan

Litter/detik

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Potensi MA air yang belum dimanfaatkan PDAM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Potensi MA (Mata Air) air yang belum dimanfaatkan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah Jumlah sumber air yang tersedia namun belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Potensi MA air yang belum dimanfaatkan oleh PDAM mencerminkan adanya potensi sumber air yang belum dikembangkan atau dimanfaatkan sepenuhnya oleh PDAM.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Air Baku yang dapat
Dimanfaatkan di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

25 % dari potensi total

Ukuran

Debit

Satuan

Litter/detik

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Potensi Air Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Potensi Air Tanah adalah Jumlah dan kualitas air yang tersedia di dalam lapisan tanah yang dapat diakses dan dimanfaatkan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Potensi air tanah menunjukkan sejauh mana air tanah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air di suatu daerah. Potensi air tanah mencerminkan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan sumber air tanah yang dapat diambil dan dimanfaatkan oleh manusia.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Air Baku yang dapat Dimanfaatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Asumsi rata-rata per desa potensial
2 lt/dt

Ukuran

Debit

Satuan

Litter/detik

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Potensi SPAM Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Desa adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar cakupan layanan PDAM

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Potensi SPAM desa menunjukkan kemampuan desa untuk menyediakan pasokan air minum yang memadai bagi penduduknya. Dengan adanya potensi SPAM yang lebih tinggi, desa memiliki lebih banyak sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduknya. Ini berarti peningkatan akses bagi masyarakat desa untuk mendapatkan air minum yang aman dan berkualitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Potensi Air Baku yang dapat Dimanfaatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rata-rata 1lt/dt tiap desa

Ukuran

Debit

Satuan

Litter/detik

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional adalah Sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah dari beberapa wilayah atau daerah yang terhubung secara geografis

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Data mengenai jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Regional penting dalam memahami tingkat pengembangan dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dalam skala yang lebih luas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual (Pendataan ke Desa)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota adalah Sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah dari seluruh wilayah atau kota tertentu Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Data mengenai jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota penting dalam memahami tingkat ketersediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dalam skala yang besar di suatu kota.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual (Pendataan ke Desa)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan adalah Sistem yang dirancang untuk mengolah air limbah dari beberapa wilayah atau kawasan yang saling terhubung Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Data mengenai jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan penting dalam memahami tingkat pengembangan dan ketersediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dalam skala yang lebih besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual (Pendataan ke Desa)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Individual

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Pengolahan Air Limbah Individual adalah Pengolahan air limbah yang dilakukan secara sendiri-sendiri pada masing-masing rumah terhadap air limbah yang dihasilkan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Data mengenai jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Individual penting dalam memahami tingkat penyebaran dan penerapan praktik pengelolaan air limbah yang berkelanjutan di masyarakat. Jumlah sistem pengolahan air limbah individual dapat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pengolahan air limbah skala regional. Jika sistem pengolahan air limbah skala regional tidak tersedia atau akses ke jaringan tersebut terbatas, maka lebih banyak individu atau bangunan mungkin mengandalkan sistem pengolahan air limbah individual.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual (Pendataan ke Desa) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sistem Pengolahan Air Limbah Komunal adalah Sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sekelompok rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan, sesuai dengan baku mutu lingkungan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Jumlah sistem pengolahan air limbah komunal yang tinggi menunjukkan komitmen dan upaya dalam mengelola air limbah secara efektif dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sistem Pengolahan Air Limbah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual (Pendataan ke Desa)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni) adalah Perbandingan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dengan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak korban bencana yang berhasil mendapatkan rumah layak huni.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang

Periodesasi

Perumahan Rakyat (SPM)

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah unit rumah korban



bencana yang ditangani

J2 = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni adalah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa, Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

Interpretasi

Persentase ini mencerminkan sejauh mana program tersebut berhasil dalam memberikan solusi perumahan yang memadai bagi masyarakat yang terkena relokasi. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak penduduk yang mendapatkan manfaat dari program tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat (SPM)
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{R1 + R2 + R3}{J1}$$

Keterangan:

R1 = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

R2 = Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa

R3 = Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni

J1 = Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) yang Dimanfaatkan adalah Jumlah tanah eks bengkok yang dimanfaatkan masyarakat melalui proses lelang dan mekanisme sewa

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Jumlah luasan tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang dimanfaatkan mencerminkan seberapa besar area tanah eks bengkok yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau pihak lain. Semakin besar jumlah luasan tanah yang dimanfaatkan, semakin intensif penggunaan aset tanah oleh Pemda untuk berbagai program dan proyek.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Total Luasan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah eks bengkok adalah Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Interpretasi

Data ini menunjukkan jumlah luas keseluruhan tanah eks bengkok. Dengan luasan tanah yang lebih besar, Pemda memiliki potensi yang lebih besar untuk mengembangkan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Lebih banyak tanah yang tersedia dapat memberikan fleksibilitas dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang lebih luas dan komprehensif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Luas

Satuan

Ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan Pemanfaatan Tanah Milik Pemda (Eks Bengkok) adalah Perbandingan Jumlah luasan tanah eks bengkok yang dimanfaatkan dengan Jumlah total luasan tanah eks bengkok

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan
Cakupan pemanfaatan tanah milik pemda (eks bengkok) mencerminkan sejauh mana Pemda telah berhasil mengalihfungsikan atau memanfaatkan kembali tanah yang sebelumnya digunakan untuk tujuan lain. Hal ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi tanah yang dimiliki.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah tanah milik pemda (eks bengkok) yang dimanfaatkan

J2 = Jumlah total tanah milik pemda (eks bengkok)



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Jumlah Bidang Pengadaan Tanah yang Diselesaikan Pengadaannya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengadaan Tanah adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Jumlah bidang pengadaan tanah yang diselesaikan pengadaannya menunjukkan jumlah bidang tanah masyarakat yang telah selesai proses pengadaannya untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Apabila nilainya semakin mendekati jumlah rencana pengadaan tanah maka semakin besar kemungkinan bahwa tanah yang diperlukan untuk proyek atau kegiatan dapat tersedia.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

bidang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rencana Pengadaan Tanah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rencana Pengadaan Tanah adalah Rencana kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan
Semakin tinggi jumlah rencana pengadaan tanah, semakin besar kebutuhan akan tanah dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

bidang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Tepat Waktu adalah Perbandingan antara jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tepat waktu dengan jumlah rencana pengadaan tanah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah atau entitas terkait mampu memenuhi jadwal atau tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JBP}{JRP} \times 100\%$$

Keterangan:

JBP = Jumlah bidang pengadaan tanah yang diselesaikan pengadaannya



JRP = Jumlah rencana pengadaan tanah

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Ya

Diakses Umum



Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi adalah Perbandingan jumlah sengketa yang tertangani dengan jumlah rencana penanganan sengketa tanah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perumahan dan Permukiman Aspek Pertanahan

Interpretasi

Data mengenai persentase penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi penting dalam memahami keberhasilan dan penerimaan mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin efektif mediasi dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:



| | |
|-------------------------------------|---|
| Ukuran | J1 = Jumlah sengketa tanah yang tertangani |
| Satuan | J2 = Jumlah rencana penanganan sengketa tanah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Persentase |
| | % |
| | Ya |



Percentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan adalah Perbandingan jumlah ganti rugi dan santunan tanah yang tertangani dengan jumlah rencana ganti rugi dan santunan tanah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Percentase ini mencerminkan sejauh mana klaim ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan diselesaikan dan diberikan kepada pemilik tanah yang terdampak. Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin besar kemungkinan pemilik tanah menerima ganti rugi atau santunan yang memadai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tanah Milik Pemda di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah ganti rugi dan santunan tanah yang tertangani



J2 = Jumlah rencana ganti rugi dan
santunan tanah

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah eks bengkok adalah Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Data ini menunjukkan jumlah tanah eks bengkok yang bermasalah. Semakin tinggi jumlah kasus, semakin sering terjadi perselisihan yang melibatkan tanah eks bengkok.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Selesai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah eks bengkok adalah Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Data ini menunjukkan jumlah jumlah tanah eks bengkok pemda yang permasalahannya telah selesai ditangani. Semakin tinggi jumlah kasus yang selesai, semakin baik sistem penyelesaian sengketa dalam menangani masalah kepemilikan tanah eks bengkok.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Sengketa Tanah Eks Bengkok Belum Selesai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tanah eks bengkok adalah Barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Aspek Pertanahan

Data ini menunjukkan jumlah permasalahan tanah pemda yang permasalahannya belum selesai ditangani. Jika jumlah kasus sengketa tanah eks bengkok yang belum selesai cukup tinggi, dapat mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan atau penggunaan tanah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Jumlah Yayasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah yayasan, maka semakin besar potensi adanya sumbangan, dukungan, dan inisiatif dalam memajukan isu-isu sosial dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Yayasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Yayasan Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Yayasan sosial adalah panti sosial yang diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Semakin banyak jumlah yayasan sosial, semakin besar potensi untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan memberikan solusi bagi masalah sosial yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Yayasan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Karang Taruna (KT)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Karang Taruna (KT) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah karang taruna yang ada di suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan pengembangan komunitas. Semakin tinggi jumlah karang taruna, semakin besar potensi untuk pemuda terlibat dalam berbagai proyek atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga (LK3)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dengan adanya lebih banyak Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan layanan konsultasi dan dukungan terkait kesejahteraan keluarga. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan keluarga dan memberikan akses yang lebih luas bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum untuk mendapatkan layanan konsultasi dan dukungan terkait kesejahteraan keluarga.

Dengan lebih banyak LKS yang beroperasi, cakupan dan jangkauan layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan kemungkinan akan diperluas. Ini berarti lebih banyak orang yang dapat mendapatkan bantuan dan dukungan dari LKS.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | lembaga |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
LSM merupakan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membantu pemerintah.

Dengan lebih banyak pekerja sosial masyarakat, cakupan dan aksesibilitas layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan mungkin akan meningkat. Pekerja sosial masyarakat dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan program sosial yang diperlukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Jumlah Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta di tingkat kecamatan yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

TKSK merupakan relawan profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta.

Dengan kehadiran lebih banyak tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, cakupan pelayanan sosial dapat diperluas ke daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang sulit dijangkau sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Jumlah Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga. Dengan lebih banyak lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga memiliki akses yang lebih baik ke bantuan dan dukungan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Dunia Usaha

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dunia usaha adalah lembaga yang memfasilitasi usaha di bidang sosial
Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial

Dengan adanya dunia usaha masyarakat dapat memperoleh keuntungan dalam menyejahterakan kehidupannya, upaya pemerataan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

lembaga

Ya



Tagana (Taruna Siaga Bencana)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tagana (Taruna Siaga Bencana) adalah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial berbasiskan masyarakat

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Tagana mencakup beberapa makna dan tujuan antara lain pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam berbagai aspek bencana untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan termasuk pemahaman tentang jenis bencana tindakan-tindakan pencegahan. Penanganan darurat dan upaya pemulihan pasca bencana. Keterlibatan aktif menjadikan bagian dari sukarelawan menyebarkan informasi keamanan atau berpartisipasi dalam simulasi bencana dan juga terlibat dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat.

Jumlah anggota yang lebih banyak memungkinkan Tagana untuk mengerahkan tim di berbagai lokasi bencana secara bersamaan, memperluas cakupan bantuan mereka untuk membantu lebih banyak wilayah terdampak



■ DATA

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah | Potensi | Sumber |
| Periodesasi | Kesejahteraan | Sosial | (PSKS) di |
| | | | Kabupaten Purbalingga |
| | | Tahunan | |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Family Care Unit (FCU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Family Care Unit (FCU) adalah pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan. Keberadaan FCU ini dimaksudkan untuk membangun keterpaduan yang sinergis dalam pemberdayaan keluarga berbasis PSKS

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Beberapa hal yang mencakup FCU berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan emosional, perhatian bagi keluarga, keterlibatan aktif sesama anggota keluarga dan berguna untuk membangun hubungan yang erat dan saling peduli antara anggota keluarga untuk mempererat hubungan keluarga.

Dengan unit yang lebih banyak, Family Care Unit mungkin dapat menjangkau lebih banyak wilayah atau komunitas yang membutuhkan bantuan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | lembaga |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) adalah tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak), pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Dengan adanya SDM Sakti Peksos/Pekerja Sosial di lingkup daerah membantu dalam melaksanakan program-program khususnya perlindungan anak diantaranya pencegahan kasus-kasus di wilayah Purbalingga.
Peningkatan jumlah Sakti Peksos dapat memungkinkan diversifikasi dalam jenis layanan sosial yang disediakan, seperti bantuan kesehatan, bantuan pangan, dukungan psikososial, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Pekerja Sosial Profesional/ Fungsional

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja Sosial profesional/ fungsional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dengan adanya pekerja sosial profesional dimana dapat membantu program pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan PPKS dan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Yang kemudian keberadaan Pekerja Sosial tersebut memberikan kontribusi untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan responsif.

Dengan lebih banyak pekerja sosial, masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial akan mendapatkan akses lebih mudah ke layanan sosial yang berkualitas. Lebih banyak pekerja sosial berarti lebih banyak kapasitas untuk memberikan



dukungan, bimbingan, dan layanan kesejahteraan sosial.

■ DATA

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Data yang Dikumpulkan | Jumlah | Potensi | Sumber |
| Periodesasi | Kesejahteraan | Sosial | (PSKS) di |
| | Sosial | | Kabupaten Purbalingga |
| | | Tahunan | |

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Penyuluhan Sosial Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyuluhan Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial

Dengan adanya penyuluhan sosial masyarakat mempunyai peran penting dalam mengatasi sosial dengan berbagai pendekatan secara holistik, empati dan komitmen. Mereka berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif berdaya dan berkelanjutan. Peningkatan jumlahnya dapat menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan pendidikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pelopor Perdamaian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pelopor perdamaian adalah relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan konflik sosial

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Adanya pelopor perdamaian memiliki peran penting dalam mendorong perdamaian rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik di tingkat wilayah masing-masing Kabupaten/Kota. Mereka tentunya merupakan advokat perdamaian yang berusaha menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi masyarakat yang terpengaruh oleh konflik dan ketegangan.

Peningkatan jumlah pelopor perdamaian juga dapat mengindikasikan bahwa banyak orang yang merespons konflik, kekerasan, atau krisis dengan berupaya mempromosikan dialog, rekonsiliasi, dan upaya perdamaian lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



SDM PKH (Program Keluarga Harapan)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SDM PKH (Program Keluarga Harapan) adalah tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

PKH dalam peranannya melaksanakan tugas sebagai pendamping keluarga harapan, tentunya tugas mereka berkaitan dengan pendampingan dan dukungan, penilaian dan pemantauan, pemberdayaan dan pelatihan, koordinasi dengan lembaga lain, serta kepedulian dan empati. Dengan adanya dukungan dan pendampingan yang tepat diharapkan keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mengatasi tantangan kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Penambahan SDM PKH bisa mengindikasikan peningkatan perhatian pemerintah atau organisasi terhadap kesejahteraan keluarga yang kurang mampu dan rentan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

PKH dalam peranannya melaksanakan tugas sebagai pendamping keluarga harapan, tentunya tugas mereka berkaitan dengan pendampingan dan dukungan, penilaian dan pemantauan, pemberdayaan dan pelatihan, koordinasi dengan lembaga lain, serta kepedulian dan empati. Dengan adanya dukungan dan pendampingan yang tepat diharapkan keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mengatasi tantangan kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah

Potensi

Sumber



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Populasi PSKS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Populasi PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Populasi yang besar dapat menciptakan jaringan sosial yang luas dan beragam. Jaringan ini dapat membantu dalam hal berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan dukungan antar individu atau kelompok, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PSKS Peserta Penguatan Kapasitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PSKS peserta penguatan kapasitas adalah PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas bagian Sumber Daya Manusia

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Dengan meningkatnya jumlah peserta program penguatan kapasitas, potensi sumber daya manusia yang ada juga bertambah. Sebagai akibatnya, potensi sumbangan kesejahteraan sosial dari para peserta juga meningkat. Program ini dapat menciptakan efek jangka panjang dengan menciptakan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berpengetahuan tinggi dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase PSKS Peserta Penguatan Kapasitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase PSKS peserta penguatan kapasitas adalah perbandingan jumlah PSKS peserta penguatan kapasitas dengan populasi PSKS

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jika persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial peserta penguatan kapasitas semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa peserta memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan dukungan sosial yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dukungan sosial seperti mentor, bimbingan, dukungan finansial, jaringan sosial, dan kesempatan akses akan memainkan peran penting dalam membantu peserta mengatasi tantangan, memperluas peluang, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam program penguatan kapasitas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Keluarga Prasejahtera

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga prasejahtera adalah keluarga belum memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Jika lebih banyak keluarga berada dalam kondisi prasejahtera, hal ini dapat menandakan adanya masalah sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan mengambil langkah-langkah untuk membantu keluarga tersebut keluar dari kondisi prasejahtera

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Keluarga Sejahtera Tahap 1

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah keluarga yang memiliki ciri ciri tertentu dan dikategorikan menjadi Keluarga Sejahtera Tahap 1

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

- Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
1. Anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
 3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
 4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Keluarga Sejahtera Tahap 2

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga Sejahtera Tahap 2 adalah keluarga yang memiliki ciri ciri tertentu dan dikategorikan menjadi Keluarga Sejahtera Tahap 2

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih



menggunakan alat/obat
kontrasepsi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat
Kesejahteraan di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Keluarga Sejahtera Tahap 3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga Sejahtera Tahap 3 adalah keluarga yang memiliki ciri ciri tertentu dan dikategorikan menjadi Keluarga Sejahtera Tahap 3

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KK |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus adalah keluarga yang memiliki ciri ciri tertentu dan dikategorikan menjadi Keluarga Sejahtera Tahap 3 plus

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri adalah KPM yang keluar dari kepesertaan program PKH

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Keluarga penerima manfaat merasakan dirinya sudah mampu sehingga timbul niat pada dirinya sendiri untuk mengundurkan diri dari Penerimaan Bantuan PKH.

Peningkatan jumlah KPM yang berhasil mengikuti program dan berhasil keluar dari status penerima manfaat menunjukkan efektivitas program Graduasi Sejahtera Mandiri dalam membantu keluarga miskin mencapai kemandirian ekonomi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Total KPM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Jumlah total KPM adalah jumlah total keluarga peserta program PKH

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Sekumpulan KPM yang merasakan manfaat dari Program PKH.

Semakin banyak keluarga penerima manfaat berarti lebih banyak keluarga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di wilayah atau negara tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

KK

Ya



Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri adalah perbandingan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri dengan jumlah total KPM

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Dengan adanya PKH keluarga penerima manfaat telah menerima kondisi ekonomi yang lebih baik dan mandiri. Sehingga mereka berhasil memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga mereka serta meningkatkan kualitas hidup.

Semakin banyak keluarga yang berhasil keluar dari status penerima manfaat menunjukkan bahwa program tersebut telah membantu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Keluarga penerima manfaat dapat mengembangkan usaha mikro, keterampilan, dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada bantuan sosial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKGSM}{JKPT} \times 100\%$$

Keterangan:

JKGSM = Jumlah KPM Graduasi

Sejahtera Mandiri

JKPT = Jumlah PKH Total

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah orang masuk di dalam DTKS

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan seberapa besar kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial untuk mencapai kesejahteraan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Balita Terlantar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balita terlantar adalah balita yang membutuhkan pengasuhan orang tua dengan baik secara jasmani, rohani dan sosial

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Mengidentifikasi jumlah balita terlantar penting dalam rangka merespon dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi tersebut. Ini melibatkan upaya untuk melacak, mendaftar, dan memberikan perhatian khusus kepada balita terlantar, dengan tujuan untuk menyediakan perlindungan, perawatan, dan kesempatan yang memadai bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Terlantar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak terlantar adalah anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Mengidentifikasi jumlah anak terlantar penting dalam rangka merespon dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi tersebut. Hal ini melibatkan upaya untuk melacak, mendaftar, dan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak terlantar, dengan tujuan untuk menyediakan perlindungan, perawatan, dan kesempatan yang memadai bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual



| | |
|--------------------------------|--------|
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak yang mengalami masalah Hukum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak yang mengalami masalah hukum adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum, menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a

Interpretasi

Aspek Sosial

Jumlah anak yang mengalami masalah hukum dapat memberikan indikasi tentang tingkat kejahatan anak, faktor risiko yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam perilaku melanggar hukum, atau kekurangan dalam sistem perlindungan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Jalanan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan sebagian besar di jalanan untuk mencari nafkah.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah anak jalanan dapat memberikan gambaran tentang tingkat masalah anak jalanan di suatu wilayah.

Peningkatan jumlah PPKS anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dapat berarti peningkatan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan mereka. Mereka dapat mendapatkan akses ke perlindungan dari eksplorasi, kekerasan, dan penyalahgunaan serta mendapatkan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak dengan Kedisabilitasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak dengan kedisabilitasan adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental yang dapat mengganggu aktivitas lainnya.

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Penting untuk mengidentifikasi jumlah anak dengan kedisabilitasan dan memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Ini dapat membantu dalam perencanaan dan penyediaan layanan yang sesuai, termasuk layanan kesehatan, pendidikan inklusif, terapi rehabilitasi, dukungan psikososial, dan aksesibilitas fisik dan lingkungan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak menjadi Tindak Kekerasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak menjadi tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan kurang baik serta mengalami tindak kekerasan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Penting untuk mengidentifikasi jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dan memahami penyebab, konsekuensi, serta dampaknya terhadap anak-anak. Hal ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan, program intervensi, dan langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, memberikan dukungan psikososial, rehabilitasi, serta memperkuat sistem perlindungan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak membutuhkan Perlindungan Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak membutuhkan perlindungan khusus adalah jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus dapat memberikan panduan untuk merancang kebijakan dan program yang menyediakan perlindungan, pemenuhan hak, rehabilitasi, dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok anak.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a

Interpretasi

Aspek Sosial

Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lanjut Usia Terlantar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Dengan memperhatikan jumlah lanjut usia terlantar, dapat dilakukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi di masa tua. Peningkatan jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat serta pemerintah terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh kelompok lansia terlantar. Hal ini dapat mendorong upaya lebih lanjut untuk meningkatkan program dan layanan kesejahteraan sosial

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Angka ini dapat memberikan informasi tentang jumlah orang yang membutuhkan aksesibilitas fisik, layanan kesehatan yang memadai, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, dukungan sosial, dan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Dengan lebih banyak PPKS Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan, diharapkan akses mereka ke layanan kesejahteraan sosial yang sesuai akan meningkat. Ini mencakup pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pendidikan inklusif, bantuan ekonomi, dan berbagai program dukungan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tuna Susila

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dengan adanya populasi tersebut tuna susila berhadapan dengan resiko kesehatan dan keamanan yang tinggi seperti penyakit menular seksual, kekerasan dari klien ataupun pelanggan atau eksplorasi dari pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan mereka. Sering juga mereka mengalami diskriminasi dan stigma dari masyarakat. Sehingga perlu memberikan perlindungan dan dukungan bagi mereka termasuk akses kesehatan dukungan sosial dan hak lainnya.

Dengan lebih banyak PPKS Tuna Susila, akan ada peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesejahteraan sosial yang mendukung mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan ini dapat mencakup aksesibilitas, perawatan kesehatan, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

Orang

Ya



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gelandangan adalah seseorang yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tidak memiliki tempat tinggal

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Dengan adanya mereka ternyata mereka harus menghadapi kehidupan tanpa tempat yang tetap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, isu kesehatan dan kesejahteraan, stigma dan diskriminasi. Maka mereka membutuhkan peran-peran dari organisasi non pemerintah, pemerintah, masyarakat atau pihak-pihak lainnya. Seperti misalnya berkaitan dengan layanan kesehatan, makanan tempat tinggal atau bahkan pelatihan untuk mencari pekerjaan. Mereka juga memerlukan kebutuhan bantuan yang terintegrasi yaitu yang mencakup aspek kehidupan seperti kesehatan, pekerjaan dan dukungan sosial. Yang tentunya diperlukan pendekatan holistik dan terorganisasi dalam peningkatan stabilitas kemandirian.

Dengan lebih banyak PPKS Penyandang Disabilitas, potensi akses mereka ke fasilitas dan program kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat ditingkatkan. Ini mencakup



layanan rehabilitasi, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan dukungan lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pengemis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengemis adalah seseorang yang memiliki kekurangan dengan meminta di tempat umum

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dengan adanya mereka ternyata mereka harus menghadapi kehidupan tanpa tempat yang tetap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, isu kesehatan dan kesejahteraan, stigma dan diskriminasi. Maka mereka membutuhkan peran-peran dari organisasi non pemerintah, pemerintah, masyarakat atau pihak-pihak lainnya. Seperti misalnya berkaitan dengan layanan kesehatan, makanan tempat tinggal atau bahkan pelatihan untuk mencari pekerjaan. Mereka juga memerlukan kebutuhan bantuan yang terintegrasi yaitu yang mencakup aspek kehidupan seperti kesehatan, pekerjaan dan dukungan sosial. Yang tentunya diperlukan pendekatan holistik dan terorganisasi dalam peningkatan stabilitas kemandirian.

Peningkatan jumlah PPKS Pengemis dapat mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) di Kabupaten
Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

Orang

Ya



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pemulung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemulung adalah seseorang yang mencari rezeki dengan cara memungut, mengambil sampah untuk dijual kepada pengepul

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Dengan adanya mereka ternyata mereka harus menghadapi kehidupan tanpa tempat yang tetap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, isu kesehatan dan kesejahteraan, stigma dan diskriminasi. Maka mereka membutuhkan peran-peran dari organisasi non pemerintah, pemerintah, masyarakat atau pihak-pihak lainnya. Seperti misalnya berkaitan dengan layanan kesehatan, makanan tempat tinggal atau bahkan pelatihan untuk mencari pekerjaan. Mereka juga memerlukan kebutuhan bantuan yang terintegrasi yaitu yang mencakup aspek kehidupan seperti kesehatan, pekerjaan dan dukungan sosial. Yang tentunya diperlukan pendekatan holistik dan terorganisasi dalam peningkatan stabilitas kemandirian.

Peningkatan jumlah PPKS Pengemis dapat mencerminkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.

Peningkatan jumlah PPKS untuk pemulung menunjukkan bahwa



masyarakat dan pemerintah semakin menyadari tantangan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemulung. Ini bisa termasuk kondisi kerja yang berbahaya, rendahnya tingkat pendapatan, dan minimnya akses ke layanan dasar.

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kelompok Minoritas / Waria

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kelompok minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dengan adanya mereka ternyata mereka harus menghadapi kehidupan tanpa tempat yang tetap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, isu kesehatan dan kesejahteraan, stigma dan diskriminasi. Maka mereka membutuhkan peran-peran dari organisasi non pemerintah, pemerintah, masyarakat atau pihak-pihak lainnya. Seperti misalnya berkaitan dengan layanan kesehatan, makanan tempat tinggal atau bahkan pelatihan untuk mencari pekerjaan. Mereka juga memerlukan kebutuhan bantuan yang terintegrasi yaitu yang mencakup aspek kehidupan seperti kesehatan, pekerjaan dan dukungan sosial. Yang tentunya diperlukan pendekatan holistik dan terorganisasi dalam peningkatan stabilitas kemandirian.

Semakin banyak kelompok ini



menunjukkan diri dalam ruang publik, artinya semakin banyak orang yang berani untuk bersuara dan melawan diskriminasi serta mencari kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Adanya PPKS BWLP mereka harus menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat, mereka juga harus menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerja, karena seringkali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena stigma sosial dan catatan kriminal mereka. Adanya dukungan dalam reintegrasi dibutuhkan oleh BWPLP seperti program rehabilitasi, pelatihan kerja dan layanan sosial yang tepat dalam membantu mereka untuk memperoleh keterampilan dan dukungan. Hal itu tentunya berkaitan dengan pemenuhan hak yang harus tetap dihormati dan terus dilindungi seperti dalam mendapatkan kesempatan dalam



mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan atau kesempatan lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Adanya stigma dan diskriminasi yang harus dihadapi mereka perlu diadakannya sosialisasi berkaitan dengan HIV/AIDS yang berkaitan dengan edukasi pencegahan, pengobatan yang tepat dan dukungan sosial yang memadai untuk mengurangi dampak HIV dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka dengan kondisi tersebut maupun yang tidak terinfeksi. Semakin banyak pemerlu pelayanan menunjukan bahwa mereka membutuhkan dukungan dan perhatian yang lebih untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Penyalahgunaan Napza

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepenuhnya sepengetahuan dokter yang berwenang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial

Adanya penyalahgunaan napza di kalangan masyarakat di berbagai tingkat usia sangat diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi dari penggunaan zat adiktif dan memunculkan penggiat anti narkoba dalam upaya pencegahan dan penanganan yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah penggunaan zat tersebut. Hal-hal tersebut tentunya untuk membantu individu menghindari atau mengatasi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan mereka.

Kenaikan permintaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba tidak lagi dapat diatasi dengan cara sederhana. Tuntutan yang semakin kompleks dalam mengatasi permasalahan ini menandakan bahwa diperlukan



dukungan sosial yang lebih besar, termasuk berbagai program rehabilitasi, terapi, dukungan psikososial, serta upaya-upaya pencegahan dan edukasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

Orang

Ya



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Trafficking

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban *trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Adanya isu-isu korban *trafficking* perlunya membantu mereka untuk melindunginya kemudian mengurangi perdagangan manusia secara tegas. Diperlukannya masyarakat pemerintah maupun non pemerintah dengan secara keseluruhan saling bersatu padu untuk mencegah *trafficking*. Memberikan dukungan mereka dan menegakkan hukum untuk mengakhiri kejahatan ini.

Peningkatan jumlah korban yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa perdagangan orang masih merupakan masalah yang signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum belum efektif dalam mengatasi akar permasalahan *trafficking*.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan



Periodesasi

Sosial (PPKS) di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Tindak Kekerasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang menjadi korban tindak kekerasan

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Adanya korban tindak kekerasan harus menekankan pada pentingnya dukungan bagi mereka serta perlu adanya mengatasi akar penyebab tindak kekerasan tersebut.

Semakin banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk korban *trafficking* menunjukkan bahwa fenomena *trafficking* masih berlangsung dan dampaknya signifikan bagi banyak individu yang menjadi korban.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja migran bermasalah adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a

Interpretasi

Aspek Sosial

Semakin banyak jumlah pekerja migran bermasalah yang memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan adanya beberapa permasalahan dan tantangan dalam migrasi pekerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana Alam

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Semakin banyak jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana alam menunjukkan bahwa dampak dari bencana alam meningkat, dan lebih banyak orang membutuhkan dukungan dan bantuan untuk pulih dari kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Semakin banyak jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana sosial menunjukkan bahwa dampak dari bencana sosial meningkat, dan lebih banyak orang membutuhkan dukungan dan bantuan untuk menghadapi krisis atau situasi sulit yang berkaitan dengan aspek sosial.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Peningkatan permintaan akan pelayanan kesejahteraan sosial menandakan bahwa perempuan dalam kelompok rawan sosial ekonomi menghadapi masalah yang kompleks dan memerlukan bantuan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan yang diberikan dapat mencakup program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses ke layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan upaya-upaya untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Peningkatan permintaan akan pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi masalah yang mendalam dan kompleks di masyarakat. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses ke pendidikan dan pekerjaan, serta tantangan sosial lainnya berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Peningkatan permintaan untuk pelayanan kesejahteraan sosial menandakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga bermasalah sosial psikologis semakin kompleks dan mungkin tidak dapat diatasi secara mandiri. Dalam beberapa kasus, masalah sosial dan psikologis ini saling terkait dan dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah
Orang
Ya



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Komoditas Adat Terpencil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Komoditas adat terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Dalam upaya memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada komunitas adat terpencil, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat ini. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai budaya mereka dan melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan akan lebih efektif dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan dan memastikan kemandirian serta keberlanjutan kelompok tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual



| | |
|--------------------------------|--------|
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Total PPKS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PPKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Semakin banyak jumlah total PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial) menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial semakin meningkat. Ini dapat menunjukkan perluasan cakupan program pelayanan sosial oleh pemerintah atau meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah PPKS yang mendapatkan program pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PPKS adalah perseorangan/keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Peningkatan jumlah PPKS yang mendapatkan program pemerintah menandakan bahwa pemerintah sedang melakukan upaya yang lebih luas dan efektif dalam menyediakan dukungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Hal ini bisa mencakup upaya untuk meningkatkan cakupan program sosial, menjangkau lebih banyak penerima yang berhak, serta memperbaiki pelaksanaan dan distribusi manfaat dari program-program tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah adalah perbandingan jumlah PPKS yang mendapatkan program pemerintah dengan jumlah total PPKS

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Semakin banyak cakupan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan program pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan dan memperluas jangkauan program-program kesejahteraan sosial untuk mencakup lebih banyak penerima yang berhak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{PPP}{JTP} \times 100\%$$

Keterangan:

PPP = PPKS yang mendapat program pemerintah

JTP = Jumlah total PPKS

Ukuran

Jumlah

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Panti Asuhan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Data jumlah panti asuhan dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi sosial dalam merencanakan kebijakan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak. Informasi ini dapat membantu dalam menentukan alokasi sumber daya, perencanaan program pendukung, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang terlantar.

Semakin banyak jumlah panti asuhan



menunjukkan bahwa jumlah anak atau anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan di luar lingkungan keluarga biologis meningkat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Panti sosial asuhan anak adalah jumlah panti sosial asuhan anak mengacu pada total atau keseluruhan jumlah lembaga atau institusi yang menyediakan tempat tinggal, perawatan, dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Panti sosial asuhan anak ini menjadi tempat tinggal sementara atau tetap bagi anak-anak yang menghadapi situasi sulit atau tidak aman di lingkungan keluarga mereka sendiri.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Semakin banyak jumlah panti sosial asuhan anak menunjukkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal, perawatan, dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan semakin meningkat. Hal ini juga bisa menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang tidak memiliki perawatan yang memadai di lingkungan keluarga mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Penghuni Panti Sosial Asuhan Anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penghuni panti sosial asuhan anak adalah anak-anak yang tinggal dan mendapatkan perlindungan serta perawatan di panti sosial asuhan anak.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Jumlah penghuni panti sosial asuhan anak merupakan data yang memberikan gambaran tentang jumlah anak yang tinggal dan mendapatkan perawatan di panti sosial tersebut.

Peningkatan jumlah penghuni panti sosial asuhan anak menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang lebih besar untuk menyediakan perawatan dan dukungan kepada anak-anak yang rentan dan membutuhkan perlindungan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pekerja Sosial Profesional Panti Sosial Asuhan Anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja sosial profesional panti sosial asuhan anak adalah seseorang yang bekerja di Panti Sosial Asuhan Anak yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah pekerja panti sosial asuhan anak menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang tersedia untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan dukungan kepada anak-anak yang tinggal di panti.

Semakin banyak jumlah pekerja sosial profesional di panti sosial asuhan anak menunjukkan bahwa panti sosial ini telah mengalami peningkatan dalam sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada anak-anak yang tinggal di panti tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan



Periodesasi

Sosial (PPKS) di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuhan Anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuhan Anak adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja di Panti Sosial Asuhan Anak yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Semakin banyak Jumlah tenaga kesejahteraan sosial panti sosial asuhan anak menunjukkan seberapa banyak profesional kesejahteraan sosial yang tersedia untuk bekerja di panti tersebut

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rumah Singgah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah singgah adalah tempat perlindungan/rehabilitasi bagi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin saja akan menimpa anak jalanan dari berbagai kekerasan perilaku yang berupa penyimpangan seksual atau berupa kekerasan fisik lainnya dengan tujuan mengembalikan dan menanamkan fungsi dari otak anak sehingga anak akan lebih baik pada pola pikir dan juga dalam bertingkah laku di sosial masyarakat

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Jumlah rumah singgah yang tersedia mencerminkan kapasitas penanganan dan perlindungan bagi anak jalanan dalam wilayah tersebut.

Jika semakin banyak jumlah rumah singgah menunjukkan, artinya ada peningkatan dalam ketersediaan rumah singgah atau tempat peristirahatan sementara bagi mereka yang membutuhkan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah rumah singgah yang ada |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Penghuni Rumah Singgah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penghuni rumah singgah adalah anak jalanan atau individu yang tinggal atau mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi di rumah singgah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah penghuni rumah singgah menggambarkan tingkat kebutuhan dan permintaan akan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak jalanan atau individu yang tinggal di rumah singgah. Jika rumah singgah tersebut awalnya memiliki sedikit penghuni dan kini jumlahnya semakin banyak, maka interpretasinya adalah jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut meningkat dari sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti permintaan yang lebih tinggi untuk akomodasi sementara atau pertumbuhan populasi di wilayah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran

Jumlah penghuni rumah singgah
Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pekerja Sosial Profesional Rumah Singgah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja sosial profesional rumah singgah adalah pekerja sosial yang ditugaskan oleh Kemensos sesuai dengan SK Penempatan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah pekerja sosial profesional rumah singgah menggambarkan tingkat keberdayaan dan kapasitas layanan yang diberikan di rumah singgah.

Dengan meningkatnya jumlah pekerja sosial profesional, rumah singgah mungkin ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penghuni. Lebih banyak pekerja sosial dapat membantu memperhatikan kebutuhan individu dengan lebih baik dan memberikan perhatian yang lebih personal kepada setiap penghuni.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

SK Kemensos

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Rumah Singgah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga kesejahteraan sosial rumah singgah adalah petugas sosial yang ditugaskan oleh kecamatan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial rumah singgah menggambarkan tingkat dukungan dan pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada penghuni rumah singgah.

Dengan lebih banyak tenaga kesejahteraan sosial yang bekerja, rumah singgah mungkin berusaha untuk memberikan lebih banyak perhatian dan dukungan kepada para penghuninya. Tenaga kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebutuhan sosial, emosional, dan fisik dari penghuni terpenuhi dengan baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

SK Kepala Dinas

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa pada Negara Republik Indonesia

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Taman makam pahlawan merupakan simbol penting yang mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai dan semangat patriotisme yang menjadi dasar pembentukan negara.

Peningkatan jumlah Taman Makam Pahlawan menunjukkan penghargaan yang lebih besar terhadap pahlawan atau pahlawan-pahlawan yang telah berjasa dalam sejarah, perperangan, atau perjuangan penting bagi suatu negara atau komunitas. Taman Makam Pahlawan sering menjadi tempat peringatan dan penghormatan untuk mengenang jasa dan pengorbanan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Taman Makam Pahlawan (TMP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah luas lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa pada Negara Republik Indonesia

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Sosial
Taman makam pahlawan merupakan simbol penting yang mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai dan semangat patriotisme yang menjadi dasar pembentukan negara. Penting untuk diingat bahwa interpretasi yang tepat memerlukan konteks lebih lanjut dan informasi tambahan tentang alasan di balik peningkatan luas Taman Makam Pahlawan tersebut. Luasnya sebuah Taman Makam Pahlawan dapat menjadi cermin dari penghormatan dan apresiasi masyarakat terhadap pahlawan dan warisan sejarah mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah dan Luas Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Luas digunakan pada Taman



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Makam Pahlawan

Luas
ha

Ya



Partisipasi warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti adalah Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Partisipasi warga negara penyandang disabilitas dalam rehabilitasi sosial di luar panti adalah indikator positif dalam mencapai inklusi sosial, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup bagi mereka. Semakin tinggi persentase mencerminkan komitmen masyarakat dan pemerintah dalam memberikan akses yang setara dan kesempatan yang adil bagi semua individu juga semakin tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:



J1 = Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

J2 = Populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Partisipasi jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti adalah anak terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Semakin tinggi partisipasi jumlah anak terlantar dalam rehabilitasi sosial di luar panti mencerminkan komitmen dan upaya untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pembangunan bagi anak-anak yang membutuhkan juga semakin tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

J2 = Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Partisipasi warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti adalah lanjut usia terlantar yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Sosial

Partisipasi warga negara lanjut usia terlantar dalam rehabilitasi sosial di luar panti menunjukkan komitmen untuk memberikan perhatian, perawatan, dan dukungan yang pantas bagi kelompok yang rentan tersebut.

Kenaikan partisipasi menunjukkan bahwa kesadaran tentang masalah lanjut usia terlantar semakin meningkat di kalangan masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Masalah ini tidak lagi diabaikan, dan upaya dilakukan untuk menangani situasi lanjut usia terlantar dengan lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

J2 = Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Partisipasi warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti adalah gelandangan dan pengemis yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Semakin tinggi persentase, maka semakin baik program rehabilitasi sosial dalam memberikan dukungan dan peluang bagi gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah gelandangan dan pengemis yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

J2 = Populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial adalah korban bencana alam dan sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Unit Penyelenggara

Dinsosdaldukkbp3a

Kelompok Indikator

Aspek Sosial

Interpretasi

Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial menggambarkan sejauh mana pemerintah dan lembaga terkait memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada mereka yang terdampak bencana. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin baik pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada warga negara yang menjadi korban bencana.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

J2 = Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Keterlibatan Perempuan di Parlemen/ Lembaga Politik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perempuan di parlemen adalah perempuan yang menjadi anggota DPRD II

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah keterlibatan perempuan di parlemen dan lembaga politik menggambarkan tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini mencerminkan semakin besar perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk terlibat dalam politik serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keterlibatan Perempuan dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Lembaga politik (DPRD) Jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Keterlibatan Perempuan di Lembaga Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perempuan di lembaga swasta adalah perempuan yang bekerja di perusahaan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah perempuan yang terlibat di lembaga swasta dapat mencerminkan tingkat kesetaraan gender dalam dunia kerja dan sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam mendapatkan pekerjaan, kenaikan jabatan, dan akses terhadap peluang karir.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keterlibatan Perempuan dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Swasta (Perusahaan) Jumlah Perempuan yang bekerja di perusahaan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perempuan di lembaga pemerintahan adalah perempuan yang bekerja sebagai ASN

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah menggambarkan tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan. Semakin banyak jumlah perempuan yang bekerja sebagai ASN menunjukkan semakin besar tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keterlibatan Perempuan dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pemda (OPD, Kecamatan)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pemberdayaan Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Bawa semakin banyak jumlah pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah lebih sadar akan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Jumlah pemberdayaan perempuan menggambarkan tingkat upaya dan hasil yang telah dicapai dalam mendorong perempuan untuk memiliki akses, kesempatan, dan kontrol atas sumber daya, keputusan, dan ruang lingkup kehidupan mereka.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemberdayaan perempuan bidang politik adalah perempuan yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik mencerminkan tingkat partisipasi dan minat perempuan dalam memahami dan terlibat dalam proses politik.

Semakin banyak jumlah pemberdayaan perempuan di bidang politik menunjukkan bahwa masyarakat sedang berupaya mencapai kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perangkat Daerah yang Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perangkat daerah yang sudah menerapkan PUG adalah perangkat daerah yang sudah menyusun GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah perangkat daerah yang sudah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) menggambarkan sejauh mana komitmen dan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa aspek gender diperhatikan dan diintegrasikan dalam kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat daerah. Semakin banyak perangkat daerah yang menerapkan PUG menunjukkan bahwa kesadaran tentang isu-isu gender semakin meningkat di kalangan pemerintah. Hal ini mencerminkan pemahaman tentang pentingnya memahami perbedaan gender dan mengidentifikasi ketimpangan yang mungkin terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Pemberdayaan Perempuan
di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Perangkat daerah yang sudah menyusun GAP dan GBS |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan perangkat daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah perbandingan jumlah OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) dengan jumlah total OPD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin tinggi cakupan perangkat daerah yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG), maka semakin baik upaya untuk memastikan kebijakan dan anggaran publik memperhatikan kesetaraan gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)

J2 = Jumlah Total OPD

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban kasus kekerasan terhadap perempuan adalah perempuan korban kekerasan yang melapor ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Harapan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dapat memberikan gambaran tentang tingkat kejadian dan prevalensi kasus kekerasan tersebut di suatu wilayah.

Meskipun peningkatan jumlah laporan pengaduan adalah langkah positif dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dewasa, perlu diingat bahwa masih banyak faktor yang dapat mencegah korban melaporkan kekerasan, termasuk stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik dan terpadu dari berbagai pihak untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dewasa, termasuk penguatan sistem hukum, kampanye kesadaran yang lebih luas, dukungan masyarakat, dan upaya mencegah terjadinya kekerasan sejak dini.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah Perempuan korban kekerasan yang melapor ke PPT Harapan

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban kasus terhadap perempuan yang ditindaklanjuti adalah perempuan korban kekerasan yang aduannya ditindaklanjuti

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang ditindaklanjuti dapat memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut.

Semakin banyak laporan yang ditindaklanjuti dapat menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dari lembaga penegak hukum dan pihak berwenang dalam merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Respons yang lebih baik dan lebih cepat dapat memberikan rasa percaya dan keamanan bagi korban untuk melaporkan kasus dan menghadapi proses hukum.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke PPT Harapan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dapat memberikan gambaran tentang tingkat kejadian dan prevalensi kekerasan terhadap anak dalam suatu wilayah.

Adanya peningkatan jumlah laporan pengaduan dapat mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya melawan kekerasan terhadap anak-anak. Pendidikan dan kampanye yang lebih intensif tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran ini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah anak korban kekerasan yang melapor ke PPT Harapan



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti adalah anak korban kekerasan yang yang pengaduannya ditindaklanjuti

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti dapat memberikan gambaran tentang efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Peningkatan jumlah laporan yang ditindaklanjuti menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perlindungan anak. Lebih banyak kasus yang ditindaklanjuti dapat berarti lebih banyak anak yang mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan setelah mengalami kekerasan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Total Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah jumlah Pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Total jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan mencakup jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Peningkatan jumlah laporan pengaduan menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan. Mungkin ada upaya lebih lanjut untuk menyosialisasikan hak-hak korban dan meyakinkan orang-orang bahwa melaporkan kasus kekerasan adalah langkah yang benar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa + Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Total Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan yang ditindaklanjuti

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan anak dan perempuan yang ditindaklanjuti adalah Jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditindaklanjuti

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Total jumlah laporan pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti mencakup jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditindaklanjuti. Peningkatan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dapat menunjukkan adanya respons yang lebih baik terhadap korban kekerasan. Lembaga penegak hukum dan pihak berwenang mungkin lebih siap untuk merespons dan menghadapi kasus kekerasan dengan serius, memberikan bantuan dan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa+Anak yang ditindaklanjuti |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Cakupan Korban Kekerasan Perempuan yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif adalah perbandingan jumlah korban kekerasan yang tertangani dengan jumlah korban kekerasan yang terlapor

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jika cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif tinggi, maka dapat menunjukkan adanya sistem yang efektif dan responsif dalam menyediakan dukungan bagi korban

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKKT}{JKKM} \times 100\%$$

Keterangan:

JKKT = Jumlah korban kekerasan yang tertangani

JKKM = Jumlah korban kekerasan yang melapor



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Cakupan Korban Kekerasan Anak yang Memperoleh Pelayanan Komprehensif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif adalah perbandingan jumlah korban kekerasan yang tertangani dengan jumlah korban kekerasan yang terlapor

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jika cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif tinggi, ini dapat menunjukkan adanya sistem yang efektif dan responsif dalam melindungi dan mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKKT}{JKKM} \times 100\%$$

Keterangan:

JKKT = Jumlah korban kekerasan yang tertangani

JKKM = Jumlah korban kekerasan yang melapor



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Jumlah desa/kelurahan layak anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa/kelurahan layak anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jika jumlah desa/kelurahan yang layak anak tinggi, maka menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang kuat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak di tingkat daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Capaian Pemenuhan Hak Anak
Berdasarkan Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA) di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah desa/kelurahan layak anak yang telah dibentuk dengan disahkan menggunakan SK DEKELA |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | desa/kel |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
|-------------------------------------|----|



Cakupan desa/kelurahan layak anak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Cakupan desa/kelurahan layak anak adalah perbandingan jumlah desa/kelurahan layak anak dengan jumlah desa/kelurahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jika cakupan desa/kelurahan layak anak tinggi, maka menunjukkan bahwa sebagian besar atau mayoritas desa atau kelurahan di wilayah tersebut telah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JDKLA}{JDK} \times 100\%$$

Keterangan:



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ukuran | JDKLA = Jumlah desa/kelurahan |
| Satuan | layak anak |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | JDK = Jumlah desa/kelurahan |
| | Persentase |
| | % |
| | Ya |



Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Predikat Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah konversi dari nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)
2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)
3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)
4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)
5. KLA (nilai 901-1000)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Capaian Pemenuhan Hak Anak
Berdasarkan Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA) di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai kumulatif dari kuesioner
evaluasi KLA

Ukuran

Predikat

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah penilaian Kabupaten/Kota dimana memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) menggambarkan tingkat pencapaian dan kualitas suatu kabupaten atau wilayah dalam memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung anak-anak. Nilai KLA didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai indikator atau kriteria yang terkait dengan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodik

Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Penilaian dari Kelembagaan, 5 Klaster, Kecamatan/Desa/Kelurahan, serta penilaian administrasi, dan penilaian lapangan

Nilai

Tanpa satuan

Ya



Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah anak yang berkebutuhan khusus menunjukkan jumlah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Lembaga Penampungan Anak Berkebutuhan Khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga penampungan Anak Berkebutuhan Khusus adalah lembaga yang menyediakan perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah lembaga penampungan Anak Berkebutuhan Khusus (LPABK) menunjukkan semakin tinggi kebutuhan ketersediaan pelayanan yang khusus ditujukan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah unit yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menggambarkan semakin tinggi kebutuhan ketersediaan pelayanan yang khusus ditujukan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah unit pelayanan perempuan dan anak

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pusat Krisis Terpadu (PKT) adalah salah satu lembaga pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT) menggambarkan semakin tinggi ketersediaan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Women Crisis Center (WCC)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Women Crisis Center (WCC) adalah lembaga yang memberikan perlindungan, dukungan, dan pelayanan terpadu bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah *Women Crisis Center (WCC)* menggambarkan semakin tinggi ketersediaan pelayanan perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) adalah suatu unit yang memberikan pelayanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif

Dinsosdaldukkbp3a

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah RPTC menggambarkan semakin tinggi ketersediaan pelayanan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dan trauma.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Satgas Perlindungan TKI Bermasalah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah satgas perlindungan TKI bermasalah menunjukkan semakin banyaknya satuan tugas yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan terhadap TKI yang mengalami permasalahan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah UPT Dinas Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UPT Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial mencerminkan semakin banyak keberadaan dan distribusi sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan sosial kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat Dinsosdaldukkbp3a

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah tenaga rehabilitasi sosial mencerminkan semakin banyak sumber daya manusia yang tersedia dan diperuntukkan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tenaga Psikolog

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tenaga psikolog adalah profesi yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus gangguan mental, termasuk mendiagnosis dan melakukan berbagai macam intervensi sebagai bentuk penanganannya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Semakin banyak jumlah tenaga psikolog mencerminkan semakin tinggi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang psikologi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga mencerminkan ketersediaan institusi atau organisasi yang berfokus pada memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga pemenuhan hak anak adalah lembaga yang memberikan penyediaan layanan terkait pemenuhan hak anak

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak

Interpretasi

Jumlah PHA yang cukup menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Peningkatan jumlah PHA menandakan bahwa isu-isu anak semakin diperhatikan secara serius oleh masyarakat dan pemerintah. Lebih banyak PHA berarti lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak anak, memberikan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah lembaga yang melakukan pemenuhan hak anak |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rata-rata Angka Kelahiran/ Total Fertility Rate (TFR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rata-rata Angka Kelahiran/ *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR sebesar 2,25 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengendalian Penduduk di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 1000$$

Keterangan:



| | |
|-------------------------------------|--|
| | J1 = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu |
| | J2 = Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama |
| Ukuran | Angka kelahiran per 1.000 perempuan |
| Satuan | orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rata-Rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak yang dilahirkan per keluarga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Rata-rata jumlah anak per keluarga dapat dipengaruhi oleh kebijakan keluarga dan program perencanaan keluarga yang diterapkan di suatu negara. Kebijakan dan program ini dapat berfokus pada penyediaan akses yang mudah ke metode kontrasepsi, edukasi tentang perencanaan keluarga, dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan terkait jumlah anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengendalian Penduduk di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya anak yang dimiliki oleh
setiap keluarga

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah BKB menggambarkan kapasitas atau infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan program BKB.

Jika jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) meningkat, hal ini bisa menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan dan perkembangan anak balita telah meningkat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya kelompok BKB

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif adalah perbandingan Jumlah Bina Keluarga Balita aktif dengan jumlah Bina Keluarga Balita

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Persentase BKB aktif menggambarkan sejauh mana kelompok BKB di suatu wilayah terlibat dan beroperasi secara aktif dalam menyelenggarakan program BKB.

Peningkatan jumlah BKB yang aktif dapat menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya peran BKB dalam pembinaan dan kesehatan balita telah meningkat di kalangan masyarakat. Lebih banyak orang atau keluarga mungkin menyadari manfaat dan dukungan yang diberikan oleh program BKB sehingga mereka aktif berpartisipasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah BKB Aktif}}{\text{Jumlah BKB}} \times 100\%$$

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah BKR menggambarkan kapasitas atau infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan program BKR.
Peningkatan jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) bisa menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat akan dukungan dan bimbingan dalam hal perencanaan keluarga dan masalah-masalah lain yang terkait dengan remaja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya kelompok BKB yang aktif

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif adalah perbandingan jumlah Bina Keluarga Remaja aktif dengan jumlah Bina Keluarga Remaja

Dinsosdaldukkbp3a

Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Persentase BKR aktif menggambarkan sejauh mana kelompok BKR di suatu wilayah terlibat dan beroperasi secara aktif dalam menyelenggarakan program BKR.

Jika persentase BKR yang aktif meningkat, ini bisa menunjukkan bahwa program BKR efektif dalam menarik minat dan partisipasi remaja

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah BKR Aktif}}{\text{Jumlah BKR}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi Keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah BKL menggambarkan kapasitas atau infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan program BKL.
Jika semakin banyak BKL yang ada, ini dapat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia di masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya kelompok BKL

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kelompok

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif adalah perbandingan jumlah Bina Keluarga Lansia aktif dengan Jumlah Bina Keluarga Lansia

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Persentase BKL aktif menggambarkan sejauh mana kelompok BKL di suatu wilayah terlibat dan beroperasi secara aktif dalam menyelenggarakan program BKL.

Jika jumlah BKL yang aktif meningkat, hal ini dapat menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran BKL dalam memberikan dukungan dan perawatan untuk lansia semakin meningkat. Lebih banyak keluarga mungkin menyadari manfaat dari BKL dan keterlibatan aktif mereka dalam memberikan perawatan yang baik bagi anggota keluarga lansia.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Tribina di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah BKL Aktif}}{\text{Jumlah BKL}} \times 100\%$$



| | |
|--------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah UPPKS memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan usaha. Dengan semakin banyaknya UPPKS, lebih banyak keluarga yang dapat mengakses peluang usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ini akan membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesetaraan ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Banyaknya kelompok UPPKS |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelompok |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif adalah perbandingan jumlah kelompok UPPKS aktif dengan jumlah kelompok UPPKS

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Persentase UPPKS Aktif memberikan gambaran tentang tingkat keberlanjutan dan partisipasi UPPKS dalam program peningkatan pendapatan keluarga. Semakin banyak kelompok yang aktif berarti semakin banyak keluarga miskin dan rentan yang terlibat dalam usaha ekonomi bersama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKUA}{JKU} \times 100\%$$

Keterangan:

JKUA = Jumlah Kelompok UPPKS aktif

JKU = Jumlah Kelompok UPPKS

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menggambarkan banyaknya pasangan dalam usia yang potensial untuk memiliki anak dan menjalani proses reproduksi. PUS biasanya merujuk pada pasangan yang berada dalam rentang usia subur (15-49 tahun),

Jika jumlah PUS meningkat, maka ada potensi untuk peningkatan kebutuhan dan permintaan layanan kesehatan reproduksi seperti pelayanan antenatal, persalinan yang aman, perencanaan keluarga, dan layanan kesehatan reproduksi lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Aktif di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya pasangan usia subur (PUS)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Peserta KB Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Data peserta KB aktif memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam program KB serta tingkat penggunaan metode kontrasepsi sebagai upaya pengendalian kelahiran. Dengan meningkatnya jumlah peserta KB aktif, potensi untuk pertumbuhan populasi yang berlebihan dapat dikendalikan. Hal ini dapat membantu mencegah tekanan yang berlebihan pada sumber daya dan infrastruktur negara

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Aktif di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS yang ikut KB

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase KB Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase KB aktif adalah perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Percentase KB aktif mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB. Semakin tinggi persentase KB aktif, semakin banyak individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran dan merencanakan keluarga mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Aktif di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPKA}{JPUS} \times 100\%$$

Keterangan:

JPKA = Jumlah Peserta KB Aktif

JPUS = Jumlah Pasangan Usia Subur

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PUS yang tidak KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

PUS yang tidak KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menggunakan metode kontrasepsi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah PUS yang tidak KB
mencerminkan tingkat partisipasi
pasangan usia subur dalam program
KB. Peningkatan jumlah PUS yang
tidak menggunakan metode
kontrasepsi diantaranya:

- a. Kurangnya Kesadaran tentang Perencanaan Keluarga
- b. Tidak Tersedianya Layanan Kontrasepsi yang Memadai
- c. Faktor Budaya atau Agama
- d. Masalah Ekonomi atau Sosial

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Unmet Need KB di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS yang tidak ikut KB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah jumlah pasangan usia subur yang memiliki keinginan untuk menggunakan metode kontrasepsi atau terlibat dalam program Keluarga Berencana (KB), namun tidak mendapatkan akses atau pelayanan yang memadai dalam memenuhi keinginan tersebut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Data jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani penting untuk memahami kesenjangan dalam pelayanan KB dan untuk merancang strategi yang tepat guna meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan kontrasepsi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Unmet Need KB di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pasangan ingin anak ditunda (IAT)+Pasangan tidak ingin anak lagi (TIAL)

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Unmet Need KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unmet Need KB adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Data *Unmet Need KB* penting untuk memahami sejauh mana kebutuhan kontrasepsi dipenuhi dalam suatu populasi. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan kesadaran akan kontrasepsi, serta memenuhi kebutuhan individu dan pasangan dalam merencanakan keluarga secara aman dan efektif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Unmet Need KB di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$



Keterangan:

J1 = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani

J2 = Jumlah PUS

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah PUS yang melepas KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah PUS yang melepas KB adalah banyaknya pus yang melepas/berhenti ber-KB

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkb3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Data jumlah PUS yang melepas KB penting untuk memahami tren penggunaan kontrasepsi dan perubahan dalam partisipasi dalam program KB. Hal ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan dan pemerintah dalam merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu dan pasangan dalam merencanakan keluarga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Unmet Need KB di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS yang
melepas/Berhenti ber-KB

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Ya



Drop Out KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Drop Out KB adalah akseptor (Pengguna KB) yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkb3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Data *Drop Out* KB penting untuk memahami kelanjutan penggunaan kontrasepsi dan partisipasi dalam program KB. Hal ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan dan pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program KB dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penghentian penggunaan kontrasepsi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Drop Out KB di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPLK}{JPKA} \times 100\%$$

Keterangan:

JPLK = Jumlah PUS yang melepas KB

JPKA = Jumlah Peserta KB Aktif

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Peserta KB pengguna kontrasepsi IUD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi IUD adalah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Peserta KB pengguna
kontrasepsi IUD mencerminkan
preferensi individu atau pasangan
terhadap metode kontrasepsi IUD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat
Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi
Jangka (MKJP) di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS yang menggunakan
Alokon IUD

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Peserta KB pengguna kontrasepsi MOW

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi MOW adalah metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi (Saluran Rahim)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Peserta KB pengguna kontrasepsi MOW mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi MOW

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS yang ikut KB MOW

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Peserta KB pengguna kontrasepsi MOP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi MOP adalah metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/ pemotongan saluran sperma (vas deferens) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah peserta KB pengguna kontrasepsi MOP mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi MOP

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Banyaknya PUS yang ikut KB MOW
Jumlah
orang
Ya



Peserta KB pengguna kontrasepsi Susuk / Implan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi susuk/implan adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang menggunakan suatu implan kecil yang dimasukkan di bawah kulit lengen atas

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah peserta KB pengguna kontrasepsi susuk/implan mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi susuk/implan. Jumlah peserta yang meningkat dapat menandakan bahwa kontrasepsi susuk/implan dianggap efektif dan memberikan kepuasan bagi para penggunanya. Metode ini memiliki keunggulan, seperti tidak memerlukan pemakaian harian dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga dapat menjadi pilihan yang lebih praktis bagi beberapa individu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Banyaknya PUS ikut KB Implan
Jumlah
orang
Ya



Peserta KB pengguna kontrasepsi Suntik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi yang mengandung hormon progestogen.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Peserta KB pengguna kontrasepsi suntik mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi suntik. Jumlah yang meningkat dari peserta KB pengguna kontrasepsi suntik bisa mencerminkan bahwa metode ini sesuai dengan kebutuhan dan preferensi para pengguna. Beberapa individu mungkin lebih memilih metode kontrasepsi yang berbeda, seperti suntik, karena alasan kenyamanan dan kepraktisan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS ikut KB suntik

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Peserta KB pengguna kontrasepsi Obat / Pil KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Obat / Pil KB adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah peserta KB pengguna kontrasepsi obat/pil KB mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi obat/pil KB. Peningkatan jumlah peserta KB pengguna pil KB bisa mencerminkan preferensi masyarakat terhadap metode yang praktis dan tidak memerlukan prosedur yang rumit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PUS ikut KB pil

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Peserta KB pengguna kontrasepsi Kondom

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontrasepsi kondom adalah Salah satu metode kontrasepsi yang menggunakan alat berupa kondom

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Peserta KB pengguna kontrasepsi kondom mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi kondom. Jumlah peserta KB yang meningkat bisa mengindikasikan bahwa kondom dianggap sebagai metode kontrasepsi yang efektif dan mudah digunakan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya kondom

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase Peserta KB MKJP

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase peserta KB MKJP adalah perbandingan jumlah total peserta KB MKJP dengan jumlah peserta KB aktif

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) mencerminkan preferensi individu atau pasangan terhadap metode kontrasepsi jangka panjang. Jika persentase peserta KB MKJP meningkat, ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang memilih dan menggunakan metode kontrasepsi yang termasuk dalam program KB MKJP.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi/ Metode Kontrasepsi Jangka (MKJP) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JTPKM}{JPKA} \times 100\%$$

Keterangan:

JTPKM = Jumlah total peserta KB MKJP

JPKA = Jumlah peserta KB aktif



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |
| | |



Jumlah Alat Peraga KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Alat peraga KB adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi, edukasi, dan promosi mengenai metode-metode kontrasepsi dan perencanaan keluarga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah alat peraga KB yang tersedia dan digunakan dapat memberikan indikasi mengenai upaya promosi dan edukasi mengenai keluarga berencana di wilayah Purbalingga. Jika semakin banyak alat peraga KB yang disediakan, ini dapat menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan edukasi dan penyebaran informasi terkait perencanaan keluarga. Alat peraga ini dapat berupa brosur, poster, leaflet, video, atau media lainnya yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai metode kontrasepsi dan manfaat perencanaan keluarga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Banyaknya alat peraga KB |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Balai KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balai KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan, berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada Petugas dan Pengelola (PKB dan PLKB, Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Mitra Kerja) dalam operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Kecamatan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbpb3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Balai KB mencerminkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan KB dalam suatu wilayah. Semakin banyak jumlah Balai KB, semakin besar peluang bagi individu atau pasangan untuk mengakses informasi, konseling, dan layanan kontrasepsi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran

Banyaknya Balai Penyuluhan KB
Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Petugas Lapangan KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Petugas lapangan KB adalah Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Petugas Lapangan KB menggambarkan jumlah SDM yang ditugaskan atau dilibatkan dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk memberikan pelayanan, konseling, dan edukasi terkait perencanaan keluarga dan kontrasepsi kepada individu atau pasangan usia subur. Jika jumlah petugas lapangan KB meningkat, ini bisa menunjukkan adanya peningkatan fokus dan perhatian pada program Keluarga Berencana. Mungkin pemerintah atau organisasi terkait sedang berupaya untuk memperkuat program KB guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keluarga.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya petugas lapangan KB

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Petugas Lapangan KB Mengikuti Pelatihan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Petugas Lapangan KB mengikuti pelatihan adalah jumlah petugas lapangan KB yang sudah mengikuti pelatihan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkb3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Petugas Lapangan KB yang mengikuti pelatihan mencerminkan upaya untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan KB. Jumlah petugas lapangan KB yang mengikuti pelatihan juga bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga dan dukungan untuk program tersebut. Lebih banyak petugas yang terlatih dapat membantu meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam program KB.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya PKB yang mengikuti pelatihan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Petugas Penyuluhan KB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Petugas Penyuluhan KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Petugas Penyuluhan KB menggambarkan jumlah SDM yang khusus bertugas sebagai penyuluhan dalam program Keluarga Berencana (KB). Peningkatan jumlah petugas Penyuluhan KB dapat menunjukkan adanya komitmen yang lebih besar dari pemerintah atau organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program perencanaan keluarga. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat perencanaan keluarga sedang diperkuat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Banyaknya petugas penyuluhan KB
Jumlah
Orang
Ya



Jumlah Petugas Penyuluhan KB Mengikuti Pelatihan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Petugas Penyuluhan KB mengikuti pelatihan adalah jumlah penyuluhan KB yang sudah mengikuti pelatihan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Petugas Penyuluhan KB yang mengikuti pelatihan mencerminkan upaya untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam memberikan informasi, konseling, dan edukasi kepada individu atau pasangan usia subur tentang perencanaan keluarga, metode kontrasepsi, serta pentingnya kesehatan reproduksi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di
Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya petugas penyuluhan
fungsional yang mengikuti
pelatihan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Institusi Masyarakat Pedesaan adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan menunjukkan tingkat keberagaman dan ketersediaan lembaga atau organisasi di tingkat pedesaan yang berperan dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan masyarakat pedesaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Banyaknya institusi masyarakat pedesaan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konsep dan Definisi | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator | Dinsosdaldukkbp3a Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Interpretasi | Data jumlah PPKBD dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih di tingkat desa dalam melaksanakan program perencanaan keluarga. Jika jumlah PPKBD meningkat, hal ini mungkin menunjukkan bahwa masyarakat di desa semakin menyadari pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. |

■ DATA

| | |
|-----------------------|---|
| Data yang Dikumpulkan | Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga |
| Periodikasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Setiap desa Banyaknya PPKBND |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Rukun Warga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinsosdaldukkbp3a
Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Interpretasi

Data jumlah Sub PPKBD dapat digunakan untuk mengukur dan memantau efektivitas pengorganisasian dan penyebaran pelayanan perencanaan keluarga di tingkat desa. Jika jumlah sub pembantu pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) meningkat dari waktu ke waktu, ini bisa menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga telah meningkat di desa tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sarpras KB dan Unit Pelayanan KB di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | RT, RW Banyaknya Sub PPKBD |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS TENAGA KERJA



Jumlah Angkatan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Angkatan Kerja (Bekerja + Pengangguran Terbuka)

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angkatan kerja laki-laki adalah penduduk laki-laki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi jumlah angkatan kerja laki-laki, berarti semakin banyak jumlah penduduk laki-laki yang berpotensi untuk bekerja.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Angkatan Kerja Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angkatan kerja perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi jumlah angkatan kerja perempuan, berarti semakin banyak jumlah penduduk perempuan yang berpotensi untuk bekerja.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Angkatan Kerja Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang bekerja adalah angkatan kerja yang bekerja (penduduk >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah penduduk yang bekerja, semakin tinggi tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang bekerja Laki-Laki + Jumlah Penduduk yang bekerja Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Laki-Laki yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk laki-laki yang bekerja adalah angkatan kerja laki-laki yang bekerja (penduduk laki-laki >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah penduduk laki-laki yang bekerja, semakin tinggi tingkat penggunaan tenaga kerja laki-laki dalam perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang bekerja Laki-Laki

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Perempuan yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk perempuan yang bekerja adalah angkatan kerja perempuan yang bekerja (penduduk perempuan >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah penduduk perempuan yang bekerja, semakin tinggi tingkat penggunaan tenaga kerja perempuan dalam perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang bekerja Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio/ Tingkat Kesempatan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio/ tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi menunjukkan adanya peluang kerja yang luas dan ketersediaan lapangan kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPK}{AK} \times 100\%$$

Keterangan:

JPK = Jumlah penduduk yang bekerja

AK = Angkatan kerja

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Ya



Rasio/ Tingkat Kesempatan Kerja Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio/ tingkat kesempatan kerja laki-laki adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki yang bekerja dengan angkatan kerja laki-laki.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jika tingkat kesempatan kerja laki-laki tinggi, maka menunjukkan bahwa banyak laki-laki dalam usia kerja aktif memiliki pekerjaan atau memiliki peluang yang luas untuk bekerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPKL}{AKL} \times 100\%$$

Keterangan:

JPKL = Jumlah penduduk yang bekerja laki-Laki

AKL = Angkatan kerja laki-laki

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Rasio/ Tingkat Kesempatan Kerja Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio/ tingkat kesempatan kerja perempuan adalah perbandingan antara jumlah penduduk perempuan yang bekerja dengan angkatan kerja perempuan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jika tingkat kesempatan perempuan tinggi, maka menunjukkan bahwa banyak perempuan dalam usia kerja aktif memiliki pekerjaan atau memiliki peluang yang luas untuk bekerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPKP}{AKP} \times 100\%$$

Keterangan:

JPKP = Jumlah penduduk yang bekerja perempuan

AKP = Angkatan kerja perempuan

Persentase

%

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Ya



Jumlah Pengangguran Terbuka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pengangguran terbuka adalah jumlah individu dalam populasi yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak sedang bekerja, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan pada saat survei atau saat mereka mencari pekerjaan.
2. Aktif mencari pekerjaan, yaitu mereka sedang melakukan upaya nyata untuk mencari pekerjaan, seperti menghubungi perusahaan, mengirim lamaran kerja, atau berpartisipasi dalam program pencarian kerja.
3. Siap untuk bekerja, yaitu individu tersebut siap dan tersedia untuk memulai pekerjaan jika mendapatkan tawaran yang sesuai.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang sulit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Periodesasi

(TPAK) Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pengangguran terbuka laki-laki + Jumlah Pengangguran terbuka perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengangguran Terbuka Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pengangguran terbuka laki-laki adalah jumlah individu dalam populasi yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak sedang bekerja, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan pada saat survei atau saat mereka mencari pekerjaan.
2. Aktif mencari pekerjaan, yaitu mereka sedang melakukan upaya nyata untuk mencari pekerjaan, seperti menghubungi perusahaan, mengirim lamaran kerja, atau berpartisipasi dalam program pencarian kerja.
3. Siap untuk bekerja, yaitu individu tersebut siap dan tersedia untuk memulai pekerjaan jika mendapatkan tawaran yang sesuai.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka laki-laki yang tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang sulit.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Periodesasi

(TPAK) Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pengangguran terbuka laki-

laki

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengangguran Terbuka Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pengangguran terbuka perempuan adalah jumlah individu dalam populasi yang memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak sedang bekerja, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan pekerjaan pada saat survei atau saat mereka mencari pekerjaan.
2. Aktif mencari pekerjaan, yaitu mereka sedang melakukan upaya nyata untuk mencari pekerjaan, seperti menghubungi perusahaan, mengirim lamaran kerja, atau berpartisipasi dalam program pencarian kerja.
3. Siap untuk bekerja, yaitu individu tersebut siap dan tersedia untuk memulai pekerjaan jika mendapatkan tawaran yang sesuai.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka perempuan yang tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang sulit.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Jumlah Pengangguran terbuka

perempuan

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Bukan Angkatan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Jika jumlah bukan angkatan kerja tinggi, maka menunjukkan adanya sebagian besar populasi usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi pada saat itu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlahan Angkatan Kerja Laki-Laki ditambah Angkatan Kerja Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bukan Angkatan Kerja Laki-Laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bukan angkatan kerja laki-laki adalah penduduk laki-laki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika jumlah bukan angkatan kerja laki-laki tinggi, maka menunjukkan adanya sebagian besar populasi laki-laki usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi pada saat itu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Bukan Angkatan Kerja Laki-laki

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bukan Angkatan Kerja Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bukan angkatan kerja perempuan adalah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Jika jumlah bukan angkatan kerja perempuan tinggi, maka menunjukkan adanya sebagian besar populasi perempuan usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi pada saat itu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Bukan Angkatan Kerja Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Usia Kerja / Angkatan Kerja yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk usia kerja adalah angkatan kerja (penduduk yang berusia 15-65 tahun).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah penduduk usia kerja menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di suatu daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk Laki-laki Usia Kerja atau Angkatan Kerja yang Bekerja + Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja atau Angkatan Kerja yang Bekerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia Kerja / Angkatan Kerja yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk laki-laki usia kerja adalah angkatan kerja laki-laki (penduduk laki-laki yang berusia 15-65 tahun).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah penduduk laki-laki usia kerja menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia laki-laki di suatu daerah. Semakin kecil jumlah penduduk laki-laki usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk laki-laki maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk Laki-laki Usia Kerja atau Angkatan Kerja yang Bekerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja / Angkatan Kerja Yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk perempuan usia kerja/ angkatan kerja yang bekerja adalah angkatan kerja perempuan (penduduk perempuan yang berusia 15-65 tahun).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah penduduk perempuan usia kerja menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia perempuan di suatu daerah. Semakin kecil jumlah penduduk perempuan usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk perempuan maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Periodesasi

(TPAK) Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja atau Angkatan Kerja yang Bekerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan banyaknya angkatan kerja yang bekerja terhadap angkatan kerja.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Nilai TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$TPAK = \frac{PK}{PUK} \times 100\%$$

Keterangan:

PK = Penduduk yang bekerja

PUK = Penduduk usia kerja

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



TPAK Laki-laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPAK laki-laki adalah perbandingan banyaknya angkatan kerja Laki-laki terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Nilai TPAK laki-laki mengindikasikan besarnya persentase penduduk laki-laki usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK laki-laki, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja laki-laki yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPLK}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JPLK = jumlah penduduk laki-laki bekerja

JP = jumlah penduduk
Persentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



TPAK Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPAK perempuan adalah perbandingan banyaknya angkatan kerja perempuan terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Nilai TPAK perempuan mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja perempuan yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK perempuan, semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Periodisasi

(TPAK) Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPPK}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JPPK = jumlah penduduk

perempuan bekerja

JP = jumlah penduduk

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Pencari Kerja yang Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja yang terdaftar adalah angkatan kerja yang terdaftar (membuat AK 1). AK 1 adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jumlah pencari kerja yang terdaftar memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang secara aktif mencari pekerjaan dan telah mengambil langkah untuk terdaftar dalam sistem resmi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Laki-Laki Terdaftar + Pencari Kerja Perempuan yang Terdaftar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencari Kerja Laki-Laki yang Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja laki-laki yang terdaftar adalah angkatan kerja laki-laki yang terdaftar (membuat AK 1).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah pencari kerja laki-laki yang terdaftar memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang secara aktif mencari pekerjaan dan telah mengambil langkah untuk terdaftar dalam sistem resmi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Laki-laki yang Terdaftar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencari Kerja Perempuan yang Terdaftar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja perempuan yang terdaftar adalah angkatan kerja perempuan yang terdaftar (membuat AK 1).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah pencari kerja perempuan yang terdaftar memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang secara aktif mencari pekerjaan dan telah mengambil langkah untuk terdaftar dalam sistem resmi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Perempuan yang Terdaftar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Permintaan Tenaga Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Permintaan tenaga kerja adalah perusahaan yang membutuhkan dan membuka lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat permintaan tenaga kerja maka semakin tinggi upah yang ditawarkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Permintaan Tenaga Kerja Laki-laki +
Permintaan Tenaga Kerja
Perempuan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Permintaan Tenaga Kerja Laki-laki

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Permintaan tenaga kerja laki-laki adalah perusahaan yang membutuhkan dan membuka lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja laki-laki.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Permintaan tenaga kerja laki-laki menunjukkan jumlah tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat permintaan tenaga kerja laki-laki maka semakin tinggi upah yang ditawarkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Permintaan Tenaga Kerja Laki-laki

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Permintaan Tenaga Kerja Perempuan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Permintaan tenaga kerja perempuan adalah perusahaan yang membutuhkan dan membuka lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja perempuan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Permintaan tenaga kerja perempuan menunjukkan jumlah tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat permintaan tenaga kerja perempuan maka semakin tinggi upah yang ditawarkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Permintaan
Perempuan

Tenaga

Kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencari Kerja yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang sudah diterima dan bekerja.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan keberhasilan kerja sama antara pencari kerja dan Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan penempatan kerja yang memadai dan membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi individu yang mencari pekerjaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Laki-Laki yang ditempatkan + Pencari Kerja Perempuan yang ditempatkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencari Kerja Laki-Laki yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja laki-laki yang ditempatkan adalah pencari kerja laki-laki yang sudah diterima dan bekerja.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah pencari kerja laki-laki yang ditempatkan menunjukkan keberhasilan kerja sama antara pencari kerja dan Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan penempatan kerja yang memadai dan membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi individu laki-laki yang mencari pekerjaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Laki-laki yang Ditempatkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Pencari Kerja Perempuan yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pencari kerja perempuan yang ditempatkan adalah pencari kerja perempuan yang sudah diterima dan bekerja.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah pencari kerja perempuan yang ditempatkan menunjukkan keberhasilan kerja sama antara pencari kerja dan Dinas Ketenagakerjaan dalam mencapai tujuan penempatan kerja yang memadai dan membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi individu perempuan yang mencari pekerjaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Pencari Kerja Perempuan yang Ditempatkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan antara pencari kerja yang terdaftar dengan pencari kerja yang ditempatkan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi persentase pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan seberapa besar jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan dalam pekerjaan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{PT}{PD} \times 100\%$$

Keterangan:

PT = Pencari kerja yang terdaftar

PD = Pencari kerja yang ditempatkan

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Persentase Pencari Kerja Laki-Laki yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pencari kerja laki-laki yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja laki-laki yang berhasil ditempatkan dalam pekerjaan dengan jumlah total pencari kerja laki-laki yang terdaftar atau mencari pekerjaan dalam periode tertentu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jika persentase pencari kerja laki-laki yang ditempatkan rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja laki-laki, di mana lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi atau preferensi laki-laki pencari kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{PLD}{PD} \times 100\%$$

Keterangan:

PLD = Pencari kerja laki-laki yang ditempatkan

PD = Pencari kerja yang ditempatkan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pencari Kerja Perempuan yang Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pencari kerja perempuan yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja perempuan yang berhasil ditempatkan dalam pekerjaan dengan jumlah total pencari kerja perempuan yang terdaftar atau mencari pekerjaan dalam periode tertentu.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja

Aspek Tenaga Kerja

Jika persentase pencari kerja perempuan yang ditempatkan rendah, hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja perempuan, di mana lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi atau preferensi perempuan pencari kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pencari Kerja yang Ditempatkan di

Periodisasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{PPD}{PD} \times 100\%$$

Keterangan:

PPD = Pencari kerja perempuan yang ditempatkan



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

PD = Pencari kerja yang ditempatkan
Percentase
%
Ya



Jumlah Penduduk yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang bekerja adalah angkatan kerja yang bekerja (penduduk >15 tahun) bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang bekerja dapat memberikan gambaran tentang tingkat penggunaan sumber daya manusia dalam suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi atau keadaan ketenagakerjaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut
Pendidikan di Kabupaten
Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha Sendiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin banyak Jumlah penduduk yang bekerja berusaha sendiri dapat memberikan gambaran tentang semakin tinggi tingkat kewirausahaan, tingkat inovasi, dan tingkat kemandirian ekonomi individu dalam suatu negara atau daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha Sendiri

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bekerja Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika jumlah penduduk yang bekerja dalam status buruh tidak tetap atau tidak dibayar sangat tinggi, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah ketidakstabilan pekerjaan. Hal ini mungkin menunjukkan tingginya tingkat ketidakpastian pekerjaan, kontrak kerja yang tidak tetap, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan lepas, atau pekerjaan yang tidak diatur secara resmi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bekerja berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika jumlah penduduk yang bekerja dalam status buruh tetap atau dibayar secara layak tinggi, itu bisa menjadi indikasi adanya stabilitas pekerjaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja memiliki kontrak kerja yang tetap dan akses yang stabil ke sumber pendapatan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Penduduk yang Bekerja Buruh/ Karyawan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Buruh/ karyawan adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/ perusahaan secara tetap dengan menerima upah/ gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/ karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi jumlah Penduduk yang bekerja buruh/karyawan menunjukkan semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan berkontribusi pada produksi barang dan jasa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Buruh/ Karyawan

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja Bebas di Pertanian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jika jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja bebas di Pertanian tinggi, itu menunjukkan bahwa banyak individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian sebagai pekerja mandiri, petani kecil, atau pemilik usaha pertanian. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketiga

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah Penduduk yang Bekerja

Pekerja bebas di pertanian

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja Bebas di Non Pertanian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja bebas non pertanian yang tinggi bisa menunjukkan adanya iklim usaha yang kondusif dan minat individu untuk memulai dan menjalankan usaha mereka sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja bebas di non pertanian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja Keluarga/ Tak Dibayar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja keluarga/ tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/ gaji, baik berupa uang maupun barang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau tak dibayar menunjukkan jumlah individu dalam suatu populasi yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai anggota keluarga atau tenaga kerja tak dibayar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja Pekerja keluarga/ tak dibayar

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Semakin tinggi Jumlah penduduk yang bekerja dapat memberikan indikasi tentang semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang bekerja di bidang Pertanian + Jumlah Penduduk yang bekerja di bidang Manufaktur + Jumlah Penduduk yang bekerja di bidang Jasa + Jumlah Penduduk yang bekerja di bidang lainnya

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja di Bidang Pertanian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang bekerja di bidang pertanian adalah penduduk yang bekerja pada komoditas tanaman pangan, perkebunan, buah-buahan dan sayuran, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika terjadi penurunan jumlah pekerja pertanian dari waktu ke waktu dapat menunjukkan adanya pergeseran ke sektor non-pertanian atau peningkatan produktivitas dan mekanisasi di sektor pertanian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja di bidang Pertanian

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja di Bidang Manufaktur

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang bekerja di bidang manufaktur adalah penduduk yang bekerja pada sektor industri mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jika jumlah pekerja manufaktur tinggi, ini dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki sektor manufaktur yang berkembang dan menjadi pusat kegiatan industri.

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja di
bidang Manufaktur

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk yang Bekerja di Bidang Jasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk yang bekerja di bidang jasa adalah penduduk yang bekerja pada sektor setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi jumlah pekerja di sektor jasa, semakin besar peran sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan layanan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penduduk yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Penduduk yang Bekerja di
bidang Jasa

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan adalah perusahaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin banyak perusahaan semakin banyak angkatan kerja yang berpotensi untuk bekerja/ semakin banyak angkatan kerja yang dibutuhkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Perusahaan Besar + Jumlah Perusahaan Sedang + Jumlah Perusahaan Kecil

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus yang Diselesaikan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui mediasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja

Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan dengan baik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama + Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui anjuran Jumlah

Ukuran

Jumlah

Satuan

Kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Status Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang baik yaitu dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKS}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

JKS = Jumlah Kasus Perselisihan Yang Diselesaikan

JK = Total Jumlah Kasus

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan antara pihak pengusaha dengan pekerja / serikat pekerja karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin sedikit perselisihan menunjukkan semakin baik pembinaan hubungan industrial dan/atau semakin baik penyelesaian perselisihan secara Bipartit.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perselisihan Hak + Perselisihan Kepentingan + Perselisihan PHK + Perselisihan antara Serikat Pekerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kasus yang Diselesaikan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui mediasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Tenaga Kerja
Semakin banyak jumlah kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menunjukkan semakin banyak perselisihan yang terselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama + Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui anjuran

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum



Status Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbandingan antara jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan jumlah kasus yang diselesaikan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin tinggi persentase menunjukkan menunjukkan semakin banyak perselisihan yang terselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKS}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

JKS = Jumlah Kasus Perselisihan

Yang Diselesaikan

JK = Total Jumlah Kasus

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Balai Latihan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Balai latihan kerja adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin banyak jumlah BLK semakin besar peluang bagi penduduk setempat untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan keterampilan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Balai Latihan Kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

balai

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Program Kerja Balai Latihan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Program kerja balai latihan kerja adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh BLK untuk mencapai tujuan dan tugasnya dalam menyelenggarakan pelatihan kerja. Pelatihan yang dilaksanakan di BLK meliputi: TIK (*office & design grafis*), jahit, tata boga, las, perbengkelan dan tata rias.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin banyak program yang tersedia, semakin banyak opsi pelatihan yang dapat dipilih oleh individu yang ingin mengembangkan keterampilan mereka

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Jumlah Program Kerja Balai Latihan Kerja
Jumlah
program
Ya



Jumlah Peserta Pelatihan Balai Latihan Kerja

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Peserta pelatihan balai latihan kerja adalah orang yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di BLK.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika jumlah peserta pelatihan tinggi, itu dapat dianggap sebagai indikasi bahwa program-program BLK diminati dan dianggap relevan oleh masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Peserta Pelatihan Balai Latihan Kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga pelatihan kerja pemerintah adalah instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dimana Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerjasama dengan swasta.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin banyak jumlah lembaga pelatihan kerja, semakin besar upaya pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga pelatihan kerja swasta adalah lembaga swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. LPK swasta wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kab/kota.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika terdapat banyak lembaga pelatihan swasta, itu bisa memberikan opsi yang lebih banyak bagi individu untuk memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Program Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Program kerja lembaga pelatihan kerja pemerintah adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah yang bekerja sama dengan swasta.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja

Aspek Tenaga Kerja

Semakin tinggi jumlah program kerja yang diselenggarakan, semakin banyak kesempatan yang tersedia bagi individu untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Program Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

Ukuran

Jumlah

Satuan

program

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Peserta lembaga pelatihan kerja pemerintah adalah orang yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK Pemerintah.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah peserta, semakin banyak individu yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan kerja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pelatihan Kerja di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Peserta Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah TKI yang Bekerja di Luar Negeri Terdidik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TKI yang bekerja di luar negeri terdidik adalah Warga Indonesia yang telah mendapatkan kemampuan/ keahliannya pada bidang tertentu melalui pendidikan formal dan/ non formal.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Semakin Tinggi Jumlah TKI terdidik yang bekerja di luar negeri dapat memberikan indikasi tentang tingginya tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang mencari peluang kerja di pasar internasional

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Purbalingga yang Bekerja di Luar Negeri

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah TKI yang bekerja di Luar Negeri Terdidik

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah TKI yang Bekerja di Luar Negeri Tidak Terdidik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tidak terdidik adalah Warga Indonesia yang belum mendapatkan kemampuan/ keahliannya pada bidang tertentu melalui pendidikan formal dan/ non formal.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Tenaga Kerja
Jumlah TKI yang tidak terdidik yang bekerja di luar negeri memberikan indikasi tentang adanya permintaan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah di beberapa sektor pekerjaan di negara tujuan. Ini mungkin terkait dengan permintaan akan pekerja fisik seperti pekerja konstruksi, pekerja pertanian, pekerja rumah tangga, atau sektor-sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja tanpa persyaratan pendidikan yang tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Purbalingga yang Bekerja di Luar Negeri

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tidak terdidik

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Kasus TKI Di Luar Negeri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kasus TKI di luar negeri adalah perselisihan yang terjadi antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja di luar negeri.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah kasus TKI di luar negeri memberikan gambaran umum tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran. Setiap kasus adalah unik dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kerja, jenis pekerjaan, negara tujuan, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja migran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kabupaten Purbalingga yang Bekerja di Luar Negeri

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kasus TKI di luar negeri

Ukuran

Jumlah

Satuan

kasus

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Yang Memperkerjakan WNA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan yang memperkerjakan WNA adalah perusahaan yang merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja dari negara asing untuk bekerja dalam berbagai posisi dan sektor pekerjaan di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jumlah perusahaan yang memperkerjakan WNA (Warga Negara Asing) menunjukkan sejauh mana perusahaan-perusahaan melibatkan tenaga kerja asing dalam operasional mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Periodesasi

(WNA) di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan WNA

Ukuran

Jumlah

Satuan

perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pekerja WNA Legal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja WNA legal adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Peningkatan jumlah pekerja WNA legal dapat mencerminkan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka atau meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing dalam sektor-sektor tertentu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pekerja WNA Legal

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pekerja WNA Ilegal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pekerja WNA ilegal adalah mereka yang berada di suatu negara dan bekerja tanpa izin kerja yang sah dari pemerintah.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Jika jumlah pekerja WNA ilegal tinggi, ini mungkin menunjukkan adanya kekurangan dalam upaya pemerintah untuk mencegah masuknya pekerja ilegal atau penegakan hukum yang lemah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Pekerja WNA Ilegal

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Besaran UMR

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMR (Upah Minimum Regional) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Tenaga Kerja

Interpretasi

Besaran UMR dapat memberikan indikasi tentang tingkat kesejahteraan pekerja dalam suatu wilayah. Kenaikan UMR dapat menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan standar hidup pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kondisi setempat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Besaran UMR

Ukuran

Jumlah

Satuan

Rupiah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Animo Transmigrasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Animo transmigrasi adalah jumlah KK yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi.

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Transmigrasi

Interpretasi

Jika jumlah animo rendah, ini mungkin menunjukkan kurangnya akses informasi yang memadai atau kurangnya upaya dalam menyampaikan manfaat dan prosedur program kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengiriman Transmigran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Animo

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kuota Pusat Transmigrasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah kuota pusat transmigrasi adalah jumlah transmigran yang dianggarkan oleh APBN (Kemenaker).

Unit Penyelenggara

Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Indikator

Aspek Transmigrasi

Interpretasi

Jika jumlah kuota tinggi, ini menunjukkan bahwa pusat transmigrasi memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung dan mendukung jumlah individu yang ditetapkan oleh pemerintah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengiriman Transmigran di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kuota Pusat

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Calon Transmigran Ditempatkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah calon transmigran ditempatkan adalah jumlah transmigran yang mengikuti program transmigrasi dan ditempatkan di lokasi transmigran.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja

Interpretasi

Aspek Transmigrasi

Jika jumlah calon transmigran yang ditempatkan tinggi, ini menunjukkan adanya pergerakan penduduk yang signifikan dari daerah asal ke daerah tujuan yang ditentukan dalam program transmigrasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengiriman Transmigran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Calon Transmigran yang Ditempatkan

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Pengiriman Transmigran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase pengiriman transmigran adalah perbandingan antara jumlah calon transmigran yang ditempatkan dibagi dengan jumlah animo.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Tenaga Kerja
Aspek Transmigrasi

Interpretasi

Jika persentase pengiriman transmigran tinggi, ini menunjukkan adanya pergerakan penduduk antar wilayah yang signifikan, yang dapat mempengaruhi keseimbangan populasi dan struktur demografi di daerah-daerah terkait.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pengiriman Transmigran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JCTT}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

JCTT = Jumlah calon transmigran yang ditempatkan

JA = Jumlah animo

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok adalah Ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi atau fluktuasi harga dari kelompok pangan pokok selama periode waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Koefisien variasi harga pangan pokok menggambarkan stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen. Semakin kecil angka koefisien variasi harga pokok pangan, maka semakin stabil harga komoditas tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$CV = \frac{Std\ deviasi}{rata - rata} \times 100\%$$

Keterangan:

CV = Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok

Ukuran

Persentase

Satuan

% (persen)

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah Ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Kategori IKP diklasifikasikan menjadi:

- a. $<= 41,52$ Sangat rawan pangan
- b. $> 41,52 - 51,42$ Rawan pangan
- c. $> 51,42 - 59,58$ Agak rawan pangan
- d. $> 59,58 - 67,75$ Cukup tahan pangan
- e. $> 67,75 - 75,68$ Tahan pangan
- f. $> 75,68$ Sangat tahan pangan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Release dari Badan Ketahanan
Pangan Nasional (BKPN)

Indeks

Tanpa satuan

Ya



Skor PPH Konsumsi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) adalah Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodikasi

Skor PPH Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Angka

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Padi-padian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Padi-padian adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan padi-padian yaitu beras dan olahannya, jagung dan olahannya, serta terigu dan olahannya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jika konsumsi padi-padian tinggi, dapat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengonsumsi makanan pokok yang kaya akan karbohidrat kompleks dan serat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Umbi-umbian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Umbi-umbian adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan umbi-umbian yaitu ubi kayu dan olahannya, ubi jalar dan olahannya, kentang dan olahannya, talas dan olahannya, sagu dan olahannya (termasuk makanan berpati).

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Pangan
Tingginya konsumsi umbi-umbian mencerminkan tingkat diversifikasi konsumsi pangan yang mengandung karbohidrat dalam masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Hewani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Hewani adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan hewani yaitu daging, ikan, telur, susu beserta olahannya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok pangan hewani dapat mencerminkan preferensi dan kebiasaan konsumsi masyarakat dalam memilih sumber protein dan zat gizi dari produk pangan hewani.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Minyak dan Lemak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Minyak dan Lemak adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan minyak dan lemak yaitu minyak kelapa, minyak sawit, margarin dan lemak hewani.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok pangan minyak dan lemak mencerminkan tingginya asupan energi atau kalori dalam pola konsumsi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Buah/Biji Berminyak adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah/biji berminyak yaitu kelapa, kemiri, kenari dan coklat.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok pangan buah/biji berminyak mencerminkan kesadaran masyarakat akan manfaat kesehatan dari buah dan biji-bijian ini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Kacang-kacangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Kacang-kacangan adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan kacang-kacangan yaitu kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah konsumsi berdasarkan kelompok pangan kacang-kacangan yang tinggi dapat mencerminkan kesadaran masyarakat akan manfaat serat dalam pola makan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Gula

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Pangan Gula adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan gula yaitu gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol/kaleng.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok pangan gula dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi makanan dan minuman manis yang mengandung gula. Produk pangan yang tinggi gula seringkali memiliki rasa yang disukai banyak orang dan dapat menjadi bagian dari makanan dan minuman yang populer.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Sayuran dan Buah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Sayuran dan Buah adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah yaitu sayur segar dan olahannya, buah segar dan olahannya termasuk emping.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok sayuran dan buah dapat mencerminkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebiasaan makan yang sehat. Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konsumsi Berdasarkan Kelompok Lain-lain

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Konsumsi Berdasarkan Kelompok Lain-lain adalah Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan lain-lain yaitu aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Tingginya jumlah konsumsi berdasarkan kelompok lain-lain dapat mencerminkan preferensi rasa masyarakat dalam menyajikan makanan dan minuman.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Konsumsi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

kg/kapita/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati adalah Total jumlah produksi dari berbagai jenis bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan manusia. Komoditas pangan nabati ini mencakup beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayur, buah-buahan, minyak goreng, gula.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Jumlah produksi komoditas pangan nabati mencerminkan ketersediaan pangan nabati dalam memenuhi kebutuhan makanan penduduk. Semakin tinggi produksi pangan nabati, semakin besar kemungkinan wilayah tersebut memiliki pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Produksi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

ton/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani adalah Total jumlah produksi dari berbagai jenis bahan pangan yang berasal dari hewan yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan manusia. Komoditas pangan hewani mencakup daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur, susu dan ikan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Jumlah produksi komoditas pangan hewani mencerminkan ketersediaan pangan hewani dalam memenuhi kebutuhan makanan penduduk. Semakin tinggi produksi pangan hewani, semakin besar kemungkinan wilayah tersebut memiliki pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Rincian Produksi Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data SUSENAS BPS

Ukuran

Jumlah

Satuan

ton/tahun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Neraca Bahan Makanan (NBM) Energi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Neraca Bahan Makanan (NBM) Energi adalah Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan (Energi) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

NBM Energi mencerminkan ketersediaan energi pangan di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah energi yang dihasilkan dari berbagai sumber pangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kandungan Energi dari 9 kelompok pangan (Aplikasi NBM dari Bapanas)

Ukuran

Jumlah

Satuan

kkal/kapita/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Neraca Bahan Makanan (NBM) Protein

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Neraca Bahan Makanan (NBM) Protein adalah Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan (Protein) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan
NBM Protein mencerminkan ketersediaan protein pangan di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah protein yang dihasilkan dari berbagai sumber pangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kandungan Protein dari 9 kelompok pangan (Aplikasi NBM dari Bapanas)

Ukuran

Jumlah

Satuan

gr/kapita/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Neraca Bahan Makanan (NBM) Lemak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Neraca Bahan Makanan (NBM) Lemak adalah Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan (Lemak) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan
NBM Lemak mencerminkan ketersediaan lemak pangan di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah lemak yang dihasilkan dari berbagai sumber pangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Neraca Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kandungan Lemak dari 9 kelompok pangan (Aplikasi NBM dari Bapanas)

Ukuran

Jumlah

Satuan

gr/kapita/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Angka Konsumsi Energi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Konsumsi Energi adalah Ketersediaan energi dan zat gizi yang dihasilkan dari 9 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. 9 Kelompok bahan makan tersebut mencakup padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur & buah, lain-lain.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Angka konsumsi energi menggambarkan jumlah energi yang tersedia dan dikonsumsi dalam bentuk makanan oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi angka konsumsi energi, maka semakin banyak energi yang dikonsumsi oleh masyarakat dari 9 kelompok pangan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Release WNPG (Widyalakarya Nasional Pangan dan Gizi) |
| Ukuran | Angka |
| Satuan | kkal/kapita/hari |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Angka Konsumsi Protein

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka konsumsi protein adalah Jumlah protein dari 9 kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat. 9 Kelompok pangan tersebut mencakup padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur & buah, lain-lain.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Angka konsumsi protein menggambarkan jumlah protein yang tersedia dan dikonsumsi dalam bentuk makanan oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi angka konsumsi protein, maka semakin banyak protein yang dikonsumsi oleh masyarakat dari 9 kelompok pangan tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kandungan Protein dari 9 kelompok pangan (Aplikasi NBM dari Bapanas)

Ukuran

Angka

Satuan

gr/kapita/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Angka Kecukupan Gizi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka Kecukupan Gizi adalah Angka yang menunjukkan besarnya energi dan protein dari pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi Angka Kecukupan Gizi (AKG), maka semakin tinggi kebutuhan nutrisi yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh individu. Artinya, AKG yang tinggi menunjukkan bahwa individu membutuhkan lebih banyak energi, protein, vitamin, dan mineral dari makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Release WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi)

Ukuran

Angka

Satuan

kkal/kapita/hari dan gr/kapita/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sampel PSAT yang Diuji

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sampel PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang Diuji adalah Sampel sayuran dan buah segar yang diuji untuk memastikan PSAT yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi masyarakat. PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan setelah mengalami pengolahan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Sejak banyak jumlah sampel PSAT yang diuji, maka semakin representatif hasil pengujian tersebut terhadap kondisi keseluruhan produk pangan segar yang beredar di pasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sampel

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sampel PSAT Aman

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sampel PSAT Aman adalah Sampel PSAT yang bebas pestisida.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah sampel PSAT yang aman yang ditemukan melalui pengujian, semakin menunjukkan bahwa produk pangan segar yang beredar di pasaran umumnya memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sampel

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase PSAT Aman

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase PSAT Aman adalah Perbandingan antara jumlah sampel pangan segar aman dengan jumlah sampel pangan segar yang diuji.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase PSAT yang dinyatakan aman melalui pengujian, semakin menunjukkan bahwa mayoritas produk pangan segar yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa produk pangan segar umumnya aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = jumlah sampel PSAT aman

J2 = Jumlah Total PSAT

Ukuran

Persentase

Satuan

persen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sertifikasi PSAT

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Sertifikasi PSAT adalah Jumlah sertifikasi diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan diantaranya:

1. Jumlah Sertifikasi Prima 1 Penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah terhadap lingkungan
2. Jumlah Sertifikasi Prima 2 Penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik
3. Jumlah Sertifikasi Prima 3 Penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan
Semakin banyak sertifikasi PSAT yang terbit, semakin banyak produk PSAT yang dijamin aman.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | komoditas |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Ketersediaan Beras

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketersediaan Beras adalah Jumlah kuantitas beras yang tersedia di suatu wilayah hasil produksi dan cadangan pangan serta impor.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah ketersediaan beras yang cukup, penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan berarti wilayah tersebut memiliki cukup persediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Ketersediaan} = (P+P_m) - (K+P_k)$$

Keterangan:

P = Produksi

Pm = pangan masuk dari daerah lain

K = Konsumsi

Pk = pangan keluar daerah

Berat

Ukuran

Satuan

Ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ketersediaan Jagung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketersediaan Jagung adalah Jumlah kuantitas jagung yang tersedia di suatu wilayah hasil produksi dan cadangan pangan serta impor.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah ketersediaan jagung yang cukup, penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan berarti wilayah tersebut memiliki cukup persediaan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Ketersediaan} = (P + P_m) - (K + P_k)$$

Keterangan:

P = Produksi

Pm = pangan masuk dari daerah lain

K = Konsumsi

Pk = pangan keluar daerah

Berat

Ukuran

Ton

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ketersediaan Kedelai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketersediaan Kedelai adalah Jumlah kuantitas kedelai yang tersedia di suatu wilayah hasil produksi dan cadangan pangan serta impor.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah ketersediaan kedelai yang cukup, penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan berarti wilayah tersebut memiliki cukup persediaan kedelai untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Ketersediaan} = (P+P_m) - (K+P_k)$$

Keterangan:

P = Produksi

Pm = pangan masuk dari daerah lain

K = Konsumsi

Pk = pangan keluar daerah

Berat

Ukuran

Ton

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Ketersediaan Gula

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketersediaan Gula adalah Jumlah kuantitas gula yang tersedia di suatu wilayah hasil produksi dan cadangan pangan serta impor.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah ketersediaan gula yang cukup, penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan berarti wilayah tersebut memiliki cukup persediaan gula untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Ketersediaan} = (P + P_m) - (K + P_k)$$

Keterangan:

P = Produksi

Pm = pangan masuk dari daerah lain

K = Konsumsi

Pk = pangan keluar daerah

Berat

Ukuran

Ton

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kebutuhan Beras

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kebutuhan Beras adalah Jumlah kuantitas beras yang dibutuhkan di suatu wilayah baik untuk kebutuhan konsumsi, industri maupun kebutuhan lainnya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kebutuhan beras, maka semakin besar permintaan akan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu wilayah atau populasi. Jika kebutuhan beras melebihi produksi beras, maka ketahanan pangan suatu wilayah menjadi tantangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Kebutuhan} = (\text{Konsumsi} + \text{Industri} + \text{Kebutuhan lain})$$

Ukuran

Berat

Satuan

Ton

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Kebutuhan Jagung

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kebutuhan Jagung adalah Jumlah kuantitas jagung yang dibutuhkan di suatu wilayah baik untuk kebutuhan konsumsi, industri maupun kebutuhan lainnya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kebutuhan jagung, maka semakin besar permintaan akan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu wilayah atau populasi. Jika kebutuhan jagung melebihi produksi jagung, maka ketahanan pangan suatu wilayah menjadi tantangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Kebutuhan} = (\text{Konsumsi} + \text{Industri} + \text{Kebutuhan lain})$$

Ukuran

Berat

Satuan

Ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kebutuhan Kedelai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kebutuhan Kedelai adalah Jumlah kuantitas kedelai yang dibutuhkan di suatu wilayah baik untuk kebutuhan konsumsi, industri maupun kebutuhan lainnya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kebutuhan kedelai, maka semakin besar permintaan akan kedelai untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu wilayah atau populasi. Jika kebutuhan kedelai melebihi produksi kedelai, maka ketahanan pangan suatu wilayah menjadi tantangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Kebutuhan} = (\text{Konsumsi} + \text{Industri} + \text{Kebutuhan lain})$$

Ukuran

Berat

Satuan

Ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kebutuhan Gula

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kebutuhan Gula adalah Jumlah kuantitas gula yang dibutuhkan di suatu wilayah baik untuk kebutuhan konsumsi, industri maupun kebutuhan lainnya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah kebutuhan gula, maka semakin besar permintaan akan gula untuk memenuhi kebutuhan pangan suatu wilayah atau populasi. Jika kebutuhan gula melebihi produksi gula, maka ketahanan pangan suatu wilayah menjadi tantangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan dan Kebutuhan Kelompok Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{Kebutuhan} = (\text{Konsumsi} + \text{Industri} + \text{Kebutuhan lain})$$

Ukuran

Berat

Satuan

Ton

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Lumbung Pangan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lumbung Pangan adalah Sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pokok sebagai cadangan pangan untuk antisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat dan gangguan produksi pada musim kemarau. Jumlah lumbung pangan merujuk pada jumlah lumbung pangan yang beroperasi/berjalan di suatu area/wilayah tertentu, baik yang memiliki fisik lumbung/ belum memiliki fisik lumbung.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Dengan adanya banyak lumbung pangan dan cadangan pangan yang cukup besar, wilayah tersebut memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lumbung pangan yang beroperasi/berjalan di suatu area/wilayah tertentu, baik yang memiliki fisik lumbung/ belum memiliki fisik lumbung.

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah adalah Jumlah lumbung pangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ada di wilayah Purbalingga.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jumlah lumbung pangan mencerminkan kapasitas cadangan pangan yang dimiliki pemerintah. Semakin banyak gudang atau lumbung pangan yang dimiliki, semakin besar kapasitas cadangan pangan yang dapat disimpan oleh pemerintah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik Pemkab Purbalingga yg ada di wilayah Kab.Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Baik adalah Jumlah lumbung atau gudang pangan milik pemerintah yang lantai jemur dan sarana prasarana lainnya bisa berfungsi dan digunakan sebagaimana fungsinya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Dengan adanya banyak lumbung pangan yang dalam kondisi baik, Pemerintah memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan cadangan pangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik Pemkab Pbg dlm kondisi baik

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Rusak

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Rusak adalah Jumlah lumbung atau gudang pangan milik pemerintah yang lantai jemur dan sarana prasarananya tidak bisa digunakan dengan baik.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Jika banyak lumbung pangan rusak, kapasitas penyimpanan pangan yang tersedia akan berkurang. Hal ini berarti pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyimpan cadangan pangan yang mencukupi untuk menghadapi krisis pangan atau situasi darurat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik Pemkab Pbg dlm kondisi rusak

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Pemerintah Kondisi Buruk adalah Jumlah lumbung pangan milik pemerintah yang sarana dan prasaranaanya mengalami kerusakan parah atau cacat yang serius, sehingga menyebabkan infrastruktur tersebut tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Pangan

Semakin banyak jumlah lumbung pangan milik pemerintah dalam kondisi buruk, maka semakin besar tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik Pemkab Pbg dlm kondisi buruk

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta adalah Jumlah lumbung pangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah atau entitas publik.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Dengan adanya lebih banyak lumbung pangan milik swasta, kapasitas penyimpanan pangan secara keseluruhan dapat meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik swasta

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta Kondisi Baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta Kondisi Baik adalah Jumlah lumbung atau gudang pangan milik swasta yang lantai jemur dan sarana prasarana lainnya bisa berfungsi dan digunakan sebagaimana fungsinya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah lumbung pangan milik swasta dalam kondisi baik, maka semakin besar potensi kontribusi sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan pasokan pangan yang mencukupi bagi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik swasta dlm kondisi baik

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta Kondisi Buruk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Gudang/ Lumbung Pangan Milik Swasta Kondisi Buruk adalah Jumlah lumbung pangan milik swasta yang sarana dan prasarananya mengalami kerusakan parah atau cacat yang serius, sehingga menyebabkan infrastruktur tersebut tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Pangan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah lumbung pangan milik swasta dalam kondisi buruk, maka semakin besar tantangan dan masalah yang dihadapi oleh sektor swasta dan potensi dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dan pasokan pangan suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pergudangan Lumbung Pangan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sejumlah lumbung pangan milik swasta dlm kondisi buruk

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Produksi Ikan Tangkap

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produksi Ikan Tangkap adalah Semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi jumlah produksi ikan tangkap, menunjukkan ketersediaan ikan di perairan umum. Produksi ikan tangkap merupakan bagian dari produksi ikan di Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$PI = \bar{P} \times JN$$

$$\bar{P} = \frac{PS}{JT} \times JS \times JI$$

Keterangan:

PI = Produksi Ikan

\bar{P} = Produksi rata-rata

PS = Produksi Sampel

JT = Jumlah Trip

JS = Jumlah Sample



JI = Jumlah Ikan yang dijual

JN = Jumlah rumah tangga nelayan

(Produksi sampel dibagi jumlah trip kali jumlah sampel dikalikan jumlah ikan yang dijual, kemudian produksi rata-rata dikalikan dengan jumlah rumah tangga nelayan.)

Ukuran

Berat

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Ikan Budidaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produksi Ikan Budidaya adalah Semua hasil budidaya ikan/binatang air lainnya yang dipanen dari dari tempat pemeliharaan yang diusahakan perusahaan perikanan, maupun rumah tangga perikanan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi ikan budidaya, maka usaha budidaya ikan semakin baik. Sehingga dapat meningkatkan ketersediaan ikan di Kabupaten Purbalingga dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$P = L \times \bar{P}$$

Keterangan:

P = Produksi Ikan

L = Luas lahan yang produktif

\bar{P} = produktivitas rata rata ikan per meter persegi

Ukuran

Berat

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Olahan Ikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produksi Olahan Ikan adalah Semua hasil olahan yang berasal dari ikan yang bisa dikonsumsi

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi olahan ikan maka usaha olahan ikan di Kabupaten Purbalingga semakin baik, dan diversifikasi olahan ikan semakin beragam sehingga meningkatkan kesejahteraan para pengolah ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$P = \bar{P} \times JP$$

Keterangan:

\bar{P} = jumlah rata -rata produksi olahan ikan perhari

JP = jumlah hari produksi selama sebulan

Ukuran

Berat

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Ikan Hias

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produksi Ikan Hias adalah Semua hasil budidaya ikan hias yang dipanen dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi budidaya ikan hias dihitung dalam bentuk jumlah ekor ikan hias budidaya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi jumlah produksi ikan hias, maka usaha ikan hias di Kabupaten Purbalingga semakin baik, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$P = L \times \bar{P}$$

Keterangan:

P = Produksi Ikan

L = Luas lahan yang produktif

\bar{P} = produktivitas rata rata ikan per meter persegi

Jumlah

ribu ekor

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Ya



Jumlah Produksi Benih Ikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produksi Benih Ikan adalah Semua hasil benih ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi benih dihitung dalam bentuk ekor benih ikan hasil budidaya.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi benih ikan, menunjukkan usaha pemberian ikan di Kabupaten Purbalingga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$P = L \times \bar{P}$$

Keterangan:

P = Produksi Ikan

L = Luas lahan yang produktif

\bar{P} = produktivitas rata rata ikan per meter persegi

Jumlah

ribu ekor

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk adalah Jumlah ikan yang dikonsumsi oleh manusia baik secara tunggal maupun beragam yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per tahun.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat konsumsi ikan berarti kesadaran masyarakat terhadap kandungan gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan semakin meningkat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Kabupaten Purbalingga (Kg/Kapita/Tahun)

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$AKI = A + B + C$$

Keterangan:

A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT)

B = Konsumsi Luar Rumah Tangga

C = Konsumsi Tidak Tercatat

berat

kg/kapita/tahun

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar adalah Jumlah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan untuk memelihara, membesarakan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi Jumlah pembudidaya ikan air tawar maka semakin meningkat minat masyarakat terhadap sektor perikanan dan diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan seluruh pembudidaya ikan pada semua kecamatan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pengolahan Ikan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pengolahan Ikan Air Tawar adalah Jumlah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah pengolah ikan air tawar maka semakin meningkat minat masyarakat terhadap sektor perikanan dan diharapkan dapat meningkatkan produksi olahan ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengolah = penjumlahan seluruh pengolah air tawar pada semua kecamatan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Ikan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Produksi Ikan Air Tawar adalah Jumlah semua ikan yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan/ rumah tangga perikanan budidaya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi ikan air tawar, maka usaha budidaya ikan semakin baik. Sehingga dapat meningkatkan ketersediaan ikan di Kabupaten Purbalingga dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah produksi Ikan konsumsi = penjumlahan produksi seluruh komoditas ikan air tawar pada semua kecamatan

Ukuran

Berat

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Olahan Ikan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Olahan Ikan Air Tawar adalah Jumlah semua hasil olahan ikan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi jumlah produksi olahan ikan maka usaha olahan ikan di Kabupaten Purbalingga semakin baik, dan diversifikasi olahan ikan semakin beragam sehingga meningkatkan kesejahteraan para pengolah ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah olahan = penjumlahan produksi olahan seluruh komoditas ikan air tawar pada semua kecamatan

Ukuran

Berat

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Nilai Produksi Ikan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Nilai Produksi Ikan Air Tawar adalah Total nilai ekonomi dari seluruh hasil budidaya ikan air tawar yang dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan/ rumah tangga perikanan budidaya

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi nilai produksi ikan air tawar, maka dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai produksi Ikan konsumsi = jumlah produksi seluruh komoditas ikan air tawar pada semua kecamatan dikalikan harga produsen

Ukuran

Nilai

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Nilai Olahan Peranakan Air Tawar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Nilai Olahan Peranakan Air Tawar adalah Total nilai ekonomi dari seluruh hasil olahan ikan air tawar yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi nilai olahan perikanan air tawar, maka dapat meningkatkan pendapatan para pengolah ikan air tawar

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai produksi Ikanolahan = jumlah produksi olahan pada semua kecamatan dikalikan harga produsen

Ukuran

Nilai

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah balai Benih Ikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah balai Benih Ikan adalah Jumlah seluruh balai benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan dan pemberian ikan

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Dengan adanya lebih banyak balai benih ikan, akan lebih banyak benih ikan yang diproduksi dan disebarluaskan ke perairan alami. Hal ini dapat meningkatkan produksi ikan secara keseluruhan, baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk pemberian ikan dalam budidaya

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemberian Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah balai benih ikan = penjumlahan seluruh balai benih ikan pada satu kabupaten

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah pemberian Ikan Rakyat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah pemberian Ikan Rakyat adalah Jumlah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan untuk membenihkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi jumlah pemberian ikan rakyat maka semakin meningkat minat masyarakat terhadap sektor perikanan dan diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemberian Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Penjumlahan seluruh pemberian ikan pada semua kecamatan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Usaha Benih Ikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Produksi Usaha Benih Ikan adalah Jumlah semua hasil produksi benih ikan yang dipanen dari balai benih ikan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi benih ikan yang dihasilkan oleh balai benih ikan maka ketersediaan benih ikan berkualitas semakin banyak

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pembenihan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah produksi benih ikan = penjumlahan produksi benih ikan pada balai benih ikan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ekor

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Produksi Pemberian Benih Ikan Rakyat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Produksi Pemberian Benih Ikan Rakyat adalah Jumlah semua hasil produksi benih ikan yang dipanen dari unit pemberian benih ikan pada semua kecamatan

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah produksi benih ikan, menunjukkan usaha pemberian benih ikan di Kabupaten Purbalingga semakin baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemberian Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah produksi benih ikan = penjumlahan produksi benih ikan pada semua kecamatan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Ekor

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Nilai Produksi Usaha Benih Ikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Nilai Produksi Usaha Benih Ikan adalah Total nilai ekonomi dari hasil produksi benih ikan yang dihasilkan dari kegiatan usaha pembenihan ikan.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator

Aspek Kelautan dan Perikanan

Interpretasi

Semakin tinggi nilai produksi benih ikan air tawar, maka dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pembenihan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai produksi benih ikan = jumlah produksi benih ikan seluruh komoditas ikan air tawar pada balai benih ikan dikalikan harga produsen

Ukuran

Nilai

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Nilai Produksi Pemberian Ikan Rakyat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Nilai Produksi Pemberian Ikan Rakyat adalah Total nilai ekonomi dari hasil produksi benih ikan yang dihasilkan oleh usaha pemberian ikan skala kecil atau oleh masyarakat lokal.

Unit Penyelenggara

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Kelautan dan Perikanan
Semakin tinggi nilai produksi pemberian ikan rakyat dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemberian Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Nilai produksi benih ikan = jumlah produksi benih ikan seluruh komoditas ikan air tawar pada semua kecamatan dikalikan harga produsen

Ukuran

Nilai

Satuan

Rp

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Indeks Kualitas Air (IKA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Kualitas Air adalah Pengukuran kualitas air dilakukan pada air sungai dengan sampel mewakili sungai bagian hulu, menengah dan hilir dan pada musim kemarau dan penghujan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Kategori Indeks Kualitas Air (IKA) diklasifikasikan menjadi:

1. Angka rentang $90 \leq x \leq 100$, Sangat baik
2. Angka rentang $70 \leq x \leq 90$, Baik
3. Angka rentang $50 \leq x \leq 70$, Sedang
4. Angka rentang $25 \leq x \leq 50$, Kurang
5. Angka rentang $0 \leq x \leq 25$, Sangat Kurang

Data IKA dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$IKA = \frac{\text{(Percentase Jumlah Titik Pantau Air Sungai)}}{\text{Indeks}}$



Pencemaran Air x Koefisien)

Keterangan:

- Status Memenuhi memiliki koefisien 70
- Status Cemar Ringan memiliki koefisien 50
- Status Cemar Sedang memiliki koefisien 30
- Status Cemar Berat memiliki koefisien 10

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Indeks |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Indeks Kualitas Udara (IKU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Indeks Kualitas Udara adalah Suatu nilai yang menunjukkan tingkat pencemaran udara di suatu daerah Dinas Lingkungan Hidup Aspek Lingkungan Hidup Kategori Indeks Kualitas Udara (IKU) diklasifikasikan menjadi :

1. Angka rentang $90 \leq x \leq 100$, Sangat baik
2. Angka rentang $70 \leq x \leq 90$, Baik
3. Angka rentang $50 \leq x \leq 70$, Sedang
4. Angka rentang $25 \leq x \leq 50$, Kurang
5. Angka rentang $0 \leq x \leq 25$, Sangat Kurang

Data IKU dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

$$IEU = Indeks NO_2 - \frac{Indeks SO_2}{2}$$

$$Indeks NO_2 = \frac{Rata - rata NO_2}{Baku Mutu Eu}$$



$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata} - \text{rata } SO_2}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

Keterangan:

Rata-rata NO_2 = Rerata hasil pengukuran NO_2 dari 4 lokasi

Rata-rata SO_2 = Rerata hasil pengukuran SO_2 dari 4 lokasi

Indeks

Indeks

| | |
|------------------|-------|
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Apakah Indikator | Dapat |
| Diakses Umum | Tidak |



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diklasifikasikan menjadi :

1. Angka rentang $90 \leq x \leq 100$, Sangat baik
2. Angka rentang $70 \leq x \leq 90$, Baik
3. Angka rentang $50 \leq x \leq 70$, Sedang
4. Angka rentang $25 \leq x \leq 50$, Kurang
5. Angka rentang $0 \leq x \leq 25$, Sangat Kurang

Data IKTL dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$IKTL = 100 - \left(84,3 - (TL \times 100) \right) \times \frac{50}{54,3}$$



Keterangan:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota

$$LTL = (Lh) + (0,6 \times (Lb + Lrth))$$

$$+ \left(Larh \times \frac{0,6}{LW} \right)$$

Lh = Luas hutan

Lb = Luas belukar

Lrth = Luas rth

Larh = Luas area rehabilitasi hutan

Indeks

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Indeks

Indeks

Tidak



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diklasifikasikan menjadi:

1. Angka rentang $90 \leq x \leq 100$, Sangat baik
2. Angka rentang $70 \leq x \leq 90$, Baik
3. Angka rentang $50 \leq x \leq 70$, Sedang
4. Angka rentang $25 \leq x \leq 50$, Kurang
5. Angka rentang $0 \leq x \leq 25$, Sangat Kurang

Data IKLH dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$$



Keterangan :

KA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan

Lahan

Indeks

Indeks

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Tidak



Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara adalah Perubahan persentase dalam tingkat kualitas air atau udara dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Peningkatan kualitas dapat diukur dengan menggunakan indikator kualitas air dan udara yang relevan, seperti konsentrasi polutan, tingkat polusi, atau parameter lain yang mempengaruhi kualitas air dan udara.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jika persentase peningkatan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air dan pengurangan polusi udara dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Data Persentase Peningkatan Kualitas Air dan Udara dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Tingkat kualitas air dan udara (tahun n) - Tingkat kualitas air dan udara (tahun n-1) |
| Ukuran | Percentase |
| Satuan | % |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah Timbulan Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Timbulan Sampah adalah Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat perkapita per hari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak penduduk, maka jumlah timbulan sampah semakin meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berat sampah yang diukur (kg) dibagi dengan jumlah unit penghasil sampah (jiwa) dalam satu hari

Ukuran

Volume

Satuan

kg/jiwa/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sampah yang Tertangani

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Sampah yang Tertangani adalah Banyaknya sampah yang ditangani oleh OPD Kab. Purbalingga yang masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jumlah sampah yang tertangani mencerminkan kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada di suatu daerah. Jika jumlah sampah yang tertangani tinggi, hal ini menunjukkan adanya infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mengumpulkan, mengangkut, dan memproses sampah yang dihasilkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berat sampah yang diukur (kg) dibagi dengan jumlah unit penghasil sampah (jiwa) dalam satu hari

Ukuran

Volume

Satuan

kg/jiwa/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Penanganan Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penanganan Sampah adalah Cara menangani sampah mulai dari pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin tinggi cakupan penanganan sampah maka semakin banyak sampah yang dipilah, dikumpul, diolah dan diangkut ke TPA.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{ST}{JTS} \times 100\%$$

Keterangan:

ST = Sampah yang tertangani

JTS = Jumlah timbunan sampah

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pengelolaan Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengelolaan Sampah adalah Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin tinggi cakupan pengelolaan sampah, maka semakin banyak sampah yang di kelola.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Cakupan Penanganan Sampah + Cakupan Pengurangan Sampah

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Cakupan Pengurangan Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pengurangan Sampah adalah Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin tinggi cakupan pengurangan sampah maka semakin banyak sampah yang dikurangi dan menjadi bernilai ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{BBS}}{\text{JTS}} \times 100\%$$

Keterangan:

BBS = Berat sampah (ton) yang diolah di Bank Sampah atau KSM

JTS = Jumlah timbukan sampah (ton)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Truk Pengangkut Sampah (Dump Truck)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Truk Pengangkut Sampah (Dump Truck) adalah Truk pengangkut sampah yang dilengkapi dengan penutup kontainer

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya Dump Truck pengangkut sampah yang ada di Kab. Purbalingga. Semakin banyak truk pengangkut sampah yang tersedia, semakin besar kapasitas pengangkutan sampah yang dapat dilakukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Truk Container (Arm Roll)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Truk Container (Arm Roll) adalah Truk pengangkut yang dilengkapi mesin pengangkat kontainer Dinas Lingkungan Hidup Aspek Lingkungan Hidup Menunjukkan banyaknya Truck Container (Arm Roll) yang ada di Kab. Purbalingga. Semakin banyak truk container yang tersedia, semakin besar kapasitas pengangkutan sampah yang dapat dilakukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

unit

Ya



Jumlah Container

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Container adalah Wadah untuk menampung sampah dari setiap rumah masyarakat, pasar dan lain-lain.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya wadah kontainer untuk menampung sampah. Semakin banyak kontainer yang tersedia, semakin besar kapasitas penampungan sampah yang dapat diakomodasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Transfer Depo

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Transfer Depo adalah Tempat transit sampah dari kendaraan angkut bermotor/tidak bermotor ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak transfer depo, maka semakin mudah untuk memindah sampah yang akan diangkut ke TPA.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Gerobak Pengangkut Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Gerobak Pengangkut Sampah adalah Gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya gerobak sampah yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemindahan sampah. Semakin banyak gerobak pengangkut sampah yang tersedia, semakin baik aksesibilitas pengumpulan sampah di daerah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Beco

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Beco adalah Alat khusus yang dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jumlah beco yang memadai memungkinkan proses pengumpulan dan penyortiran sampah di TPA berjalan dengan lebih efisien.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Buldozer

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Buldozer adalah Traktor yang di bagian depannya dilengkapi dengan sekop logam besar (disebut bilah) yang digunakan untuk mendorong tanah, pasir, puing, atau material serupa dalam jumlah besar selama pekerjaan konstruksi atau pengolahan tanah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya Buldozer yang ada di TPA untuk memindahkan sampah. Dengan adanya jumlah buldozer yang memadai, proses pemindahan sampah di TPA dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bank Sampah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bank Sampah adalah Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan jumlah kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan sampah, semakin besar peluang untuk mencapai tujuan pembuangan sampah yang lebih berkelanjutan dan menjaga kebersihan lingkungan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya TPS yang ada di wilayah Kab. Purbalingga. Dengan tersedianya TPS yang cukup, proses pengumpulan sampah dapat dilakukan secara lebih efisien.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kapasitas TPS

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kapasitas TPS adalah Kemampuan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat setiap harinya berupa sampah organik atau non organik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin besar kapasitas TPS, maka semakin banyak sampah yang ditampung.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Panjang x Lebar x Tinggi |
| Ukuran | Volume |
| Satuan | m^3 /hari |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak TPST, maka semakin banyak sampah yang dikumpulkan, dipilah, didaur ulang dan diolah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya TPA yang ada di Kab. Purbalingga. TPA yang memadai mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas TPA adalah Luas lahan yang tersedia untuk tempat pemrosesan akhir sampah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin luas TPA, maka umur TPA semakin panjang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang x Lebar

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sampah Masuk TPA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Sampah Masuk TPA adalah Jumlah sampah yang terangkut dan terhitung jumlah berat tonasenya/timbangannya yang dibawa ke TPA

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Menunjukkan banyaknya sampah yang masuk ke TPA. Semakin tinggi jumlah sampah yang masuk, semakin besar konsumsi barang dan layanan, serta aktivitas produksi yang menghasilkan sampah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang x Lebar x Tinggi

Ukuran

Volume

Satuan

m^3 /hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Volume Sampah yang dihasilkan Rumah Tangga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Volume Sampah yang dihasilkan Rumah Tangga adalah Jumlah/berat sampah yang dihasilkan oleh Rumah Tangga

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Semakin banyak anggota dalam rumah tangga maka semakin banyak volume sampah yang dihasilkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang x Lebar x Tinggi

Ukuran

Volume

Satuan

m^3

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Volume Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Volume Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Volume sampah rumah tangga domestik yang dihasilkan

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Semakin tinggi volume sampah sejenis rumah tangga maka mengakibatkan semakin tinggi volume sampah yang harus dilayani/diolah untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang x Lebar x Tinggi

Ukuran

Volume

Satuan

m^3

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah adalah Volume/berat sampah rumah tangga yang diolah melalui pemilahan, daur ulang dengan sejenisnya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin besar volume sampah yang terolah, semakin efektif pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Persampahan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Panjang x Lebar x Tinggi

Ukuran

Volume

Satuan

m^3

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Limbah B3 Padat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) Padat adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk padat dan mengandung B3 (Bahan berbahaya dan beracun) Dinas Lingkungan Hidup Aspek Lingkungan Hidup Menunjukkan jumlah limbah B3 padat yg di hasilkan dan dilaporkan melalui laporan triwulan LB3/ aplikasi siraja.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah limbah B3 padat yang dilaporkan melalui aplikasi siraja.

Ukuran

Jumlah

Satuan

ton/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Limbah B3 Cair

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Limbah B3 Cair adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair dan mengandung B3 (Bahan berbahaya dan beracun)

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Menunjukkan jumlah limbah B3 cair yang dihasilkan dan di laporkan melalui laporan triwulan LB3/ aplikasi siraja.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data jumlah limbah B3 cair yang dilaporkan melalui aplikasi siraja.

Ukuran

Jumlah

Satuan

ton/hari

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik yang memiliki TPS LB3

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

TPS LB3 adalah Bangunan yang diperuntukan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan atau lokasi tertentu

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Jumlah perusahaan industri/pabrik yang memiliki TPS LB3 mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan regulasi terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Jika banyak perusahaan industri/pabrik yang memiliki TPS LB3, maka menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi persyaratan pengelolaan limbah LB3.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah perusahaan yang memiliki izin TPS LB3 atau menyusun dokumen Rintek LB3

Ukuran

Jumlah

Satuan

perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Memiliki Pengolahan Limbah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Memiliki Pengolahan Limbah adalah Jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki pengolahan limbah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak Perusahaan Industri/Pabrik Memiliki Pengolahan Limbah maka semakin banyak sampah yang diolah.
Data Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Memiliki Pengolahan Limbah dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

usaha/kegiatan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Tidak Memiliki Pengolahan Limbah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan industri/pabrik memiliki pengolahan limbah adalah Usaha/kegiatan yang wajib memiliki pengolahan limbah

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Semakin banyak usaha/kegiatan yang memiliki pengolahan limbah maka semakin baik sebaliknya semakin sedikit usaha/kegiatan yang memiliki pengolahan limbah maka semakin kurang baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di

Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JUWP}{JTP} \times 100\%$$

Keterangan:

JUWP = Jumlah usaha/ kegiatan yang wajib memiliki pengolahan limbah

JTP = Jumlah target pembinaan/ pengawasan usaha/ kegiatan

Jumlah

Perusahaan

Apakah Indikator Dapat
Diakses Umum

Ya



Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL,SPPL)

■ IDENTITAS INDIKATOR

| | |
|--|---|
| Konsep dan Definisi | Dokumen lingkungan adalah Dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Tujuan dengan adanya dokumen lingkungan tersebut sebagai perlindungan pada lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. |
| Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi | Dinas Lingkungan Hidup Aspek Lingkungan Hidup Menunjukkan ketaatan usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan perangkat perizinan berusaha. Data Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL,SPPL) dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga |

■ DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Data yang Dikumpulkan | Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga |
| Periodesasi | Tahunan |

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Dokumen |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan untuk prasyarat perizinan berusaha Dinas Lingkungan Hidup Aspek Lingkungan Hidup Semakin banyak usaha dan/kegiatan memiliki dokumen AMDAL semakin taat dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan prasyarat perizinan berusaha. Data jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengajuan dokumen

Ukuran

Jumlah usaha/ kegiatan

Satuan

Dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah perusahaan yang memiliki UKL-UPL

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) adalah Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar usaha prasyarat perizinan berusaha

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak usaha dan/kegiatan memiliki dokumen UKL/UPL semakin taat dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan prasyarat perizinan berusaha.
Data jumlah perusahaan yang memiliki UKL-UPL dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengajuan dokumen

Ukuran

Jumlah usaha/ kegiatan

Satuan

Dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah perusahaan yang memiliki SPPL

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SPPL (Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Semakin banyak usaha dan/kegiatan memiliki dokumen SPPL, semakin taat dalam pengelolaan lingkungan dan pemenuhan prasyarat perizinan berusaha.

Data jumlah perusahaan yang memiliki SPPL dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah pengajuan dokumen

Ukuran

Jumlah usaha/ kegiatan

Satuan

Dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis adalah Perusahaan yang menghasilkan limbah cair yang memiliki izin/persetujuan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku dan melakukan pelaporan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak usaha/kegiatan yang memiliki IPLC (Izin Lingkungan dan Izin Pembuangan Limbah Cair) maka semakin meningkatkan pelaksanaan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis.

Data jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | IPLC |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Tidak |



Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus adalah Perusahaan yang menghasilkan emisi udara dan melakukan pelaporan kegiatan/usaha sesuai dengan ketentuan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Semakin banyak perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus maka pengendalian pencemaran udara semakin baik.
Data jumlah perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Tingkat Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Analisa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada luas, sebaran, jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen (O₂). Jumlah RTH yang memadai dapat memberikan manfaat seperti penyerapan karbon, pengendalian suhu lingkungan, pengendalian air, habitat bagi flora dan fauna, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik dan bersosialisasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lokasi RTH eksisting

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RTH dikelola Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RTH dikelola pemerintah adalah RTH yang kepemilikan, pengelolaan, dan operasionalnya berada di tangan pemerintah

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Jumlah RTH yang memadai menandakan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lokasi eksisting RTH yang dikelola pemerintah

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RTH dikelola Swasta/ Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RTH dikelola Swasta/Masyarakat adalah RTH yang kepemilikan, pengelolaan, dan operasionalnya berada di tangan entitas swasta atau masyarakat. RTH yang dikelola oleh swasta/masyarakat dapat mencakup taman, taman kota, kebun botani, taman rekreasi, lahan pertanian terbuka, hutan lindung, dan area lainnya yang memenuhi kriteria sebagai ruang terbuka hijau.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jumlah RTH yang dikelola oleh swasta atau masyarakat menggambarkan tingkat partisipasi sektor swasta atau masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. RTH yang dikelola masyarakat dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH sebagai bagian dari inisiatif pelestarian lingkungan, konservasi alam, atau penghijauan perkotaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luasan RTH adalah Luas atau area yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan perkotaan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Analisa kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada luas, sebaran, jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen (O₂). Luas RTH mencerminkan komitmen dan perhatian pemerintah atau pihak terkait dalam menjaga dan melindungi ruang terbuka untuk kepentingan publik. Luas RTH yang memadai menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai aset berharga bagi lingkungan dan masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Berdasarkan luas eksisting RTH |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | ha |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Luas RTH dikelola Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas RTH dikelola Pemerintah adalah Luasan RTH yang kepemilikan, pengelolaan dan operasionalnya berada di tangan entitas swasta atau masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Luasan RTH yang dikelola oleh pemerintah mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan relaksasi. Dengan adanya luasan RTH yang memadai, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk menikmati alam, beraktivitas fisik, dan bersosialisasi dengan sesama.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan luas eksisting RTH yang dikelola oleh pemerintah

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas RTH dikelola Swasta/Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas RTH dikelola Swasta/Masyarakat adalah Luasan RTH yang kepemilikan, pengelolaan dan operasionalnya berada di tangan pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup

Luasan RTH dikelola swasta/masyarakat yang memadai dapat menunjukkan adanya upaya swasta atau partisipasi masyarakat yang kuat dalam menjaga dan memperluas ruang terbuka hijau sebagai sumber kesehatan dan kebugaran fisik dan mental.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Luas RTH

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Luas RTH adalah Perbandingan Luas RTH dengan Luas kawasan perkotaan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Persentase luas RTH yang memadai menunjukkan adanya perencanaan perkotaan yang berfokus pada keseimbangan antara perkembangan pembangunan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Ini dapat mencerminkan upaya untuk menciptakan kawasan yang nyaman, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi penduduknya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah RTH Perkotaan (Publik)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RTH Perkotaan (Publik) adalah Bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jumlah RTH Perkotaan (Publik) yang cukup dan memadai dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas lingkungan hidup di perkotaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah lokasi eksisting RTH Perkotaan/ publik

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas RTH Perkotaan (Publik)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RTH Perkotaan (Publik) adalah Bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Luasan RTH Perkotaan (Publik) yang cukup dan memadai dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas lingkungan hidup di perkotaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Berdasarkan luas eksisting RTH Perkotaan/ Publik

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Luas RTH Perkotaan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Luas RTH Perkotaan adalah Perbandingan Luas RTH perkotaan dengan Luas kawasan perkotaan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Persentase luas RTH perkotaan perlu mempertimbangkan konteks lokal, ukuran kota, dan distribusi RTH di dalamnya. Penting untuk terus memantau dan meningkatkan luas RTH perkotaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai keseimbangan yang baik antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan lingkungan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{LRK}{LKK} \times 100\%$$

Keterangan:

LRK = Luas RTH perkotaan

LKK = Luas kawasan perkotaan

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pemakaman Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemakaman Umum adalah Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Pemakaman umum perkotaan termasuk dalam salah satu bentuk ruang terbuka hijau kota, karena di area pemakaman ditanam beberapa jenis tanaman yang bertujuan sebagai peneduh

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup

Jumlah pemakaman umum yang memadai penting dalam konteks pengelolaan lingkungan dan ruang terbuka hijau. Pemakaman umum yang ditata dengan baik dapat menjadi bagian dari ruang terbuka hijau kota yang melibatkan penanaman pohon dan vegetasi, sehingga memberikan manfaat ekologis, estetika, serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemakaman Umum dikelola Pemerintah adalah Jumlah keseluruhan pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup

Dengan memiliki jumlah pemakaman umum dikelola pemerintah yang memadai, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan terjamin dalam melakukan pemakaman bagi orang yang telah meninggal. Pemerintah juga dapat memastikan standar dan kualitas pelayanan pemakaman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat adalah Jumlah keseluruhan pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh entitas swasta atau masyarakat, bukan oleh pemerintah atau lembaga publik

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Jumlah pemakaman umum yang dikelola oleh swasta atau masyarakat dapat menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan mereka dalam menyediakan fasilitas pemakaman yang memadai untuk masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Luas Pemakaman Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Pemakaman Umum adalah Ukuran atau luas area yang disediakan untuk pemakaman umum

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Luas pemakaman umum dapat memberikan gambaran tentang seberapa luas dan representatif area yang dialokasikan untuk pemakaman jenazah dalam suatu wilayah. Semakin luas pemakaman umum, semakin banyak lahan yang tersedia untuk pemakaman jenazah, dan potensial untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah adalah Ukuran atau luas area yang disediakan untuk pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Dengan memiliki luas pemakaman umum dikelola oleh pemerintah yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dan layak terhadap fasilitas pemakaman. Luas yang memadai juga memungkinkan adanya ruang yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan penduduk dan peningkatan jumlah kematian di masa depan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Luas
ha
Ya



Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat adalah Ukuran atau luas area yang disediakan untuk pemakaman umum yang dioperasikan dan dikelola oleh entitas swasta atau masyarakat

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Pemakaman umum yang dikelola swasta atau masyarakat menunjukkan adanya alternatif pengelolaan pemakaman di luar ranah pemerintah. Ini dapat memberikan variasi dalam pilihan dan penawaran layanan pemakaman kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan perawatan pemakaman

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Luas

Satuan

ha

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Energi Emisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Energi Emisi adalah Nilai penurunan emisi sektor energi pada periode tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Nilai penurunan emisi sektor energi yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari sektor energi. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari bussines as usual pada tahun 2030
Data energi emisi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus ada di aplikasi Sign Smart Gas Rumah Kaca

Ukuran

Gg CO₂ eq

Satuan

Gg CO₂ eq

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Pertanian Emisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Pertanian Emisi adalah Nilai penurunan emisi sektor pertanian pada periode tertentu

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Nilai penurunan emisi sektor pertanian yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi emisi GRK dari sektor pertanian. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual pada tahun 2030. Data pertanian emisi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus ada di aplikasi Sign Smart Gas Rumah Kaca

Ukuran

Gg CO₂ eq

Satuan

Gg CO₂ eq

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Tidak



Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) Emisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) Emisi adalah Nilai penurunan emisi dari sektor industri dan penggunaan produk (IPPU) pada periode tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Nilai penurunan emisi sektor IPPU yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi emisi GRK dari sektor industri dan penggunaan produk. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual pada tahun 2030
Data IPPU Emisi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus ada di aplikasi Sign Smart Gas Rumah Kaca

Ukuran

Gg CO₂ eq

Satuan

Gg CO₂ eq

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Limbah Emisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Limbah Emisi adalah Nilai penurunan emisi dari sektor limbah pada periode tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Nilai penurunan emisi sektor limbah yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi emisi GRK dari sektor limbah. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari bussines as usual pada tahun 2030
Data Limbah Emisi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus ada di aplikasi Sign Smart Gas Rumah Kaca

Ukuran

Gg CO₂ eq

Satuan

Gg CO₂ eq

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Kehutanan dan Penggunaan Lahan Emisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kehutanan dan Penggunaan Lahan Emisi adalah Nilai penurunan sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada periode tertentu

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Nilai penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual pada tahun 2030

Data Kehutanan dan Penggunaan Lahan Emisi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rumus ada di aplikasi Sign Smart Gas Rumah Kaca

Ukuran

Gg CO₂ eq

Satuan

Gg CO₂ eq

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Persentase Energi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Energi adalah Penurunan proporsi kontribusi sektor energi terhadap total emisi GRK suatu daerah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Penurunan Persentase Energi yang tinggi dapat menunjukkan adanya upaya pengurangan emisi GRK dalam sektor energi.

Data persentase energi dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat persentase energi (tahun n)
- Tingkat persentase energi (tahun n-1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Persentase Pertanian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Pertanian adalah Penurunan proporsi kontribusi sektor pertanian terhadap total emisi GRK suatu daerah

Unit Penyelenggara

Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Indikator

Aspek Lingkungan Hidup

Interpretasi

Penurunan Persentase Pertanian yang tinggi dapat menunjukkan adanya upaya pengurangan emisi GRK dalam sektor pertanian.

Data persentase pertanian dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat persentase pertanian (tahun n) - Tingkat persentase pertanian (tahun n-1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



Persentase Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) adalah Penurunan proporsi kontribusi emisi gas rumah kaca yang berasal dari kegiatan industri dan penggunaan produk terhadap total emisi GRK suatu daerah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Penurunan Persentase IPPU yang tinggi dapat menunjukkan adanya upaya pengurangan emisi GRK dalam sektor industri dan penggunaan produk
Data Persentase IPPU dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat persentase IPPU (tahun n) - Tingkat persentase IPPU (tahun n-1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Tidak



Persentase Kehutanan dan Penggunaan Lahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Kehutanan dan Penggunaan Lahan adalah Penurunan proporsi kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan terhadap total emisi GRK suatu daerah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Lingkungan Hidup
Aspek Lingkungan Hidup
Penurunan Persentase Kehutanan dan Penggunaan Lahan yang tinggi dapat menunjukkan adanya upaya pengurangan emisi GRK dalam sektor kehutanan dan penggunaan lahan
Data Persentase Kehutanan dan Penggunaan Lahan dapat diakses dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Besaran Emisi GRK untuk Setiap Sektor di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Tingkat persentase kehutanan dan penggunaan lahan (tahun n) - Tingkat persentase kehutanan dan penggunaan lahan (tahun n-1)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Tidak

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jumlah Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Terhitung penduduk jika memiliki dokumen ADMINDUK (Administrasi Kependudukan) Purbalingga biarpun domisili di luar Purbalingga tetap terhitung penduduk Purbalingga, bagi yang sudah berdomisili lama tetapi belum memiliki ADMINDUK Purbalingga tidak terhitung sebagai penduduk Purbalingga.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Menunjukkan jumlah penduduk ber-ADMINDUK Purbalingga. Data jumlah penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu dan mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk penyusunan basis data kependudukan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Laju Pertumbuhan Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi

- LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) > 0 berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- LPP $= 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- LPP < 0 berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Metode Geometrik

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$



Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk yang ditanya

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = Jangka waktu (tahun)

r = Laju pertumbuhan penduduk
Percentase

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

%

Ya



Kepadatan Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$KP = \frac{JP}{LW}$$

Keterangan:

KP = Kepadatan Penduduk dalam wilayah tertentu (Jiwa/km²)

JP = Jumlah Penduduk

LW = Luas Wilayah

Ukuran

Rasio

Satuan

Jiwa/km²

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Sex Ratio

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Apabila persentase di atas 100%, maka jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dan sebaliknya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$RJK = \frac{L}{P} \times k$$

Keterangan:

RJK = Rasio Jenis Kelamin

L = Jumlah penduduk laki - laki di suatu daerah

P = Jumlah penduduk perempuan di suatu daerah

k = 100 penduduk perempuan Persentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Rasio Ketergantuan Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Semakin tinggi rasio ketergantungan penduduk menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$RKP = \frac{JP1 + JP3}{JP2} \times 100$$

Keterangan:

RKP = Rasio ketergantungan penduduk



JP1 = Jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun

JP2 = Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun

JP3 = Jumlah penduduk di atas 65 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat

Ya

Diakses Umum



Rasio Ketergantungan Muda

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio ketergantungan muda adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aspek Geografi dan Demografi

Semakin tinggi rasio ketergantungan muda menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk usia muda (0-14 tahun) yang tidak produktif.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$RKM = \frac{JP1}{JP2} \times 100$$

Keterangan :

RKM = Rasio ketergantungan muda

JP1 = Jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun

JP2 = Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Rasio Ketergantungan Tua

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio ketergantungan tua adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi rasio ketergantungan tua menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tua (15-64 tahun) yang tidak produktif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kondisi Demografi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$RKT = \frac{JP3}{JP2} \times 100$$

Keterangan:

RKT = Rasio ketergantungan penduduk

JP2 = Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun

JP3 = Jumlah penduduk diatas 65 tahun

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun*

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk usia 3-6 tahun adalah penduduk usia sekolah PAUD

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun menunjukkan jumlah anak-anak dalam rentang usia yang sesuai untuk mengikuti program PAUD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Menggunakan Estimasi Statistik

$$\frac{F_k}{f_1} = \frac{(x - T_b)}{c}$$

Keterangan:

f_1 = Frekuensi Kelas

c = Panjang Kelas

T_b = Batas Bawah

Jumlah

Ukuran

jiwa

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun*

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

Penduduk usia 7-12 tahun adalah penduduk usia sekolah SD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aspek Geografi dan Demografi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun menunjukkan jumlah anak-anak dalam rentang usia yang sesuai untuk mengikuti program SD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Menggunakan Estimasi Statistik

$$\frac{F_k}{f_1} = \frac{(x - T_b)}{c}$$

Keterangan:

f_1 = Frekuensi Kelas

c = Panjang Kelas

T_b = Batas Bawah

Jumlah

jiwa

Ya



Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun*

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk usia 13-15 tahun adalah penduduk usia sekolah SMP

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun menunjukkan jumlah anak-anak dalam rentang usia yang sesuai untuk mengikuti program SMP.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Menggunakan Estimasi Statistik

$$\frac{F_k}{f_1} = \frac{(x - T_b)}{c}$$

Keterangan:

f_1 = Frekuensi Kelas

c = Panjang Kelas

T_b = Batas Bawah

Jumlah

Ukuran

jiwa

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun*

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia sekolah SMA/SMK

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun menunjukkan jumlah anak-anak dalam rentang usia yang sesuai untuk mengikuti program SMA/SMK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Menggunakan Estimasi Statistik

$$\frac{f_k}{f_1} = \frac{(x - T_b)}{c}$$

Keterangan:

f_1 = Frekuensi Kelas

c = Panjang Kelas

T_b = Batas Bawah

Ukuran

Jumlah

Satuan

jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, KK dan KIA) dan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kelahiran K2, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak)

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan

Kelompok Indikator

Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{P1 + P2}{2}$$

Keterangan:

P1 = Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk



P2 = Persentase Kepemilikan
Dokumen Pencatatan Sipil

Persentase

%

Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk adalah persentase kepemilikan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KK (Kartu Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak)

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{P1 + P2 + P3}{3}$$

Keterangan:

P1 = Persentase kepemilikan KTP-el

P2 = Persentase kepemilikan KK

P3 = Persentase kepemilikan KIA

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil adalah persentase kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan

Kelompok Indikator

Administrasi Kependudukan dan

Interpretasi

Pencatatan Sipil
Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6}{6}$$

Keterangan:

P1 = Percentase kepemilikan Akta Kelahiran (termasuk Akta Kelahiran K2/Kutipan Kedua)

P2 = Percentase kepemilikan Akta Kematian

P3 = Percentase kepemilikan Akta Perkawinan



P4 = Persentase kepemilikan Akta Perceraian

P5 = Persentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak

P6 = Persentase kepemilikan Akta Pengesahan

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Ya

Diakses Umum



Jumlah Wajib KTP-el

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Wajib KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Data ini menyediakan agregat wajib KTP-el Kabupaten Purbalingga. Jumlah wajib KTP-el mencerminkan populasi penduduk yang telah memenuhi persyaratan hukum untuk memiliki KTP-el..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Warga yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kepemilikan KTP-el

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah kepemilikan KTP-el menunjukkan jumlah warga yang sudah terekam dan memiliki KTP-el. Hal ini penting dalam administrasi kependudukan dan pelayanan publik, serta membantu pemerintah untuk mengidentifikasi dan memantau populasi penduduk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Kepemilikan KTP-el

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Kepemilikan KTP-el adalah perbandingan jumlah kepemilikan KTP-el dengan jumlah Wajib KTP-el

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan KTP-el.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Kepemilikan KTP-el

J2 = Jumlah Wajib KTP-el

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah KK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kepala Keluarga adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah kepala keluarga mencerminkan jumlah unit keluarga yang ada di Kabupaten Purbalingga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kepemilikan KK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah kepemilikan KK menunjukkan jumlah keluarga yang sudah terdaftar dan memiliki KK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

KK

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Kepemilikan KK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Kepemilikan KK adalah perbandingan jumlah kepemilikan KK dengan jumlah KK

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan KK.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J1}{J2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Kepemilikan KK

J2 = Jumlah KK

Ukuran

Jumlah

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Anak (Usia <17 tahun)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator
Interpretasi

Jumlah Anak adalah jumlah anak dengan usia di bawah 17 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aspek Geografi dan Demografi
Jumlah anak memberikan indikasi tentang kebutuhan dan permintaan akan layanan yang berkaitan dengan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, perawatan, dan perlindungan anak di Kabupaten Purbalingga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodesasi

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

orang

Ya



Jumlah Kepemilikan KIA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

KIA (Kartu Identitas Anak) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Jumlah kepemilikan KIA menunjukkan jumlah anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah memiliki KIA sebagai optimalisasi pelayanan publik, perlindungan, pendataan kependudukan, serta pemenuhan hak anak sebagai warga negara Indonesia.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah KIA

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase Kepemilikan KIA

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase Kepemilikan KIA adalah perbandingan antara jumlah kepemilikan KIA dengan jumlah anak usia 0-17 tahun

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentase maka semakin optimal perwujudan program pemerintah dalam pemberian identitas yang resmi bagi anak yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{J_1}{J_2} \times 100\%$$

Keterangan:

J1 = Jumlah Kepemilikan KIA

J2 = Jumlah Anak Usia < 17 tahun

Ukuran

Percentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta Kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Menunjukkan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta Kelahiran adalah urat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Menunjukkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Kematian yang diminta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta Kematian adalah bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aspek Geografi dan Demografi Menunjukkan jumlah pengajuan akta kematian untuk diterbitkan.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator

Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta Kematian adalah bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aspek Geografi dan Demografi

Apabila jumlahnya semakin mendekati angka jumlah akta kematian yang diminta maka menunjukkan cakupan pelayanan yang semakin baik.

Unit Penyelenggara

Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase Akta Kematian yang Diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase akta kematian yang diterbitkan adalah perbandingan jumlah akta kematian yang diterbitkan dengan jumlah akta kematian yang diminta

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan akta kematian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan

JM = Jumlah Akta Kematian yang diminta

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Perkawinan yang diminta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta perkawinan adalah pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam dengan diterbitkan berupa dokumen yang namanya Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Menunjukkan jumlah pengajuan akta perkawinan untuk diterbitkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta perkawinan adalah pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain agama Islam dengan diterbitkan berupa dokumen yang namanya Akta Perkawinan atau biasa disebut juga dengan Akta Nikah

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Apabila jumlahnya semakin mendekati angka jumlah akta perkawinan yang diminta maka menunjukkan cakupan pelayanan yang semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase akta perkawinan yang diterbitkan adalah perbandingan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dengan jumlah akta perkawinan yang diminta

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan akta perkawinan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan

JM = Jumlah Akta Perkawinan yang diminta

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Perceraian yang diminta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator
Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Menunjukkan jumlah pengajuan akta perceraian untuk diterbitkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perceraian di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah pasangan suami dan istri memperoleh salinan putusan penetapan perceraian dari pengadilan negeri.

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Apabila jumlahnya semakin mendekati angka jumlah akta perceraian yang diminta maka menunjukkan cakupan pelayanan yang semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perceraian di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase Akta Perceraian yang Diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Percentase akta perceraian yang diterbitkan adalah perbandingan jumlah akta perceraian yang diterbitkan dengan jumlah akta perceraian yang diminta

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan akta perceraian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Perceraian di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan

JM = Jumlah Akta Perceraian yang diminta

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diminta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta pengakuan anak adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Menunjukkan jumlah pengajuan akta pengakuan anak untuk diterbitkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta pengakuan anak adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator Interpretasi

Aspek Geografi dan Demografi
Apabila jumlahnya semakin mendekati angka jumlah akta pengakuan anak yang diminta maka menunjukkan cakupan pelayanan yang semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Percentase Akta Pengakuan Anak yang Diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

percentase akta pengakuan anak yang diterbitkan adalah perbandingan jumlah akta pengakuan anak yang diterbitkan dengan jumlah akta pengakuan anak yang diminta

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan akta pengakuan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan

JM = Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diminta

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diminta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta pengesahan anak adalah akta pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Menunjukkan jumlah pengajuan akta pengesahan anak untuk diterbitkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Akta pengesahan anak adalah akta pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Apabila jumlahnya semakin mendekati angka jumlah akta pengesahan anak yang diminta maka menunjukkan cakupan pelayanan yang semakin baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Akta Pengesahan Anak yang Diterbitkan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase akta pengesahan anak yang diterbitkan adalah perbandingan jumlah akta pengesahan anak yang diterbitkan dengan jumlah akta pengesahan anak yang diminta

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik cakupan pelayanan penerbitan akta pengesahan anak.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Penerbitan Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JM} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan

JM = Jumlah Akta Pengesahan Anak yang diminta

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah penduduk berdasarkan status perkawinan adalah jumlah penduduk yang diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan (belum kawin, sudah kawin, cerai hidup, cerai mati) yang tercatat di SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan)

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Data ini memberikan gambaran tentang komposisi perkawinan dalam suatu wilayah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Migrasi Keluar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Migrasi keluar adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah migrasi keluar suatu wilayah dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang memilih untuk meninggalkan tempat asal mereka..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Migrasi Masuk

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Migrasi masuk adalah perpindahan penduduk masuk menuju suatu daerah tujuan

Unit Penyelenggara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Indikator

Aspek Geografi dan Demografi

Interpretasi

Jumlah migrasi masuk dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu wilayah menarik minat orang-orang dari luar untuk pindah ke sana..

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Data Kependudukan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA



Indeks Desa Membangun (IDM)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi



Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Interpretasi

Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Dinpermasdes

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IDM digunakan untuk mengukur status perkembangan suatu desa sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

1. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072
3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
5. e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan
Status Desa di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

Keterangan:

IKS=Indeks Ketahanan Sosial

IKE =Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

Ukuran

Indeks

Satuan

Tanpa satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik Dinpermasdes

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155. Semakin banyak jumlah desa mandiri menunjukkan bahwa pembangunan desa semakin meningkat baik dari segi transportasi, infrastruktur maupun pelayanan umum yang semakin meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis Kemendes

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Maju (Pra-Sembada)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Maju (Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa maju adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,07072.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM)
dan Status Desa di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Rilis Kemendes
Jumlah
desa
ya
ya



Jumlah Desa Berkembang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM)
dan Status Desa di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis Kemendes

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Tertinggal

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih atau desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Rilis Kemendes
Jumlah
desa
ya



Jumlah Desa Swasembada

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Swasembada adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional Dinpermasdes

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Semakin banyak jumlah Desa Swasembada menunjukkan Tingkat Pendidikan, Kesadaran Kesehatan sudah cukup tinggi dan semua keperluan hidup pokok dapat disediakan desa sendiri

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis Kemendagri

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Desa Swakarya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Swakarya adalah Transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa Swakarya indikasinya antara lain : mata pencaharian desa tersebut sudah mulai beragam, tidak hanya mengandalkan sektor agraris, masyarakat desa sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Semakin banyak Jumlah Desa Swakarya menunjukan Semakin bagus indikasinya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis Kemendagri

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Swadaya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa Swadaya adalah Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa Swadaya mempunyai yang masuk kategori jarang dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan ekonomi masih bergantung pada alam seperti bertani. semakin banyak Jumlah Desa Swakarya menunjukan semakin banyak desa yang belum terkelola dengan baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Rilis Kemendagri

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Perbandingan Desa Mandiri dan Maju

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perbandingan Desa Mandiri dan Maju adalah Perbandingan Desa Kategori Desa Mandiri dan Maju dengan Total Desa di Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Desa Mandiri disebut juga Desa Sembada yaitu desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa. Sedangkan Desa Maju disebut juga Desa Pra Sembada yaitu desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak desa mandiri dan maju di Kabupaten Purbalingga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JDMM}{JD} \times 100\%$$



Keterangan:

JDMM = Jumlah desa mandiri dan maju

JD = Jumlah desa se-Kabupaten

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri adalah Jumlah Desa maju yang naik statusnya menjadi mandiri Dinpermasdes

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Aspek Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Interpretasi

Jumlah Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri menggambarkan tingkat kemajuan dan keberhasilan desa-desa maju dalam mencapai status desa mandiri

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan
Status Desa di Kabupaten
Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah desa mandiri tahun n
dikurangi Jumlah desa mandiri
tahun (n-1)

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju adalah Jumlah desa berkembang yang naik statusnya menjadi maju

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju menggambarkan tingkat kemajuan dan keberhasilan desa-desa berkembang dalam mencapai status desa maju. Semakin banyak Jumlah Desa Berkembang menjadi desa maju menunjukkan semakin tinggi tingkat kemajuan dan keberhasilan desa berkembang dalam mencapai status desa maju.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah desa berkembang tahun n dikurangi Jumlah desa berkembang tahun (n-1)

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Desa Tertinggal yang naik statusnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Interpretasi

Jumlah Desa Tertinggal yang naik statusnya adalah Desa tertinggal yang naik status ke level berikutnya Dinpermasdes

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Semakin banyak Jumlah Desa Tertinggal yang naik statusnya menggambarkan telah terjadi kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan desa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa di Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Jumlah desa tertinggal tahun n dikurangi Jumlah desa tertinggal tahun (n-1)

Jumlah

desa

ya



Jumlah Desa yang naik statusnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Desa yang naik statusnya adalah

1. Naiknya desa maju ke desa mandiri
2. Naiknya desa berkembang ke desa maju
3. Naiknya desa tertinggal ke level diatasnya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes

Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah Desa yang naik statusnya berdasarkan perhitungan IDM menggambarkan adanya peningkatan kualitas dan kemajuan dalam pembangunan di tingkat desa. Semakin banyak Jumlah Desa yang naik statusnya menunjukan meningkatnya kualitas dan kelajuan dalam pembangunan tingkat desa

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri + Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju + Jumlah Desa Tertinggal yang Naik Statusnya

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah BUMDesa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

BUMDesa adalah Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Dengan status badan hukum, BUMDesa menjadi lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya, karena status badan hukum membuat BUMDesa lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Semakin banyak jumlah BUMDesa semakin meningkat ekonomi pertumbuhan ekonomi desa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah BUMDesa Dasar + Jumlah BUMDesa Tumbuh + Jumlah BUMDesa Berkembang

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah BUMDes Dasar

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

BUMDes Dasar adalah Tingkat perkembangan BUMDes yang di nilai dari beberapa aspek yaitu: aspek usaha (bobot 25%), dampak BUMDes kepada masyarakat (bobot 20%), permodalan (bobot 15%) aturan (10%) dan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban (bobot 10%). Untuk nilai yang diperoleh BUMDesa Dasar dengan hasil skor 25 - 49

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

BUMDesa dasar belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha dan masih membutuhkan bimbingan dari pihak luar untuk memulai usaha yang tepat dan efektif

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah BUMDes Tumbuh

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

BUMDes Tumbuh adalah Tingkat perkembangan BUMDes yang di nilai dari beberapa aspek yaitu : aspek usaha (bobot 25%), dampak BUMDes kepada masyarakat (bobot 20%), permodalan (bobot 15%) aturan (10%) dan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban (bobot 10%). Penilaian BUMDesa Tumbuh dengan hasil Skor 50 - 74

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

BUMDesa menengah sudah memiliki pengalaman dalam mengelola usaha dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. BUMDesa menengah dapat menjalankan usaha dengan lebih mandiri dan dapat bersaing di pasar lokal

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah BUMDes Berkembang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

BUMDes Berkembang adalah Tingkat perkembangan BUMDes yang di nilai dari beberapa aspek yaitu: aspek usaha (bobot 25%), dampak BUMDes kepada masyarakat (bobot 20%), permodalan (bobot 15%) aturan (10%) dan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban (bobot 10%). Hasil penilaian BUMDesa Berkembang dengan hasil Skor 75 - 85

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

BUMDesa tumbuh sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola usaha dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. BUMDesa tumbuh juga dapat memperluas usahanya dengan menambah produk dan layanan baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah skor dari masing-masing aspek yang dinilai $(25+20+20+15+10+10) \%$

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Jumlah Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah desa yang terbagi di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Semakin banyak jumlah desa dapat mengindikasikan perkembangan wilayah dan administrasi yang lebih terperinci. beberapa faktor yang menyebabkan: Pemekaran wilayah, pertumbuhan populasi, pengembangan infrastruktur dan pemukiman. otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

desa

ya



Jumlah Kelurahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Terdapat 15 kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan Purbalingga sebanyak 11 kelurahan, 3 kelurahan di Kecamatan Kalimanah, dan 1 di Kecamatan Padamara.

Semakin banyak jumlah kelurahan dapat mengindikasikan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah, pemekaran wilayah, upaya peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat serta kebijakan deretribusi kekuasaan dan sumber daya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah RT

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah RT menunjukkan jumlah lembaga RT di semua wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Semakin banyak Jumlah RT menunjukkan pertumbuhan populasi di suatu wilayah atau lingkungan, telah terjadi peningkatan keberagaman, kebutuhan akan sumber daya dan peningkatan partisipasi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Rekapitulasi jumlah lembaga RT Se-Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

RT

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah RW

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

RW adalah Bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah RW menunjukkan jumlah lembaga RW di semua wilayah di Kabupaten Purbalingga.

Semakin banyak jumlah RW menunjukkan pertumbuhan atau perubahan dalam populasi dan perkembangan wilayah tersebut yang disebabkan oleh pertumbuhan Penduduk, Peluasan Wilayah dan pembangunan infrastruktur.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil rekapitulasi Jumlah lembaga RW Se-Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

RW

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Kantor Pemerintah Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kantor Pemerintah Desa adalah Kantor Kepala Desa/Lurah adalah bangunan aset desa/kelurahan yang diperuntukan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan yang tidak dimiliki oleh pribadi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Menunjukkan jumlah kantor kepala desa yang ada di 18 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Purbalingga. Semakin banyak jumlah kantor pemerintahan desa menunjukkan pertumbuhan populasi desa semakin banyak, peningkatan otonomi desa dan perluasan cakupan wilayah administratif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Aparat Pemerintah Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aparat Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Menunjukkan jumlah perangkat desa se-Kabupaten Purbalingga. Semakin banyak jumlah aparatur pemerintah desa maka akan semakin banyak urusan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat cepat teratasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil rekapitulasi Se-Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

ya



Jumlah Karang Taruna (KT)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Karang Taruna (KT) adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Menunjukkan jumlah Organisasi Karang Taruna di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Semakin banyak jumlah karang taruna semakin banyak kegiatan sosial / tanggung jawab sosial yang teratasi di masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga Kemasayarakatan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Organisasi karang taruna Desa + organisasi karang taruna kabupaten + organisasi karang taruna kecamatan

Ukuran

Jumlah

Satuan

Unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

ya



Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Jumlah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menggambarkan tingkat keaktifan dan keberadaan program PKK di suatu wilayah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Tim Penggerak PKK kelurahan yang ditetapkan dengan
SK lurah = Tim dari kelurahan + TP PKK Desa



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Jumlah

Unit

ya



Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah Organisasi/lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Salah satu fungsi LPMK adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. semakin banyak Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menunjukkan semakin banyak aspirasi masyarakat yang tersalurkan dalam pembangunan, dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

LPMK di setiap kelurahan 1 artinya ada 15 lembaga di Wilayah Kab. Purbalingga

Ukuran

Jumlah

Satuan

lembaga

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



Jumlah Program Kerjasama antar desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Program Kerjasama antar desa adalah Pengembangan perdesaan di wilayah Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa pada sektor Agribisnis dan Pariwisata. Kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Patemon.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinpermasdes
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Interpretasi

Bentuk kerja jasa antar desa antara lain kerja sama antara satu desa dengan desa yang lain dalam satu kecamatan, dan juga satu desa dengan desa yang lain antar kecamatan dalam wilayah Purbalingga. Semakin banyak Jumlah Program Kerjasama antar desa menunjukkan semakin banyak desa yang tergabung dalam kerjasama di sektor agribisnis dan pariwisata.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ada 1 kerja sama antar desa di kabupaten Purbalingga yaitu SEROJA yaitu desa Serang, Siwarak, Karangreja dan Kutabawa

Ukuran

Jumlah

Satuan

Desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS PERHUBUNGAN



Jumlah Mikro Bus

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Mikro bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 16 (enambelas) sampai 28 (dua puluh delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah mikro bus yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah mikro bus yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Angkutan Kota

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angkutan kota adalah kendaraan angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) sampai 15 (lima belas) orang

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah angkutan kota yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah angkutan kota yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Angkutan Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angkutan desa adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah angkutan desa yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah angkutan desa yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Taksi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak jumlah taksi yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah taksi yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Izin Trayek Angkutan Kota

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Izin trayek angkutan kota adalah izin untuk mengangkut orang dengan angkutan kota pada jaringan trayek.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Semakin banyak izin jaringan trayek angkutan kota yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah jaringan trayek angkutan kota yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Trayek

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Izin Trayek Angkutan Desa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Izin trayek angkutan desa adalah izin untuk mengangkut orang dengan angkutan desa pada jaringan trayek. Dinas Perhubungan Perhubungan Semakin banyak izin jaringan trayek angkutan desa yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah jaringan trayek angkutan desa yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

Trayek

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Angkutan Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak perusahaan angkutan umum yang ada maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Milik Swasta

Ukuran

Jumlah

Satuan

Perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Angkutan Umum yang Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase angkutan umum yang aktif adalah perbandingan jumlah angkutan umum (angkutan kota dan angkutan desa) dibagi jumlah kebutuhan angkutan

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin tinggi persentase angkutan umum yang aktif maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JA}{JK} \times 100\%$$

Keterangan:

JA = Jumlah angkutan umum yang aktif (angkot+angkudes)

JK = Jumlah kebutuhan angkutan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum adalah tempat kumpulan rangkaian kegiatan uji kendaraan bermotor (angkutan umum dan angkutan barang)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perhubungan

Interpretasi

Perhubungan

Serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap pelaksanaan teknis dan laik jalan. semakin banyak Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang aktif

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kendaraan Bermotor yang Lolos Uji KIR

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kendaraan bermotor yang lolos uji KIR adalah kendaraan bermotor yang lolos uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin banyak kendaraan bermotor yang lolos uji KIR menunjukkan semakin banyak kendaraan yang telah memenuhi persyaratan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Memenuhi nilai ambang batas setiap alat uji kendaraan bermotor sesuai peraturan yang berlaku

Ukuran

Jumlah

Satuan

kendaraan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) adalah kendaraan bermotor plat R Purbalingga yang wajib uji Dinas Perhubungan Perhubungan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang telah melaksanakan Pengujian dapat meningkatkan keselamatan transportasi jalan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang terdaftar di aplikasi SIM PKB

Ukuran

Jumlah

Satuan

kendaraan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Terminal Tipe A (Bobotsari)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Terminal Tipe A (Bobotsari) adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perhubungan

Interpretasi

Perhubungan

Semakin banyak jaringan trayek yang ada maka akan semakin banyak angkutan umum yaitu Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Pedesaan (ADES) yang dilayani di terminal sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah jaringan trayek yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Terminal Tipe B (Purbalingga)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Terminal Tipe B (Purbalingga) adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perhubungan

Interpretasi

Perhubungan

Semakin banyak jaringan trayek yang ada maka akan semakin banyak angkutan umum yaitu Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), dan Angkutan Pedesaan (ADES) yang dilayani di terminal sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah jaringan trayek yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Terminal Tipe C

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Terminal Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES).

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyak jaringan trayek yang ada maka akan semakin banyak angkutan umum terutama Angkutan Pedesaan (ADES) yang dilayani di terminal sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah jaringan trayek yang ada)

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Titik parkir tepi jalan adalah lokasi parkir di tepi jalan umum
Dinas Perhubungan
Perhubungan

Jika jumlah titik parkir terlalu banyak atau terlalu padat di tepi jalan, hal ini dapat mengganggu aliran lalu lintas dan menciptakan risiko kecelakaan. Sebaliknya, jika jumlah titik parkir terlalu sedikit, pengguna jalan mungkin kesulitan menemukan tempat parkir yang aman dan sesuai, yang juga dapat menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan Manual

Jumlah

titik

Ya



Rasio Konektivitas Angkutan Jalan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rasio Konektivitas Angkutan Jalan adalah hasil perkalian dari IK1 (angkutan jalan) dengan bobot angkutan jalan

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin tinggi rasio konektivitas angkutan jalan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Darat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT \times BT}{JTT} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah trayek

BT = Bobot trayek

JTT = Jumlah total trayek

Ukuran

Jumlah

Satuan

trayek

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Traffic Light

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Traffic light adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Jika terdapat banyak *traffic light* di sepanjang jalan atau di persimpangan yang padat, hal ini dapat menunjukkan bahwa area tersebut sering mengalami kemacetan dan tingkat lalu lintas yang tinggi. Interpretasi ini dapat membantu dalam perencanaan transportasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data kumulatif |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | bua |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Jumlah Warning Light

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Warning light adalah lampu yang dipasang di jalan untuk memberikan peringatan kepada pengendara tentang situasi yang berpotensi berbahaya atau kondisi khusus

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Pemasangan *warning light* yang memadai di tempat-tempat berisiko tinggi dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dengan memberikan peringatan visual kepada pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Interpretasi jumlah *warning light* jalan dapat memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk meningkatkan keamanan jalan raya dan melindungi pengguna jalan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) adalah bagian dari rambu petunjuk yang menyediakan informasi kepada pengemudi tentang tujuan dan fasilitas-fasilitas sepanjang jalan. Dengan harapan pengemudi yang belum mengenal arah tujuannya dapat memberi informasi kepada pengemudi dalam memilih jalan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jika jumlah RPPJ sangat banyak di suatu wilayah atau jalan tertentu, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat banyak informasi yang disampaikan kepada pengemudi. Hal ini bisa menandakan kompleksitas jalan, banyaknya titik perubahan arah, persimpangan, atau kondisi khusus yang harus diperhatikan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodikasi

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Data kumulatif
Jumlah
buah
Ya



Jumlah Rambu Jalan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Rambu jalan adalah tanda atau marka yang dipasang di sepanjang jalan untuk memberikan informasi, peringatan, atau perintah kepada pengendara agar dapat berkendara dengan aman dan tertib.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jika jumlah rambu jalan terlalu sedikit atau tidak memadai, pengendara mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi penting tentang jalan, seperti petunjuk arah, peringatan bahaya, atau instruksi penting lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan, kesalahan navigasi, atau risiko kecelakaan yang lebih tinggi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Guardrail

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Guardrail atau pagar pengaman jalan merupakan alat keselamatan jalan yang terbuat dari baja lembaran yang dibentuk (*forming*) dengan mesin *cold-roll* sehingga menghasilkan beam baja profil atau disebut W-Beam. Ketebalan baja juga sudah ditentukan untuk menghindari resiko terburuk bagi kendaraan yang menabraknya. Dengan ketebalan tersebut, maka beam akan lentur/flexible terhadap benturan keras dari kendaraan. Sehingga dapat memberikan keamanan pada kendaraan yang melintas pada jalan di perbukitan/tebing atau jalan yang menanjak dimana kontur tanah di sekitar badan jalan tersebut lebih rendah atau bahkan curam

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Jika jumlah *guardrail* yang terpasang di sepanjang jalan sangat sedikit atau tidak memadai, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai tanda kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Data kumulatif |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | m^2 |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Paku Marka

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Paku marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor berwarna kuning, merah maupun putih. Berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas khususnya pada cuaca gelap maupun malam hari, membatasi daerah kepentingan lalu lintas dan juga bisa sebagai tanda pengingat ketika pengendara melewati batas

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Marka jalan yang terpasang dengan baik dan menggunakan jumlah paku yang memadai akan membantu pengemudi untuk mengidentifikasi dan mengikuti jalur yang benar, memberikan petunjuk arah, atau memberikan peringatan tentang bahaya atau perubahan kondisi jalan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di

Periodikasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Traffic Cone

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Traffic cone biasa disebut sebagai kerucut lalu lintas memiliki memiliki ciri yang mudah dikenali yakni berbentuk kerucut dan memiliki warna mencolok perpaduan warna oranye dan putih. Kerucut lalu lintas sendiri pada umumnya terbuat dari karet dan plastik

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Traffic Cone digunakan oleh petugas lalu lintas atau pihak berwenang untuk memberikan petunjuk atau peringatan kepada pengendara di jalan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (rambu jalan)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (rambu jalan) adalah perbandingan antara jumlah rambu jalan yang terpasang dengan jumlah rambu yang harus tersedia

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang yang tinggi menunjukkan infrastruktur jalan dilengkapi dengan jumlah dan jenis rambu jalan yang memadai.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JT}{JH} \times 100\%$$

Keterangan:

JT = Jumlah rambu jalan yang terpasang

JH = Jumlah rambu yang harus tersedia

Ukuran

Persentase

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah sarpras perhubungan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sarpras perhubungan kondisi baik adalah sarpras perhubungan yang dinyatakan dalam kondisi yang memadai atau layak.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan

Semakin tinggi jumlah sarpras perhubungan yang berada dalam kondisi baik, semakin baik pula layanan transportasi yang dapat diberikan, termasuk kemudahan aksesibilitas, kecepatan perjalanan, dan keamanan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan Manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | buah |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase sarpras perhubungan kondisi baik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase sarpras perhubungan kondisi baik adalah perbandingan jumlah sarpras perhubungan kondisi baik dengan jumlah sarpras yang ada

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur perhubungan berada dalam kondisi yang baik mampu menyediakan layanan transportasi yang andal.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JB}{JS} \times 100\%$$

Keterangan:

JB = Jumlah sarpras perhubungan kondisi baik

JS = Jumlah sarpras yang ada

Ukuran

Persentase

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Laka Lantas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Laka lantas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Jumlah Laka Lantas menggambarkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu di suatu daerah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Dunia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban meninggal dunia adalah korban yang dipastikan meninggal sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang rendah atau menurun dapat menunjukkan tingkat keamanan lalu lintas yang relatif baik. Ini dapat mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam pengaturan lalu lintas, penegakan peraturan lalu lintas yang ketat, dan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga

Periodisasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

korban jiwa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang rendah atau menurun dapat menunjukkan tingkat keamanan jalan yang relatif baik. Hal ini bisa mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam pengaturan lalu lintas, penegakan peraturan lalu lintas yang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban meninggal dunia dan korban luka berat.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jumlah kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan yang rendah atau menurun dapat menunjukkan tingkat keamanan jalan yang relatif baik. Hal ini bisa mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam pengaturan lalu lintas, penegakan peraturan lalu lintas yang ketat, dan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Jumlah
orang
Ya



Kerugian Materiil Akibat Kecelakaan lalu lintas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kerugian materiil adalah kerugian finansial atau materiil yang timbul akibat kejadian kecelakaan di jalan raya. Kerugian ini mencakup kerusakan pada kendaraan, infrastruktur jalan, dan harta benda lainnya yang terlibat dalam kecelakaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jumlah kerugian materiil dapat memberikan gambaran tentang biaya yang diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki properti yang rusak akibat kecelakaan. Hal ini mencakup biaya perbaikan kendaraan, perbaikan infrastruktur jalan, pemulihan fasilitas publik,

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan Manual
Nominal
rupiah
Ya



Angka Kecelakaan Lalu Lintas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah total kecelakaan yang dilaporkan dan didokumentasikan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga terkait. Data ini dapat meliputi kecelakaan dengan berbagai tingkat keparahan, termasuk kecelakaan dengan korban

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang rendah atau menurun dapat menunjukkan tingkat keselamatan jalan yang relatif baik. Hal ini bisa mengindikasikan adanya upaya yang efektif dalam pengaturan lalu lintas, penegakan peraturan lalu lintas yang ketat, dan kesa

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$Rate\ of\ Accident = \frac{\text{jumlah kecelakaan}}{\text{km jalan}}$

Ukuran

Angka

Satuan

kejadian

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah LPJU yang Terpasang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

LPJU adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan
Perhubungan
Semakin kecil panjang jalan yang belum diterangi PJU maka masyarakat semakin aman dan nyaman berkegiatan di malam hari

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Pemasangan LPJU di Ruas Jalan
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Data kumulatif
Jumlah
unit
Ya



Penambahan LPJU yang Terpasang

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penambahan LPJU yang terpasang adalah jumlah lampu penerangan jalan yang baru dipasang atau ditambahkan dalam suatu wilayah atau periode waktu tertentu. (Berdasarkan data jumlah LPJU terpasang selama 5 tahun terakhir)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Perhubungan

Interpretasi

Perhubungan

Penambahan LPJU yang terpasang dapat membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan umum, terutama pada malam hari. Dengan penerangan yang baik, pengemudi dapat melihat dengan jelas dan merespons kondisi jalan dengan lebih baik, mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas akibat visibilitas yang buruk.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Pemasangan LPJU di Ruas Jalan Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data tahunan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Bandar Udara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus yang selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Semakin banyaknya rute dan jadwal penerbangan yang ada maka semakin memudahkan masyarakat umum menggunakan moda transportasi udara

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif jumlahan dari



| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|
| Ukuran | Jumlah | Bandar | Udara |
| Satuan | unit | | |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya | | |
| Umum | | | |

1. Jumlah Bandar Domestik
2. Jumlah Landasan Helicopter (Helipad)
3. Jumlah Penumpang Angkutan Udara
4. Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara



Jumlah Bandar Udara Domestik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Bandar udara domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Semakin banyaknya jumlah bandar udara domestik menunjukkan semakin banyak rute dan jadwal penerbangan yang ada maka, semakin memudahkan masyarakat umum menggunakan moda transportasi udara

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Landasan Helikopter (Helipad)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Landasan helikopter (helipad) adalah suatu area landasan pendaratan untuk helikopter

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Perhubungan

Perhubungan

Data tentang jumlah landasan helikopter mencerminkan tingkat infrastruktur yang ada untuk mendukung operasional helikopter di suatu wilayah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Penumpang Angkutan Udara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penumpang angkutan udara adalah individu yang telah melakukan perjalanan dengan pesawat terbang pada periode waktu tertentu. Ini mencakup penumpang pada penerbangan domestik dan internasional, serta penumpang pada maskapai penerbangan komersial, penerbangan kargo

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Jika jumlah penumpang angkutan udara meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat menunjukkan pertumbuhan industri penerbangan. Hal ini dapat mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat, pertumbuhan pariwisata, dan peningkatan kebutuhan bisnis dalam skala lokal, regional, atau global.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data kumulatif dari 10 November 2022 s/d 27 Desember 2022

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah barang menggunakan angkutan udara adalah berat barang yang diangkut melalui pesawat untuk pengiriman dari satu lokasi ke lokasi lain.

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Data ini mencerminkan tingkat aktivitas dan kebutuhan akan pengiriman barang melalui angkutan udara, serta menunjukkan sejauh mana moda transportasi udara digunakan dalam rantai pasokan dan distribusi barang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

ton

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Angkutan Udara

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan angkutan udara adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan pos dengan memungut pembayaran

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Jika terdapat banyak perusahaan angkutan udara, maka menunjukkan adanya beragam opsi bagi penumpang atau pengirim barang untuk memilih maskapai yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Angkatan Udara Milik Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan angkatan udara milik pemerintah adalah perusahaan atau maskapai penerbangan yang sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah.

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Data ini mencerminkan tingkat keterlibatan pemerintah dalam sektor penerbangan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Perusahaan Angkutan Udara Milik Swasta

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perusahaan angkutan udara milik swasta adalah perusahaan atau maskapai penerbangan yang sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan oleh entitas swasta atau perusahaan non-pemerintah.

Unit Penyelenggara

Dinas Perhubungan

Kelompok Indikator

Perhubungan

Interpretasi

Data ini mencerminkan tingkat partisipasi sektor swasta dalam industri penerbangan dan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kompetisi, keberagaman operator penerbangan, serta kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri penerbangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Transportasi Udara di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan Manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

perusahaan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Data Center adalah Perangkat daerah yang terhubung dengan sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin banyak perangkat daerah yang terhubung dengan data center maka pemanfaatan teknologi informasi di lingkup pemerintah daerah semakin meningkat

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

OPD

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah OPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang Terintegrasi Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah Perangkat daerah yang pelaksanaan kegiatannya menggunakan layanan TIK berupa komponen fisik, berbagai perangkat lunak dan komponen jaringan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Menunjukkan jumlah OPD yang menggunakan perangkat TIK pada kegiatan pemerintah daerah. Integrasi infrastruktur TIK dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional OPD dengan mempercepat proses, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

OPD

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Server Milik Kabupaten Purbalingga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Server adalah Suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa pengolahan dan penyimpanan data. Jenis-jenis server:

1. Tower Server (Server berbentuk pada komputer pada umumnya),
2. Rack Server (Server pemasanganya berbentuk rak),
3. Blade Server (Server lebih ringkas dan memanjang seperti penggaris).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Menunjukkan ketersediaan
infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah. Jumlah
server dapat mencerminkan
kapasitas dan skalabilitas sistem TIK
Kabupaten Purbalingga dalam
menangani volume data dan
permintaan layanan yang diperlukan.
Semakin banyak server yang dimiliki,
semakin besar kemampuan sistem
dalam mengelola dan menyediakan
layanan kepada pengguna.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | unit |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten Purbalingga adalah Lokasi yang terhubung teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik. Jaringan serat optik mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin tinggi jumlahnya maka pengembangan jaringan informasi semakin baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

lokasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Dokumen Pengelolaan TIK

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Dokumen Pengelolaan TIK adalah Dokumen arsip / alur kerja / SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam mengelola infrastruktur, aplikasi, data, dan sumber daya TIK.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah dokumen pengelolaan TIK yang ada mencerminkan seberapa terstruktur dan komprehensifnya kerangka kerja pengelolaan TIK dalam organisasi tersebut. Semakin banyak dokumen yang ada, semakin lengkap dan rinci kerangka kerja pengelolaan TIK yang diterapkan dalam organisasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dokumen

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kapasitas Bandwidth yang Tersedia

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kapasitas Bandwidth yang Tersedia adalah Besar kapasitas atau lebar pita yang tersedia untuk mentransfer data melalui jaringan komunikasi. Bandwidth merupakan ukuran jumlah data yang dapat dikirim melalui suatu jaringan dalam periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam bit per detik (bps) atau kilobit per detik (Kbps), megabit per detik (Mbps), gigabit per detik (Gbps), atau terabit per detik (Tbps).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah kapasitas bandwidth yang tersedia dapat memberikan indikasi seberapa besar aliran data yang dapat diakomodasi dan ditangani oleh jaringan. Semakin besar kapasitas bandwidth yang tersedia, semakin banyak data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu, dan semakin cepat koneksi jaringan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Mbps |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/ dikelola adalah Perangkat lunak/ aplikasi yang memiliki layanan berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Ciri aplikasi berbagi pakai adalah ketersediaan API (Application Programming Interface) secara publik Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Komunikasi dan Informatika Jika terdapat banyak aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan atau dikelola, maka dapat menunjukkan tingkat inovasi yang tinggi di sektor tersebut. Lebih banyak aplikasi berbagi pakai berarti adanya upaya untuk menciptakan fitur baru, layanan tambahan, atau solusi yang lebih baik bagi pengguna.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

aplikasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

e-Government adalah Penyelenggaraan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Peningkatan jumlah penyelenggara e-Government yang ditingkatkan kapasitasnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi digital dan memberikan layanan publik yang lebih baik dan efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah regulasi aplikasi yang terbit

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Regulasi aplikasi yang terbit adalah Peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait dengan aplikasi yang diterbitkan atau dirilis ke publik. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan, perlindungan pengguna, keamanan data, dan isu lain yang terkait dengan penggunaan aplikasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah regulasi yang terbit mencerminkan tingkat pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terhadap aplikasi. Semakin banyak regulasi yang ada, semakin besar fokus pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aplikasi agar sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

regulasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Konten Informasi Publik yang Disebarluaskan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Informasi Publik Disebarluaskan adalah Publikasi berita dan flyer tentang program penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara daring maupun luring

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan juga mencerminkan tingkat aksesibilitas informasi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah konten yang tersedia, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan memahami berbagai aspek kebijakan dan aktivitas pemerintah.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

konten

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum adalah Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berdasarkan analisis berita sesuai dengan kesimpulan isu sedang berkembang.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum dapat mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang relevan untuk memberikan masukan kepada pimpinan. Dengan melakukan analisis secara rutin dan teratur, organisasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengikuti perkembangan dan memberikan respons yang tepat waktu.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual, Tahun 2022
output aplikasi.

Ukuran

Jumlah

Satuan

rekom

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordinasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang Diberdayakan dan Dikoordinasikan adalah Jumlah pelibatan komunitas masyarakat dalam mendiseminasi/publikasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah KIM yang diberdayakan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan informasi. Semakin banyak KIM yang terlibat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagi, memperoleh, dan mengelola informasi secara aktif.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

komunitas

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Pelibatan Masyarakat Tradisional dalam Diseminasi Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Pelibatan Masyarakat Tradisional Diseminasi Informasi adalah Jumlah komunitas masyarakat tradisional yang terlibat dalam diseminasi program pemerintah (FK-Metra/ Forum Komunikasi Media Tradisional) dalam bentuk kesenian tradisional (ketoprak, drama)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Dengan melibatkan lebih banyak masyarakat tradisional, diseminasi informasi dapat mencapai lebih banyak individu dan komunitas yang terhubung dengan budaya tradisional tersebut. Hal ini dapat meningkatkan jangkauan informasi yang disampaikan dan dampaknya terhadap pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

komunitas

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Indeks Keterbukaan Informasi Publik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Penilaian dari Komisi Informasi Jawa Tengah mengenai keterbukaan informasi publik (website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), OPD yang ditunjuk, presentasi kepala daerah).

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Indeks Keterbukaan Informasi Publik memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Klasifikasi predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas:

- a) Informatif dengan nilai 90-100,
- b) Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9,
- c) Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9,
- d) Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9 dan
- e) Tidak Informatif dengan nilai < 39,9.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan dari KIP (Komisi Informasi Publik) |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Translasi/konversi dari nilai indeks keterbukaan informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Komunikasi dan Informatika Klasifikasi predikat Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas :

- a) Informatif dengan nilai 90-100,
- b) Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9,
- c) Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9,
- d) Kurang Informatif dengan nilai 40-59,9 dan
- e) Tidak Informatif dengan nilai < 39,9.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Perhitungan dari KIP
Predikat
Tanpa satuan
Ya



Jumlah Sub Domain

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sub Domain adalah Pembagian area dari website purbalinggakab.go.id.

Contoh subdomain diantaranya:

1. data.purbalinggakab.go.id
2. geoportal.purbalinggakab.go.id

Dinas Komunikasi dan Informatika

Aspek Komunikasi dan Informatika

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Semakin banyak sub domain yang ada, semakin besar skala dan lingkup sistem jaringan atau situs web yang dikelola. Jumlah sub domain yang besar dapat menunjukkan adanya diversifikasi layanan yang disediakan oleh organisasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Subdomain Yang Aktif di

Periodesasi

Kabupaten Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sub domain

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sub Domain Yang Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Subdomain Yang Aktif adalah Subdomain dari purbalinggakab.go.id yang masih digunakan dan memiliki konten, layanan, atau fungsi yang berjalan dengan baik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin banyak jumlah sub domain yang aktif maka semakin banyak layanan komunikasi dan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Subdomain Yang Aktif di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sub domain

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Sub Domain Yang Tidak Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Sub Domain Yang Tidak Aktif adalah Subdomain dari purbalinggakab.go.id yang tidak dikelola oleh OPD terkait selama 2 tahun berturut - turut

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin banyak jumlah sub domain yang tidak aktif menunjukkan rendahnya kepedulian OPD terhadap layanan komunikasi dan informasi publik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Subdomain Yang Aktif di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

sub domain

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Subdomain Yang Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Sub Domain Yang Aktif adalah Perbandingan jumlah sub domain yang aktif dengan jumlah sub domain

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Persentase sub domain yang tinggi mencerminkan ketersediaan konten dan layanan yang lebih luas bagi pengguna. Semakin tinggi persentase subdomain yang aktif, semakin banyak pilihan konten dan layanan yang tersedia untuk pengguna.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Subdomain Yang Aktif di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JSDA}{JSD} \times 100\%$$

Keterangan:

JSDA = Jumlah Sub Domain yang Aktif

JSD = Jumlah Sub Domain
Percentase

Ukuran

%

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi adalah Jumlah badan publik di Perangkat Daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 dan merupakan turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah badan publik yang melaksanakan keterbukaan informasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dan pelayanan publik. Semakin banyak badan publik yang terlibat, semakin kuat komitmen untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Badan Publik yang Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodisasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi adalah Perbandingan badan publik di perangkat daerah Kab. Purbalingga yang sudah melaksanakan UU KIP No. 14 Tahun 2008 (Turunan dari kegiatan PPID yang ada di Kabupaten Purbalingga) dengan jumlah total badan publik di perangkat daerah Kab. Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana badan publik aktif dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat secara transparan. Semakin tinggi persentase, maka semakin baik implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Badan Publik yang Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi



■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JBKI}{JBP} \times 100\%$$

Keterangan:

JBKI = Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi

JBP = Jumlah Badan Publik di Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah Catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan sesuai dengan Perbup No. 90 Tahun 2016 tentang DIP dan SK Sekda tiap tahun.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah DIP yang dipublikasikan mencerminkan komitmen pemerintah atau badan publik dalam memberikan akses terbuka terhadap informasi publik. Tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) berkontribusi dalam peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Badan Publik yang Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Daftar Informasi yang Dikecualikan

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena membutuhkan verifikasi tentang urgensi dan sensitivitas informasi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Tersedianya daftar informasi yang dikecualikan berkontribusi dalam menghindari potensi sengketa informasi semisal permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia namun tidak dicantumkan dalam daftar informasi yang dikecualikan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Badan Publik yang Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Jumlah surat permohonan informasi dari masyarakat kepada Kepala Daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Komunikasi dan Informatika Menunjukkan banyaknya permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Perhitungan manual

Jumlah

buah

Ya



Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai adalah Jumlah sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti, disidangkan di KIP Provinsi Jawa Tengah (sebanyak 6 kali)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah sengketa informasi yang selesai menggambarkan seberapa banyak sengketa informasi yang telah diselesaikan atau ditindaklanjuti secara efektif melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan perselisihan terkait akses informasi antara pihak yang mengajukan permohonan informasi dengan badan publik yang terkait.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

buah

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi adalah Persentase sengketa informasi yang telah selesai ditindaklanjuti

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin tinggi nilai persentase maka semakin baik fasilitasi tindak lanjut atas sengketa informasi yang dilaporkan

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JPPS}{JSYA} \times 100\%$$

Keterangan:

JPPS = Jumlah permohonan penyelesaian sengketa

JSYA = Jumlah sengketa yang selesai

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Indeks SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di pemerintahan. Predikat Indeks SPBE diklasifikasikan menjadi:

- a. $4,2 \leq \text{Indeks SPBE} < 5,0$ = Memuaskan
- b. $3,5 \leq \text{Indeks SPBE} < 4,2$ = Sangat Baik
- c. $2,6 \leq \text{Indeks SPBE} < 3,5$ = Baik
- d. $1,8 \leq \text{Indeks SPBE} < 2,6$ = Cukup
- e. $\text{Indeks SPBE} < 1,8$ = Kurang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodikasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Hasil PANRB
Indeks
Tanpa satuan
Ya



Predikat SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Predikat SPBE adalah Translasi/konversi dari nilai indeks SPBE
Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Predikat Indeks SPBE diklasifikasikan menjadi:

- a. $4,2 \leq \text{Indeks SPBE} < 5,0$ = Memuaskan
- b. $3,5 \leq \text{Indeks SPBE} < 4,2$ = Sangat Baik
- c. $2,6 \leq \text{Indeks SPBE} < 3,5$ = Baik
- d. $1,8 \leq \text{Indeks SPBE} < 2,6$ = Cukup
- e. $\text{Indeks SPBE} < 1,8$ = Kurang

■ DATA

Data yang Dikumpulkan
Periodesasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil PANRB |
| Ukuran | Predikat |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Domain Kebijakan SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Domain Kebijakan SPBE adalah Area penilaian pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Domain Kebijakan SPBE mencakup kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk memandu perencanaan, pengembangan, penggunaan, dan pengelolaan TIK dalam konteks pemerintahan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE
mencerminkan sejauh mana kebijakan terkait dengan SPBE telah
dikembangkan dengan baik dan
sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan pemerintah. Semakin tinggi
nilai indeksnya, semakin matang dan
komprehensif kebijakan yang ada

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodikasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil PANRB |
| Ukuran | Skor |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Domain Tata Kelola SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Domain Tata Kelola adalah Area penilaian pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Strategi dan Perencanaan, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggara SPBE. Domain Tata Kelola SPBE mencakup kerangka kerja, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk memastikan pengelolaan yang efektif, transparansi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan dalam implementasi SPBE.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE mencerminkan sejauh mana tata kelola SPBE sesuai dengan standar dan kerangka kerja yang berlaku. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik implementasi SPBE mengikuti standar tata kelola yang ditetapkan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil PANRB |
| Ukuran | Skor |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Domain Layanan SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Domain Layanan SPBE adalah Area penilaian pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek layanan Publik Berbasis Elektronik. Domain Layanan SPBE mencakup pengembangan, implementasi, pengelolaan, dan peningkatan layanan publik yang berbasis elektronik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Nilai Indeks Domain Layanan SPBE memberikan gambaran tentang sejauh mana layanan-layanan publik yang berbasis elektronik telah diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kualitas, aksesibilitas, efisiensi, keberhasilan implementasi, dan dampak yang lebih baik dalam konteks penyediaan layanan publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil PANRB |
| Ukuran | Skor |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Domain Manajemen SPBE

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Domain Manajemen SPBE adalah Area penilaian pelaksanaan SPBE yang terdiri atas aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Domain Manajemen SPBE mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE mencerminkan tingkat kematangan dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam pengelolaan SPBE. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin matang dan terstruktur manajemen SPBE yang ada.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|--------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Hasil PANRB |
| Ukuran | Skor |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Stasiun Radio

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Stasiun Radio adalah Stasiun yang memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio (dalam bentuk radiasi elektromagnetik) dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah stasiun radio menggambarkan jumlah keseluruhan stasiun radio yang beroperasi atau tersedia di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Semakin banyak jumlah stasiun radio, semakin besar kemungkinan terdapat beragam program dan konten yang ditawarkan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Telepon dan Internet di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

Stasiun

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kecamatan Terlayani Pelayanan Radio

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Kecamatan Terlayani Pelayanan Radio adalah Jumlah kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap pelayanan radio.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin banyak kecamatan yang terlayani pelayanan radio, semakin luas akses masyarakat terhadap informasi dan hiburan melalui siaran radio.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Telepon dan Internet di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Stasiun Televisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Stasiun Televisi adalah Suatu stasiun penyiaran yang menyebarkan siarannya dalam bentuk audio dan video secara bersama-sama ke televisi penerima di wilayah tertentu. Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Komunikasi dan Informatika Jumlah stasiun televisi menggambarkan jumlah keseluruhan stasiun televisi yang beroperasi atau tersedia di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Semakin banyak jumlah stasiun televisi, semakin besar kemungkinan terdapat keberagaman konten televisi yang ditawarkan kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Layanan Telepon dan Internet di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

stasiun

Ya



Jumlah Kecamatan Terlayani Stasiun Televisi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Kecamatan Terlayani Stasiun Televisi adalah Jumlah kecamatan yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap siaran televisi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Semakin banyak kecamatan yang terlayani stasiun televisi, semakin luas akses masyarakat terhadap informasi dan hiburan melalui media televisi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Telepon dan Internet di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

kecamatan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kantor Pos

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kantor Pos adalah Suatu unit pelaksana teknis yang menyediakan Jasa Pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah kantor pos menggambarkan jumlah keseluruhan kantor pos yang beroperasi atau tersedia di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Semakin banyak jumlah Kantor Pos, semakin besar kemungkinan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan pos.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Pos di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Kantor Pos Pembantu

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kantor Pos Pembantu adalah Unit Usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta kepengurusan eksplorasiannya kepada kantor pos dan giro.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah Kantor Pos Pembantu
menggambarkan jumlah keseluruhan kantor pos pembantu yang beroperasi atau tersedia di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Semakin banyak jumlah Kantor Pos Pembantu, semakin baik aksesibilitas layanan pos bagi masyarakat di daerah-daerah yang lebih kecil atau terpencil.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Pos di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler adalah Jumlah keseluruhan desa yang memiliki akses dan penerimaan yang memadai terhadap layanan telepon seluler di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Komunikasi dan Informatika
Jumlah desa terlayani telepon seluler menunjukkan tingkat aksesibilitas komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat di desa. Semakin banyak jumlah desa terlayani telepon seluler menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan layanan telepon seluler di desa-desa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Media Elektronik di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Desa Terlayani

Ukuran

Jumlah

Satuan

desa

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah BTS (Base Transceiver Station)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

BTS (Base Transceiver Station) adalah Infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Komunikasi dan Informatika Semakin banyak jumlah BTS, semakin luas cakupan jaringan seluler yang tersedia. Jumlah BTS yang tinggi menandakan upaya operator telekomunikasi dalam menyediakan jaringan yang mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk daerah terpencil atau pedesaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

■ DATA

Data yang Dikumpulkan Periodesasi

Layanan Media Elektronik di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

| | |
|--|------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah BTS |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Menara |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Jumlah Provider

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Provider adalah Pihak penyelenggara jasa Telekomunikasi yang membangun jaringan infrastruktur

Unit Penyelenggara

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok Indikator

Aspek Komunikasi dan Informatika

Interpretasi

Jumlah Provider dapat mempengaruhi cakupan layanan telekomunikasi. Dengan adanya lebih banyak Provider, kemungkinan terdapat cakupan jaringan yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil atau pedesaan yang sebelumnya mungkin kurang terlayani oleh satu atau dua Provider.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Layanan Media Elektronik di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Provider

Ukuran

Jumlah

Satuan

Provider

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Data yang Terupload

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Data yang Terupload adalah Banyaknya data statistik sektoral yang diproduksi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Instansi Vertikal di Kabupaten Purbalingga yang telah terpublikasi di Portal Satu Data Purbalingga. Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Statistik
Peningkatan jumlah data yang terupload oleh OPD dan instansi vertikal menunjukkan upaya dan komitmen mereka dalam menyediakan data statistik sektoral yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, penelitian, analisis dan perencanaan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dataset

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Data yang Seharusnya Terupload

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Data yang Seharusnya Terupload adalah Total data yang seharusnya terpublikasi (target tahunan) pada Portal Satu Data Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Statistik

Jumlah data yang diharapkan terupload dapat mencerminkan upaya untuk melakukan evaluasi kinerja sektor publik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

dataset

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga adalah Perbandingan data yang terpublikasi pada Portal Satu Data Purbalingga dibandingkan total data yang seharusnya terpublikasi pada Portal Satu Data Purbalingga

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Statistik

Interpretasi

Semakin tinggi persentase ketersediaan data, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ketersediaan data yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempublikasikan informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Ketersediaan Data Sektoral di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JDT}{JD} \times 100\%$$

Keterangan:

JDT = Jumlah Data yang terupload di Portal Satu Data Purbalingga



Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

JDT = Jumlah Data yang
Seharusnya
Percentase
%
Ya



Jumlah Total OPD

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Menunjukkan jumlah organisasi atau lembaga daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi >80 di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah Total OPD)

Ukuran

Jumlah

Satuan

OPD

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80 adalah Jumlah OPD yang memiliki nilai keamanan informasi > 80% (berdasarkan indeks KAMI). Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Menunjukkan banyaknya OPD di Kabupaten Purbalingga yang memiliki nilai keamanan informasi kategori baik. Semakin banyak jumlah OPD yang memiliki Keamanan Informasi > 80 maka semakin banyak OPD yang memiliki nilai keamanan informasi kategori baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi >80 di

Periodesasi

di Kabupaten Purbalingga

Tahunan



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual (Jumlah Total OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80) |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | OPD |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80 adalah Perbandingan Jumlah OPD yang memiliki Keamanan Informasi > 80 dengan Jumlah total OPD

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian

Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten telah mengimplementasikan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin banyak jumlah OPD yang mencapai tingkat keamanan informasi yang baik, menunjukkan komitmen dan upaya dalam melindungi data dan informasi yang mereka tangani.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi >80 di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JOPD > 80}{TOPD} \times 100\%$$

Keterangan:

JOPD = Jumlah OPD yang memiliki



nilai Keamanan Informasi >80)

TOPD = Jumlah Total OPD

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Tingkat Keamanan Informasi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Tingkat Keamanan Informasi Daerah adalah Tingkat Keamanan Informasi Daerah berdasarkan Indeks KAMI. Indeks KAMI menunjukkan tingkat Kelengkapan dan Kematangan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 dengan area penilaian meliputi : Kategori Sistem Elektronik, Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, Teknologi dan Keamanan Informasi, Suplemen.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Kategori Tingkat Keamanan
Informasi Daerah berdasarkan
Indeks KAMI diklasifikasikan
menjadi:

1. Indeks KAMI ≤ 174 = Tidak layak
2. $175 < \text{Indeks KAMI} \leq 312$ = Penuhan kerangka dasar
3. $313 < \text{Indeks KAMI} \leq 535$ = Cukup Baik
4. Indeks KAMI > 536 = Baik

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Perangkat Daerah yang
Memiliki Keamanan Informasi > 80 di
di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|--------------------------------|--|
| Metode/Rumus Penghitungan | Borang penilaian Indeks KAMI (BSSN/Badan Siber dan Sandi Negara) |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | Tanpa satuan |
| Apakah Indikator Dapat Diakses | Ya |
| Umum | |



Persentase Pengamanan Informasi Daerah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Pengamanan Informasi Daerah adalah Persentase berdasarkan Instrumentasi Evaluasi Persandian

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Menunjukkan evaluasi pengamanan informasi di pemerintah daerah yang mencakup Profil Penyelenggaraan Urusan Persandian, Kebijakan Pengamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik, Layanan Keamanan Informasi dan Pola hubungan Komunikasi Sandi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Keamanan Informasi >80 di di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Borang penilaian instrumentasi evaluasi persandian (BSSN)

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Total Aplikasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Jumlah Total Aplikasi adalah Jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Persandian Menunjukkan tingkat partisipasi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan aplikasi/perangkat lunak (bukan pihak ketiga) untuk kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Perhitungan manual

Jumlah

aplikasi

Ya



Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya adalah Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya oleh BSSN melalui proses ITSA (Information Technology Security Assessment). ITSA adalah layanan untuk menunjang keamanan dan membantu kelancaran penyelenggaraan berbagai layanan publik berbasis sistem informasi melalui pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi pengamanan untuk meminimalisir celah kerawanan yang terdapat dalam suatu sistem informasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya menunjukkan kesadaran dan komitmen dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan dan diproses oleh aplikasi tersebut.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi



■ METODOLOGI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Metode/Rumus Penghitungan | Perhitungan manual |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | aplikasi |
| Apakah Indikator Dapat Diakses Umum | Ya |



Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya adalah Perbandingan jumlah aplikasi yang diassesment oleh BSSN dengan jumlah aplikasi yang dikembangkan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Persentase ini memberikan gambaran tentang sejauh mana organisasi telah memprioritaskan dan melaksanakan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan. Persentase yang tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap pengamanan informasi dalam pengembangan aplikasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JAA}{JT} \times 100$$

Keterangan:

JAA = Jumlah aplikasi yang



Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

diassesment
informasinya.
JT =Jumlah total
Percentase
%
Ya

keamanan



Jumlah Total SDM Pengelola Persandian

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Total SDM Pengelola Persandian adalah Banyaknya SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Persandian

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Jumlah yang mencukupi dari SDM Pengelola Persandian dapat mencerminkan kapasitas operasional yang memadai dalam menjalankan fungsi pengelolaan persandian. SDM yang cukup membantu memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab pengelolaan persandian dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase SDM Pengelola

Persandian di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah Jumlah SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan kompetensi sandiman dari BSSN (Diklat Sandiman Dasar dan Muda)

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian

Jumlah yang signifikan dari SDM yang mengalami peningkatan kapasitas mencerminkan adanya investasi dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan persandian. SDM yang memiliki pengetahuan yang mutakhir dan keterampilan yang ditingkatkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas terkait persandian.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase
Persandian
Purbalingga

SDM
di

Pengelola
Kabupaten

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah Perbandingan SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan sandiman dengan total SDM Pengelola Persandian

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Komunikasi dan Informatika Aspek Persandian

Interpretasi

Persentase yang tinggi menunjukkan adanya perhatian yang serius terhadap pengelolaan persandian. SDM yang telah meningkatkan kapasitasnya dapat membawa peningkatan kualitas dalam pengelolaan persandian, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan keamanan, praktik terbaik, dan teknologi terkini.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase SDM Pengelola Persandian di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JSK}{JS} \times 100\%$$



Keterangan:

JSK = Jumlah SDM Pengelola Persandian yang Ditingkatkan Kapasitasnya

JS = Total SDM Pengelola Persandian

Ukuran Persentase

Satuan %

Apakah Indikator Dapat Diakses Ya

Umum



Jumlah Total Informasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Total Informasi adalah Jumlah surat masuk melewati email Sanapati. Email Sanapati merupakan layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian

Jumlah total informasi yang melewati email Sanapati mencerminkan tingkat penggunaan email yang aman dalam pertukaran informasi. Fitur close group pada email Sanapati membatasi pengiriman dan penerimaan email hanya kepada pengguna yang juga menggunakan email Sanapati, mengurangi risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Layanan Penggunaan Jaringan Komunikasi Sandi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual

Ukuran

Jumlah

Satuan

informasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi adalah Jumlah informasi yang didistribusikan ke OPD melalui Jaringan Komunikasi Sandi yang merupakan keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Semakin tinggi jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi maka semakin baik pemanfaatan jaring komunikasi sandi sebagai penyebarluasan informasi ke OPD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Layanan Penggunaan Jaringan Komunikasi Sandi di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan manual (Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi)

Ukuran

Jumlah

Satuan

informasi

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi adalah Perbandingan jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi dengan total informasi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator
Interpretasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Aspek Persandian
Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi cakupan keamanan dalam penyebarluasan informasi OPD.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Layanan Penggunaan Jaringan Komunikasi Sandi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JOPD}{JIES} \times 100\%$$

Keterangan:

JOPD = Jumlah informasi yang didistribusikan ke OPD

JIES = Jumlah total informasi yang diterima oleh email sanapati

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya



METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOPERASI DAN UMKM



Jumlah Koperasi

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar keluargaan.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi menggambarkan jumlah total koperasi yang beroperasi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Semakin banyak jumlah koperasi menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu lembaga yang dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas ekonominya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi di data ODS (Online Data System) Real Time

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Aktif Koperasi dengan beberapa kriteria seperti masih melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), masih menyetorkan laporan bulanan dan ada aktivitas ekonomi di dalamnya serta masih melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Koperasi dirasakan manfaatnya saat koperasi tersebut aktif menjalankan usahanya dan melayani anggota sesuai kebutuhan masing-masing. Saat omset koperasi meningkat maka keuntungan koperasi juga meningkat, sehingga hasil diterima anggota yg meningkat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Dinyatakan Aktif sesuai dengan Permenkop No. 25 tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Persentase Koperasi Aktif

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Koperasi Aktif
Perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah total koperasi

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Kemanfaatan koperasi pada suatu daerah bukan dari berapa jumlah koperasi yg ada, tapi seberapa besar persentase koperasi yg aktif. Jadi bukan dari kuantitas tapi dari kualitas koperasi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif maka hasil yang diperoleh juga semakin tinggi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Koperasi Aktif di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum



Jumlah Koperasi Sehat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Sehat Koperasi yang secara keuangan dan kelembagaan dinyatakan sehat dari hasil KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi). KKPKK mencakup tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Semakin tinggi skor hasil penilaian kesehatan yg ditunjuk KKPKK maka koperasi tersebut semakin sehat.

1. $80 \leq$ skor penilaian ≤ 100 dikategorikan sehat
 2. $66 \leq$ skor penilaian ≤ 80 dikategorikan cukup sehat
 3. $51 \leq$ skor penilaian ≤ 66 dikategorikan dalam pengawasan
 4. skor penilaian < 51 dikategorikan dalam pengawasan khusus.
- (Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman KKPKK)

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Percentase Koperasi Sehat di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil dari Penilaian KKPKK

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Persentase Koperasi Sehat

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Koperasi Sehat
Perbandingan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi aktif

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Persentase koperasi sehat dapat digunakan sebagai indikator kualitas dan keberhasilan koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bila persentase koperasi sehat lebih tinggi, maka dampak positif terhadap anggota koperasi dan masyarakat semakin besar.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Purbalingga Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$$

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas Koperasi berdasarkan hasil dari penilaian tim monev memenuhi persyaratan sesuai UU No. 21 Tahun 2015 tentang Perkoperasian dan hasil penilaian KKP KK

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Interpretasi

Penilaian koperasi kategori berkualitas/sangat berkualitas adalah sebuah penilaian terhadap kepatuhan koperasi pada prinsip-prinsip koperasi. Bila 7 prinsip koperasi benar-benar dijalankan dengan baik, maka skor penilaian kualitas koperasi semakin tinggi dan kelembagaan semakin baik.

7 prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2015 adalah

1. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
2. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian;
6. pendidikan perkoperasian;
7. kerja sama antar koperasi.



■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Periodikasi

Percentase Koperasi Sehat di
Kabupaten Purbalingga
Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Ukuran

Satuan

Apakah Indikator Dapat Diakses

Umum

Hasil Penilaian Monev

Jumlah

unit

Ya



Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas Perbandingan antara jumlah Koperasi kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas dengan jumlah Koperasi Aktif

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah koperasi berkualitas. Semakin banyak koperasi berkualitas, maka anggota dilayani dengan baik dan mendapat hasil baik.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

$$\frac{JKABB}{JKA} \times 100\%$$

Keterangan:

JKABB = Jumlah koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas
JKA = Jumlah koperasi aktif

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Ya



Jumlah Koperasi Produsen

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi produsen Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah koperasi produsen, maka semakin banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) yg dibantu di sektor riilnya.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi produksi hasil pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Koperasi Produsen Dibantu Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi produsen dibantu pemerintah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat dimana permodalan dibantu pemerintah dalam rangka menguatkan us

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi produsen yang dibantu oleh pemerintah dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung sektor koperasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten
Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Produsen Kepemilikan Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi produsen kepemilikan mandiri Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat yang permodalannya dari anggota

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi produsen kepemilikan mandiri mencerminkan tingkat partisipasi anggota dan kontrol yang dimiliki oleh mereka dalam pengelolaan koperasi. Jika jumlah koperasi produsen kepemilikan mandiri tinggi, maka menunjukkan adanya keterlibatan kuat anggota koperasi dalam mengelola dan mengendalikan usaha mereka sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan
Jumlah
unit
Ya



Jumlah Koperasi Konsumen

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi konsumen Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat, dimana anggotanya adalah pengguna akhir dari barang-barang yang disediakan koperasi.

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi konsumen dapat mencerminkan seberapa populer atau berkembangnya model koperasi konsumen dalam suatu wilayah

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Konsumen Dibantu Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Konsumen Dibantu Pemerintah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat yang permodalannya dibantu pemerintah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi konsumen yang dibantu oleh pemerintah dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung sektor koperasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Koperasi Konsumen Kepemilikan Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Konsumen Kepemilikan Mandiri Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat yang permodalannya dari anggota

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi konsumen kepemilikan mandiri dapat mencerminkan seberapa luasnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan koperasi. Semakin tinggi jumlah koperasi konsumen kepemilikan mandiri, semakin besar peran dan tanggung jawab anggota dalam mengontrol koperasi dan memenuhi kebutuhan konsumsi mereka secara mandiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Simpan Pinjam

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Simpan Pinjam Lembaga keuangan bukan bank dengan usaha utamanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jika jumlah koperasi simpan pinjam tinggi, maka menandakan lebih banyak opsi dan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang membutuhkannya, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh institusi keuangan formal seperti bank. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi andalan bagi anggotanya dalam mengatasi masalah kekurangan modal, karena realita di lapangan masih banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang tidak bankable sehingga solusinya adalah koperasi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten

Periodikasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi hasil Pendataan manual dan dari ODS

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Dibantu Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Simpan Pinjam Dibantu Pemerintah Lembaga keuangan bukan bank dengan usaha utamanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya dimana permodalan dari pemerintah

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Semakin banyak anggota, maka kebutuhan modal untuk melayani permintaan pinjaman semakin besar. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberdayakan koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Kepemilikan Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Simpan Pinjam Kepemilikan Mandiri Lembaga keuangan bukan bank dengan usaha utamanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya dengan permodalan dari anggota

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Beberapa koperasi simpan pinjam memiliki anggota yang berkomitmen tinggi dalam memajukan koperasi, oleh karena itu anggota antusias menyimpan uang di koperasi, sehingga permodalan koperasi menjadi kuat dan mandiri, tanpa harus di support pihak lain. Jika jumlah koperasi simpan pinjam kepemilikan mandiri tinggi, ini menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang kuat dari anggota koperasi dalam mengelola dan mengendalikan usaha mereka sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodesasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Koperasi Jasa

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Jasa Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi jasa mencerminkan sejauh mana koperasi menjadi alternatif dalam sektor jasa dan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan jasa yang beragam. Jika jumlah koperasi jasa tinggi, maka menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam mendirikan dan memanfaatkan koperasi sebagai penyedia layanan jasa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Jasa Dibantu Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Jasa Dibantu Pemerintah Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat yang permodalannya dibantu pemerintah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, bantuan dapat berupa modal, pendamping

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi jasa yang dibantu oleh pemerintah dapat mencerminkan tingkat perhatian dan komitmen pemerintah terhadap sektor jasa serta upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan dan keberhasilan koperasi jasa. Jika jumlahnya tinggi, ini dapat menunjukkan adanya kebijakan yang mendukung, program pemerintah yang efektif, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk sektor koperasi jasa.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah Koperasi Jasa Kepemilikan Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Jasa Kepemilikan Mandiri
Koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat yang permodalannya dari anggota

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jika jumlah koperasi jasa kepemilikan mandiri tinggi, maka menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang kuat dari anggota koperasi dalam mengelola dan mengendalikan usaha mereka sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Pemasaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Pemasaran Koperasi yang usaha utamanya pemasaran barang atau jasa anggota

Unit Penyelenggara

Dinas Koperasi dan UMKM

Kelompok Indikator

Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Untuk mendongkrak volume usaha koperasi pemasaran, koperasi diharapkan membentuk JUK (Jaringan Usaha Koperasi) agar permasalahan pemasaran produk bisa diatasi dgn mudah dan membawa solusi yg bermanfaat bagi koperasi. Jumlah koperasi pemasaran dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana para produsen atau petani memanfaatkan model koperasi dalam pemasaran produk mereka. Jika jumlahnya tinggi, maka menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang kuat dari produsen atau petani dalam berkolaborasi dan menggunakan kekuatan kolektif dalam pemasaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Koperasi Pemasaran Dibantu Pemerintah

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Pemasaran Dibantu Pemerintah Koperasi yang usaha utamanya pemasaran barang atau jasa anggota dengan permodalan dari pemerintah

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi pemasaran yang dibantu oleh pemerintah dapat mencerminkan tingkat perhatian dan komitmen pemerintah terhadap sektor pemasaran serta upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan dan keberhasilan koperasi pemasaran. Jika jumlahnya tinggi, maka dapat menunjukkan adanya kebijakan yang mendukung, program pemerintah yang efektif, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk sektor koperasi pemasaran.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan
Ukuran
Satuan
Apakah Indikator Dapat Diakses
Umum

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan
Jumlah
unit
Ya



Jumlah Koperasi Pemasaran Kepemilikan Mandiri

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Koperasi Pemasaran Kepemilikan Mandiri Koperasi yang usaha utamanya pemasaran barang atau jasa anggota dengan permodalan dari anggotanya

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah koperasi pemasaran kepemilikan mandiri mencerminkan tingkat partisipasi anggota dan kontrol yang dimiliki oleh mereka dalam mengelola koperasi serta kegiatan pemasaran produk. Jika jumlah koperasi pemasaran kepemilikan mandiri tinggi, ini menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang kuat dari anggota koperasi dalam mengelola dan mengendalikan usaha mereka sendiri.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jenis Koperasi di Kabupaten

Periodesasi

Purbalingga

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Jumlah Koperasi Hasil Pendataan

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah UMKM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak Rp 500.000.000

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah UMKM menunjukkan jumlah usaha mikro Kabupaten Purbalingga yang masuk ke ODS UMKM. Jika jumlah UMKM tinggi, maka menunjukkan adanya partisipasi yang luas dari wirausaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan ekonomi.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Pendataan BPS dan Dinkop UKM dari ODS

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah UMKM Bersertifikat/Berijin

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMKM Bersertifikat/Berijin Usaha Mikro yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), Hak Merk dan Halal.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah UMKM Bersertifikat/Berijin memberikan gambaran tentang sejauh mana UMKM di suatu daerah telah menjalankan proses legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Pendataan dan Pendampingan Dinkop

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Ya



Jumlah UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha)

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMKM Naik Kelas (Usaha Mikro menjadi Wirausaha) UMKM yang berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil serta memiliki NIB dan SKU (Surat Keterangan Usaha), Memiliki sertifikat Halal, memiliki perizinan dari PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) ke halal, sudah mengikuti pelatihan marketing online, lolos kurasi produk.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Semakin banyak jumlah UMKM naik kelas menunjukkan semakin tinggi UMKM yang berkembang.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Penilaian Dinkop UKM

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMKM yang difasilitasi promosi UMKM yang difasilitasi pemasarannya baik online maupun offline (Tuka Tuku). Tuka Tuku merupakan platform marketplace yang menjual berbagai produk unggulan dari UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran menunjukkan jumlah UMKM Binaan Dinkop UKM yang sudah mendapatkan fasilitasi pelatihan pemasaran dan pemasaran online maupun offline. Semakin tinggi jumlah yang difasilitasi menunjukkan bahwa semakin banyak UMKM yang pemasarannya semakin luas.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodikasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Penilaian Dinkop UKM

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

UMKM yang difasilitasi melalui internet UMKM yang difasilitasi pemasarannya secara online (Shopee, Bukalapak, Waralaba)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui internet menggambarkan jumlah UMKM yang telah mendapatkan dukungan dan fasilitasi dalam hal pemanfaatan teknologi internet untuk kegiatan bisnis mereka. Jika jumlahnya tinggi, maka menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi digital oleh UMKM, yang dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi operasional, mencapai pasar yang lebih luas, dan bersaing di era digital.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Hasil Penilaian Dinkop UKM

Ukuran

Jumlah

Satuan

unit

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Jumlah Paguyuban UMKM Di Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Jumlah Paguyuban UMKM Di Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Jumlah paguyuban UMKM yang didampingi usahanya oleh Dinkop UKM mulai dari branding produk, kemasan, maupun pemasaran

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah Paguyuban UMKM yang di fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembentukan dan pengembangan paguyuban UMKM.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan Ukuran Satuan Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Data Binaan Dinkop
Jumlah
unit
Ya



Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Produk UMKM yang bersertifikat Depkes (Departemen Kesehatan) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Produk UMKM yang sudah tersertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Halal

Unit Penyelenggara Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI memberikan gambaran tentang sejauh mana UMKM telah mengikuti proses sertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Jika jumlahnya tinggi, ini menunjukkan adanya komitmen UMKM dalam memproduksi produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Data Binaan Dinkop

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Penyerapan Tenaga Kerja di UMKM
Tenaga kerja yang dipekerjakan dan dimanfaatkan dalam operasional usaha UMKM

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam sektor UMKM serta tingkat keterlibatan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Jika jumlahnya tinggi, ini menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dari UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat.

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga

Periodikasi

Tahunan

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Perhitungan estimasi, diasumsikan setiap UMKM memiliki 2 tenaga kerja

Ukuran

Jumlah

Satuan

orang

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum



Kontribusi UMKM terhadap PDRB

■ IDENTITAS INDIKATOR

Konsep dan Definisi

Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kontribusi sektor-sektor UMKM (di luar sektor pertanian dan jasa) terhadap total PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)

Unit Penyelenggara
Kelompok Indikator

Dinas Koperasi dan UMKM
Aspek Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Interpretasi

Kontribusi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menggambarkan sejauh mana sektor UMKM berperan dalam menciptakan nilai tambah dalam perekonomian suatu wilayah. Jika kontribusi UMKM terhadap PDRB tinggi, maka menunjukkan bahwa UMKM memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian

■ DATA

Data yang Dikumpulkan

Jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga
Tahunan

Periodesasi

■ METODOLOGI

Metode/Rumus Penghitungan

Sektor-sektor UMKM dibagi PDRB

Ukuran

Persentase

Satuan

%

Apakah Indikator Dapat Diakses

Ya

Umum

METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN PURBALINGGA

Buku Metadata Indikator Statistik Sektoral berisi sekumpulan atribut informasi dari seluruh data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga.

Buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kedua, terdiri dari metadata indikator dari Dinrumkim, Dinsosdaldukkbp3a, Dinnaker, DKPP, DLH, Dindukcapil, Dinpermasdes, Dinhub, Dinkominfo dan Dinkopukm.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A,
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313